

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan



PEMBANGUNAN LIMA TAHUN DI PROPINSI JAWA TIMUR 1969--1988

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1999**

PEMBANGUNAN LIMA TAHUN DI PROPINSI JAWA TIMUR 1969--1988

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
J A K A R T A
1999**

PEMBANGUNAN LIMA TAHUN DI PROPINSI JAWA TIMUR 1969–1988

Tim Penulis : Drs. Suwondo Arief
Drs. Bambang Soedharsono S.
Drs. Sumarno

Penyunting : M. Sanggupri Bochari

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal
Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Jakarta 1999

Edisi 1999

Dicetak oleh : **CV. ILHAM BANGUN KARYA**

ISBN 979-9335-09-4

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan berbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Proyek IDSN), dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu, para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik mengenai kepahlawanan, kejujuran, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Proyek IDSN itu tidak luput dari berbagai kelemahan: isi, bahasa, maupun penyajiannya, namun kami meyakinkan pembaca bahwa kesalahan dan kelemahan itu tidaklah disengaja. Untuk itu, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik, saran perbaikan terhadap karya-karya Proyek IDSN ini. Kritik dan saran itu tentu akan sangat berguna untuk memperbaiki karya-karya proyek ini.

Kepada para penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung

maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya
Proyek IDSN sebagaimana adanya ditangan pembaca,
kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Juli 1999
Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'IGN. Anom', is written over a horizontal line.

IGN. Anom
NIP. 130353848

PENGANTAR

Buku *Pembangunan Lima Tahun Di Propinsi Jawa Timur 1969-1988* ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/penulisan yang diselenggarakan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999/2000.

Buku ini menguraikan tentang sejarah singkat Propinsi Jawa Timur, pada masa awal order baru politik, pemerintah, kependudukan, sosial, ekoomi, pendidikan serta agama.

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk menambah informasi kesejarahan mengenai peran serta masyarakat dalam masa pebangunandan dalam perjalanan bangsa Indonesia pada umumnya.

Diharapkan dengan terbitnya buku ini dapat menambah khasanah sejarah Indonesia dan memberi informasi yang memadai bagi mereka yang berminat, dan dapat menjadi bahan peningkatan kesadaran sejarah masyarakat terutama generasi penerus bangsa.

Jakarta, Juli 1999

**Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional**



Wiwi Kuswiah
NIP. 131125902

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat, taufiq dan hidayahNya kegiatan penulisan *Sejarah Pembangunan Lima Tahun di Propinsi Jawa Timur 1969--1988* dapat diselesaikan.

Untuk terwujudnya laporan kegiatan penulisan *Sejarah Pembangunan Lima Tahun di Propinsi Jawa Timur 1969--1988* ini kami banyak memperoleh dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Atas segala bantuannya itu kami menyampaikan terima kasih.

Rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada Pemimpin Proyek IDSN, Dra. G.A. Ohorella, yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka kegiatan penulisan *Sejarah Pembangunan Lima Tahun di Propinsi Jawa Timur 1969--1988*. Tidak lupa pula kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sub. Dit. Sejarah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Dra. Sri Sutjatiningsih; Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, Dra. Umiati N.S., yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan tugas penelitian ini.

Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak-bapak/Ibu-ibu Pengurus Perpustakaan Pemda Tk I Propinsi Jawa Timur;

2. Bapak-bapak/Ibu-ibu Pengurus Perpustakaan Wilayah Jawa Timur;
3. Bapak-bapak/Ibu-ibu pengurus Perpustakaan di lingkungan Universitas Airlangga Surabaya;
4. Bapak-bapak/Ibu-ibu Pengurus Perpustakaan Surabaya Post;
5. Bapak Kepala Arsip Daerah Jawa Timur beserta staf;
6. Semua pihak yang tak sempat kami sebutkan yang ikut membantu terselesaikannya laporan ini.

Kami telah berusaha agar laporan ini dapat memenuhi harapan para pembaca atau yang memerlukan, namun kami juga menyadari sebagai manusia biasa yang serba kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu dengan lapang dada kami menerima segala kritik dan saran yang diberikan untuk lebih sempurnanya laporan ini.

Mudah-mudahan dengan tersusunnya laporan ini dapat menambah khasanah referensi tentang Pembangunan Jawa Timur selama Pelita I sampai pelita IV.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Pengantar	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Metodologi	3
1.5 Sistematika Penulisan	5
Bab II Sejarah Singkat Propinsi Jawa Timur	
2.1 Letak Geografis, Keadaan Alam dan Kependudukan	7
2.1.1 Letak Geografi	7
2.1.2 Keadaan Alam	8
2.1.3 Kependudukan	15
2.2 Perkembangan Administrasi dan Pemerintahan	21
Bab III Propinsi Jawa Timur Pada Awal Orde Baru	
3.1 Keadaan Politik dan Pemerintahan	37
3.2 Keadaan Sosial Ekonomi Pendidikan	46
3.2.1 Keadaan Sosial Ekonomi	46
3.2.2 Pendidikan	51

Bab IV	Jawa Timur Pada Masa Pembangunan (1969–1988)	
4.1	Pertanian	63
4.1.1	Tanaman Pangan	63
4.1.2	Tanaman Perkebunan	78
4.2	Industri.....	88
4.2.1	Industri Kecil	97
4.2.2	Industri Menengah dan Besar	98
4.2.3	Industri Pariwisata	100
4.3	Penduduk dan Tenaga Kerja	108
4.3.1	Penduduk.....	108
4.3.2	Tenaga Kerja.....	129
Bab V	Bidang Sosial dan Kebudayaan Jawa Timur Pada Masa Pembangunan (1969--1988)	
5.1	Perubahan Sosial	146
5.2	Agama dan Adat Istiadat.....	149
5.3	Seni Budaya	157
5.4	Pendidikan.....	168
Bab VI	Simpulan	187
Daftar Pustaka		195

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1 Temperatur Udara di Jawa Timur Tahun 1971--1974 (dalam derajat Celcius)	9
2. Tabel 2 Temperatur Udara di Jawa Timur 1989 ($^{\circ}\text{C}$)	9
3. Tabel 3 Jumlah Hari Hujan (HH) rata-rata dan Curah Hujan rata-rata Tahunan di Jawa Timur Tahun 1967--1975 (dalam hari dan militer)	10
4. Tabel 4 Jumlah Hari Hujan (HH) Rata-rata dan Curah Hujan (CH) Rata-rata Bulanan di Jawa Timur Tahun 1967--1975	11
5. Tabel 5 Curah Hujan Rata-rata 1984--1989 Jawa Timur ...	12
6. Tabel 6 Jumlah Penyebaran dan Kepadatan Penduduk di Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1975	16
7. Tabel 7 Komposisi Penduduk Jawa Timur Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 1971	17
8. Tabel 8 Jumlah Penduduk Akhir Tahun Jawa Timur 1985--1989	19
9. Tabel 9 Angkatan Kerja di Jawa Timur Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 1974	20
10. Tabel 10 Jumlah pencarian kerja, penempatan dan permintaan menurut jenis kelamin 1988--1989	21

11. Tabel 11 Perkembangan GRDP Sektor Pertanian Jawa-Timur Dalam Pelita III	70
12. Tabel 12 Peruntukan Tanah di Jawa Timur	70
13. Tabel 13 Produksi Pertanian Tanaman Pangan Jawa Timur Tahun 1979--1982	72
14. Tabel 14 Rata-rata Per Hektar Hasil Pertanian Tanaman Pangan Jawa Timur Tahun 1979--1982	73
15. Tabel 15 Target Sasaran Produksi Tanaman Pangan Jawa Timur Tahun 1984--1988	74
16. Tabel 16 Kebutuhan Pupuk Jawa Timur Tahun 1984--1988	75
17. Biaya Sektor Pertanian Tahun 1984-1989	77
18. Tabel 18 Kesempatan Kerja Sektor Pertanian Jawa Timur Tahun 1984-1988	78
19. Tabel 19 Produksi Perkebunan di Jawa Timur	82
20. Tabel 20 Luas Areal Tanaman Perkebunan Utama Jawa Timur 1978--1982	84
21. Tabel 21 Perkebunan Produksi Perkebunan Terpenting Jawa Timur 1978--1982 (Dalam Ton)	85
22. Tabel 22 Perkembangan Volume Ekspor Perkebunan Tahun 1978--1982	86
23. Tabel 23 Perkembangan Perkebunan Milik PNP/PTP dan Perkebunan Besar Swasta Selama Pelita III	87
24. Tabel 24 Proyek Produksi Perkebunan di Jawa Timur Tahun 1984--1988	88
25. Tabel 25 Perkebunan Industri Jawa Timur Tahun 1979--1983	96

26. Tabel 26 Sumbangan Sektor Industri Terhadap PDRB Jawa Timur Tahun 1984--1989	97
27. Tabel 27 Produksi Industri Kimia Dasar, Logam Dasar, Peralatan Berat dan Angkutan Umum Jawa Timur Tahun 1984/1985--1988/1989	100
28. Kunjungan wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 1983--1987.....	105
29. Tabel 29 Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kawasan Gunung Bromo	105
30. Tabel 30 Pendapatan Pemerintah dari Pariwisata untuk Pajak Pembangunan Tahun 1979--1983	107
31. Tabel 31 Kunjungan Wisatawan ke Jawa Timur Tahun 1984--1988	107
32. Tabel 32 Pendapatan Pemerintah Dari Pariwisata Untuk Pajak Pembangunan Tahun 1984--1988	108
33. Tabel 33 Persentase Penduduk Yang Masih Sekolah....	113
34. Tabel 34 Anggaran APBN Untuk Air Bersih di Jawa Timur 1984--1989	117
35. Tabel 35 Sekolah Paramedik Jawa Timur Pelita III-Pelita IV (s.d. Tahun 1989)	118
36. Tabel 36 Pencapaian Akseptor Baru Keluarga Berencana Tahun 1968--1974 Provinsi Jawa Timur	120
37. Tabel 37 Pencapaian Akseptor Baru Keluarga Berencana Tahun 1983--1984 Provinsi Jawa Timur	120
38. Pencapaian Pegawai BKKN Tahun 1983--1984 Berdasarkan Golongan.....	121
39. Tabel 39 Target Peserta KB Baru Pelita IV (Per Tahun)	121

40. Tabel 40 Target Peserta KB Aktif Pelita IV (Per Tahun)	122
41. Tabel 41 Liputan Pelaksanaan Program Integrasi KB/Gizi Jawa Timur Tahun 1980--1984	123
42. Tabel 42 Anggaran Transmigrasi Jawa Timur (APDB) ...	126
43. Tabel 43 Realisasi Pemberangkatan Transmigrasi Jawa Timur Tahun 1969--1974	127
44. Tabel 44 Pemberangkatan Transmigrasi Jawa Timur Tahun 1984--1988/1989	129
45. Tabel 45 Pertumbuhan Penduduk Kotamadya Surabaya 1970--1990 (Per 1.000 Penduduk)	129
46. Tabel 46 Angkatan Kerja Jawa Timur Pelita I Usia 10 Tahun Keatas	134
47. Tabel 47 Angkatan Kerja Jawa Timur Pelita I Untuk Laki-Laki Usia 10 Tahun Keatas.	134
48. Tabel 48 Angkatan Kerja Jawa Timur Pelita I Ber- dasarkan Lapangan Pekerjaan	135
49. Tabel 49 Penyerapan Tenaga Kerja Perusahaan Bidang Industri Selama Pelita III	135
50. Tabel 50 Target Perkiraan dan Penyerapan Tenaga Kerja Dalam PMA dan PMDN	136
51. Tabel 51 Investasi PMA dan PMDN di Jawa Timur	137
52. Tabel 52 Persentase Kesempatan Kerja Dalam Tiap Sektor Selama Pelita III di Jawa Timur	138
53. Tabel 53 Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Pencari Kerja di Jawa Timur Tahun 1979--1983	139
54. Tabel 54 Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja, Pencari Kerja di Jawa Timur Tahun 1984--1988	141

55. Tabel 55 Kesempatan Kerja Menurut Sektor Lapangan Kerja di Jawa Timur Tahun 1984--1988	141
56. Tabel 56 Rekapitulasi Biaya Pembangunan Bidang Agama (Islam) Jawa Timur 1969--1974.....	152
57. Tabel 57 Sekolah Agama Islam di Jawa Timur Selama Tahun Tahun 1969--1974	153
58. Tabel 58 Perkembangan Tempat Ibadah di Jawa Timur Tahun 199--1984.....	155
59. Tabel 59 Biaya Seni Budaya di Jawa Timur 1973	159
60. Tabel 60 Pembinaan Permuseuman dan Kepurbakalaan di Jawa Timur Tahun 1984--1989	167
61. Tabel 61 Pembangunan Sub Sektor Pendidikan Dasar di Jawa Timur Tahun 1969--1974	172
62. Tabel 62 Pembiayaan Pendidikan Non Pelita di Jawa Timur Tahun 1969--1974	173
63. Tabel 63 Pembiayaan Universitas Airlangga	176
64. Tabel 64 Pembiayaan IKIP Surabaya	177
65. Tabel 65 Jumlah SD Kecil Jawa Timur Tahun 1979--1984	180
66. Tabel 66 Kebutuhan Ruang Belajar Pendidikan Dasar SD/MI di Jawa Timur Selama Pelita IV	180
67. Tabel 67 Lulusan SD Yang Tertampung Di SMP di Jawa Timur Tahun 1979--1984	181
68. Siswa SMA Negeri dan Swasta Jawa Timur Tahun 1979--1984	182
69. Tabel 69 Daya Tampung SMA di Jawa timur Tahun 1984--1989	183

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama yang dimulai tahun 1969 merupakan program utama Pemerintah Orde Baru. Program Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam berbagai bidang kehidupan yang timbul akibat kegagalan di masa pemerintah Orde Lama.

Menurut catatan sejarah, di masa Pemerintah Orde Lama memang terjadi krisis di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Saat itu sering terjadi penyelewengan terhadap konstitusi dan pertikaian politik, sehingga menimbulkan pergolakan-pergolakan yang mencapai klimaknya pada tahun 1965, yaitu saat meletus pemberontakan G. 30 S/PKI.

Suatu kenyataan bahwa Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama yang menjadi program utama Orde Baru telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia. Keberhasilan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama ini tentu saja merupakan hasil kerja keras rakyat dan pemerintah Indonesia, dalam hal ini termasuk rakyat dan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur.

Kesungguhan partisipasi rakyat dan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur dalam rangka mensukseskan program

Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama tentunya dapat dipahami, karena Propinsi Jawa Timur merupakan suatu bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu, menurut catatan sejarah, sejak dahulu Jawa Timur telah mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan sejarah Indonesia.

Dalam kurun waktu 1969--1988, yaitu sejak awal Pelita/ Pembangunan Lima Tahun pertama sampai dengan akhir Pelita ke empat, gerak pembangunan di Provinsi Jawa Timur dalam berbagai aspek kehidupan telah berjalan dengan baik. Perencanaan yang hati-hati dan dengan modal kemauan yang besar serta bimbingan dari Pemerintah Pusat, hasil pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 1969--1988 telah dapat dirasakan oleh rakyat Jawa Timur dan juga tentunya oleh bangsa Indonesia.

Dari perjuangan dalam bidang pembangunan nasional ini, Jawa Timur dianugerahi Prasamya Purnakarya Nugraha. Ini sebagai bukti bahwa daerah Jawa Timur telah melakukan segala kerja pembangunan dengan hasil paling baik. Ini juga berarti bahwa pada periode itu di Provinsi Jawa Timur telah terjadi banyak perubahan. Namun sayang perubahan-perubahan penting di Jawa Timur pada periode pembangunan ini belum banyak ditulis.

Sebenarnya sudah ada beberapa tulisan tentang perkembangan pembangunan selama Orde Baru. Namun tulisan-tulisan itu pada umumnya lebih banyak membahas perkembangan pembangunan Indonesia secara Nasional atau makro. Dengan demikian karakteristik gerak pembangunan dan potensi Daerah Jawa Timur banyak yang tidak tampak.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan gerak pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Propinsi Jawa Timur, dalam kurun waktu 1969--1988 yaitu sejak awal Pelita pertama sampai dengan akhir Pelita ke empat.

Dalam hal ini yang akan mendapat perhatian terutama yang menjadi ciri khusus dan menjadi motor “utama” gerak maju pembangunan dari daerah ini. Dengan demikian dari penelitian ini selain dapat memperkaya kajian yang telah ada juga dapat memberikan informasi yang lebih beragam tentang khasanah penulisan sejarah Indonesia.

1.3 Ruang Lingkup

Pembangunan Jangka Panjang Tahap pertama di Jawa Timur mempunyai karakteristik tersendiri. Prosesnya dimulai sejak tahun 1969 dan dilaksanakan lima tahun secara periodik. Pada periode 1969--1988, yaitu sejak dimulainya Pelita pertama sampai akhir Pelita keempat, hasilnya tampak dengan jelas dan dapat dirasakan.

Sehubungan dengan itu dan sesuai dengan ketentuan *Term Of Reference* (TOR), maka periode 1969--1988 sebagai batasan temporal. Sedangkan secara geografis, ruang lingkungannya dibatasi hanya seputar Provinsi Jawa Timur. Adapun tema-tema yang dibahas, lebih banyak difokuskan pada aspek-aspek yang menjadi karakteristik atau potensi pendorong pembangunan di daerah Jawa Timur.

Guna memberikan gambaran yang utuh atau kejelasan kausalitas tentang Pembangunan Lima Tahunan di Provinsi Jawa Timur periode 1969--1988, dalam tulisan ini akan diuraikan pula keadaan Jawa Timur sebelum Pembangunan Lima Tahun dimulai. Melalui uraian itu diharapkan akan dapat terlihat dengan jelas proses pembangunannya, baik yang menyangkut perkembangan idenya maupun pelaksanaannya.

1.4 Metode Penelitian dan Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian dan penulisan Pembangunan Lima Tahun di Provinsi Jawa Timur 1969--1988, ialah *Metode Sejarah Kritis*. Metode ini terperinci dalam empat tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan Sumber:

Dalam pengumpulan sumber, penulis mempergunakan metode:

Pertama, *metode kepustakaan*. Sumber dikumpulkan dari berbagai buku kepustakaan, atau karya tulis yang berkaitan dengan pokok masalah. Buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh yang bersangkutan (pelaku) ditempatkan sebagai sumber autentik yang penting. Selain buku-buku, juga dikumpulkan jurnal-jurnal, majalah, dan surat kabar yang memuat persoalan yang relevan.

Kedua, *metode dokumenter*. Sumber dikumpulkan dari arsip berupa: laporan-laporan, surat-surat selebaran, dan pengumuman yang ada atau tersimpan. Laporan yang dibuat oleh yang berkepentingan atau berwenang merupakan sumber autentik yang penting.

Ketiga, *metode wawancara*. Sumber dikumpulkan lewat wawancara dengan responden yang dianggap mengetahui atau mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung. Responden tersebut yaitu, antara lain: para pelaku, para saksi mata, pejabat, dan juga para tokoh masyarakat.

2. Tahap Kritik Sumber

Pada tahap ini sumber-sumber yang berhubungan dengan pokok bahasan yang telah terkumpul, dilakukan kritik dengan maksud untuk mendapatkan kebenaran. Dengan demikian keabsahan dan outentisitas sumber yang didapatkan itu dapat dipercayai atau dipertanggungjawabkan.

3. Tahap Interpretasi Terhadap Fakta-fakta

Setelah kritik sumber dilakukan, selanjutnya penulis mengadakan interpretasi terhadap fakta-fakta yang didapatkan dari sumber-sumber itu.

4. Tahap Penulisan

Pada tahap ini, fakta-fakta yang telah diinterpretasikan itu, selanjutnya akan disintesakan menjadi rangkaian paparan sejarah sesuai dengan tujuan penulisan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran terperinci, laporan hasil penelitian ini akan disusun dalam bab demi bab. Penyusunan itu dilandasi oleh keinginan agar isi laporan dapat menyajikan gambaran berkarakteristik sejarah, yakni menunjukkan suatu kontinuitas perkembangan kejadian yang berurutan. Secara garis besar isi laporan penelitian ini terdiri atas enam bab. Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang: latar belakang masalah; tujuan penelitian; ruang lingkup; metode penelitian dan penulisan; dan sistematika penulisan.

Bab II Sejarah Singkat Provinsi Jawa Timur. Dalam bab ini diuraikan: letak geografi; keadaan alam dan kependudukan; dan perkembangan administrasi pemerintah.

Bab III Provinsi Jawa Timur Pada Masa Pembangunan (1969--1988). Dalam bab ini akan diuraikan; pertanian, industri, baik industri kecil/rumahan, industri besar/pabrik, maupun industri pariwisata; dan penduduk serta tenaga kerja.

Bab V Sosial dan Kebudayaan di Jawa Timur (1969--1988). Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Perubahan Sosial; Agama dan Adat Istiadat; serta Seni Budaya dan Pendidikan.

Bab VI Simpulan, yaitu uraian singkat sebagai penutup

BAB II

SEJARAH SINGKAT PROPINSI JAWA TIMUR

2.1 Letak Geografi, Keadaan Alam dan Kependudukan'

2.1.1 Letak Geografi

Secara astronomi, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur terletak di antara 7°12'--8°48' garis Lintang Selatan (LS) dan antara 111°--114° garis Bujur Timur (BT). Berdasarkan letak lintangnya, maka Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berada pada daerah tropis.

Seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, termasuk pulau-pulau besar dan kecil yang terdapat di sekitar daerah utama, luasnya 47.922,0175 km² atau 4.792.201,75 ha. Panjang wilayah Jawa Timur dari arah barat ke timur kurang lebih 400 km. Sedangkan lebar wilayah Propinsi ini tidak sama. Di bagian barat yang berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah, lebarnya kurang lebih 200 km; di bagian timur kurang lebih 105 km; dan di bagian tengah kurang lebih 60 km.

Batas-batas wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dapat disebutkan sebagai berikut. Di bagian utara Laut Jawa, di bagian timur Laut Jawa dan Selat Bali, di bagian selatan Samudra Indonesia, dan di bagian barat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Secara administratif Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur terdiri dari 7 Wilayah Kerja Pembantu Gubernur (eks Karensidenan), yaitu Wilayah Kerja Pembantu Gubernur Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura. Dari 7 Wilayah Kerja Pembantu Gubernur ini terbagi menjadi 8 Kotamadya dan 29 Kabupaten Daerah Tingkat II. Tujuh Kotamadya tersebut ialah: Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Blitar, Mojokerto, Pasuruan dan Probolinggo. Adapun 29 Kabupatennya adalah: Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jkombang, Nganjuk, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan.

2.1.2 Keadaan Alam

Keadaan iklim di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh laut yang sangat luas di sekitarnya, dua benua yang berdekatan yaitu Australia dan Asia, dan perubahan kedudukan matahari dalam tiap-tiap tahun. Karena itu, iklim di daerah Jawa Timur tidak dapat dipisahkan dengan keadaan iklim di seluruh wilayah Indonesia, yaitu iklim muson laut tropis. Ini berarti bahwa di dalam masa satu tahun daerah Jawa Timur mengalami dua musim, yaitu musim kemarau kurang lebih 6 bulan dan musim hujan kurang lebih 6 bulan.

Berdasarkan catatan Kantor Meteorologi dan Geofisika Surabaya, keadaan temperatur udara rata-rata tahunan di Jawa Timur $27,54^{\circ}\text{C}$ temperatur udara maksimum rata-rata $33,40^{\circ}\text{C}$, sedangkan temperatur udara minimum rata-rata $21,69^{\circ}\text{C}$. untuk jelasnya lihat tabel 1.

Tabel 1
Temperatur Udara di Jawa Timur
Tahun 1971-1974 (dalam derajat Celcius)

Tahun	Temperatur Max	Temperatur Min	Temperatur rata-rata tahunan
1971	32,83	21,01	26,92
1972	33,85	21,21	27,53
1973	33,64	22,34	27,99
1974	33,26	22,18	27,72
Temp. rata rata/th	33,40	21,69	27,54

Sumber : Kantor Meteorologi dan Geofisika Surabaya

Hingga tahun 1989 keadaan cuaca di Jawa Timur menunjukkan kondisi tiap bulan sebagai berikut:

Tabel 2
Temperatur Udara di Jawa Timur 1989 (°C)

Bulan	Temperatur Max	Temperatur Min	Temperatur rata-rata tiap bulan
Januari	34,2	22,6	28,4
Februari	33,7	22,4	28,1
Maret	33,4	21,8	22,6
April	34,6	22,2	28,4
Mei	33,2	22,4	26,5
Juni	32,4	21,4	26,9
Juli	32,6	21,4	27,0
Agustus	32,0	19,8	25,9
September	34,5	19,6	27,1
Oktober	35,0	21,5	28,2
November	34,6	19,6	27,2
Desember	33,8	21,9	28,7

Sumber: Jawa Timur dalam angka 1989, kantor Statistik dan Pemerintahan Jawa Timur

Adapun keadaan curah hujan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur antara tahun 1967--1975 berdasarkan pencatatan Dinas Pertanian Rakyat dapat dikemukakan sebagai berikut: Curah hujan tahunan rata-rata 1.937 mm dan hari hujan rata-rata 103,67 hari. Curah hujan tahunan terkering 1,322 mm, yang terjadi pada tahun 1967. Sedangkan curah hujan tahunan terbesar 2.473 mm, yang terjadi pada tahun 1975 (lihat tabel 2).

Tabel 3
Jumlah Hari Hujan (HH) rata-rata dan Curah Hujan
rata-rata Tahunan di Jawa Timur Tahun 1967--1975
(dalam hari dan milimeter)

Tahun	Jumlah			
	HH	CH	Bulan Basah	Bulan Kering
1967	85	1.322	5	6
1968	132	2.334	9	1
1969	76	1.443	5	5
1970	97	1.901	7	3
1971	109	2.100	9	3
1972	77	1.444	6	4
1973	121	2.339	8	1
1974	110	2.080	9	2
1975	126	2.473	9	3
Jumlah	-	-	67	28

Sumber: Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Jawa Timur

Bulan terbasah jatuh pada Januari dengan curah hujan bulanan rata-rata 263,11 mm. Bulan terkering jatuh pada Agustus dengan curah hujan bulanan rata-rata 32,89 mm. Adapun jumlah hari hujan terbanyak jatuh pada Maret dengan rata-rata hari hujannya 14,78 hari. Jumlah hari hujan terkecil jatuh pada Agustus dengan rata-rata hari hujannya 2,33 hari. (lihat tabel 4).

Tabel 4
**Jumlah Hari Hujan (HH) Rata-rata dan
Curah Hujan (CH) Rata-rata Bulanan
di Jawa Timur Tahun 1967--1975**

Bulan	HH Rata-rata Bulanan (hari)	Curah Hujan Rata-rata Bulanan (mm)
Januari	14,56	263,11
Februari	14	214,67
Maret	14,78	247,67
April	9,33	179,67
Mei	9,33	164,56
Juni	4,67	70,11
Juli	3,11	52,33
Agustus	2,33	32,89
September	3,78	60,89
Oktober	5,67	116
November	9,33	116,44
Desember	13,22	245,22

Sumber: Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Jawa Timur

Hingga tahun 1989 kondisi hujan di Jawa Timur dapat dilihat dari curah hujan tiap kabupaten sebagai berikut:

Tabel 5
Curah Hujan Rata-rata 1984-1989 Jawa Timur

KABUPATEN	1984	1985	1986	1987	1989
Pacitan	34	119	127	107	158
Ponorogo	87	106	115	96	165
Trenggalek	-	-	57	115	210
Tulungagung	137	105	131	98	157
Blitar	124	101	128	94	172
Kediri	114	81	97	89	128
Malang	131	103	113	103	174
Lumajang	73	110	136	110	202
Jember	62	106	121	114	179
Banyuwangi	116	130	100	88	159
Bondowoso	96	105	88	73	153
Situbondo	31	52	57	62	75
Probolinggo	65	81	84	83	153
Pasuruan	85	85	78	71	181
Sidoarjo	42	76	79	72	169
Mojokerto	94	91	100	79	160
Jombang	62	66	68	62	133
Nganjuk	101	76	88	86	171
Madiun	85	103	107	62	183
Ngawi	62	107	93	93	171
Bojonegoro	88	85	96	85	170
Tuban	85	85	96	93	166
Lamongan	81	79	88	80	125
Bangkalan	33	62	89	70	134
Pamekasan	68	64	69	68	110
Sumenep	47	56	62	60	123

Sumber: Jawa Timur dalam angka 1989, Kantor Statistik dan Pemerintahan Jawa Timur

Keadaan geologis Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur secara garis besar dapat dibedakan atas 3 daerah struktur geologis yaitu sebagai berikut:

- a. Pegunungan Selatan (*The Southern Plateau Zone*)
Pegunungan selatan ini merupakan pegunungan lipatan yang berstruktur berlapis-lapis (*plateau*). Batuan dasarnya terdiri atas batuan kapur yang terbentuk pada jaman Oligasin dan Miosin.
- b. Zone Tengah (*Central Zone*)
Zone ini merupakan suatu daerah depresi yang disana sini terdapat gunung-gunung berapi (*vulkan-vulkan*) baik yang sudah padam, yang sedang beristirahat, (*past volcano*) maupun yang masih aktif. Batuan dasarnya terdiri dari batuan *andesit* dan *bazalt*.
- c. Pegunungan Utara
Daerah pegunungan utara terdiri dari dua daerah pegunungan yaitu Pegunungan Kendeng (*Kendeng Ridge*) di selatan dan pegunungan Rembang (*Rembang Hills*) di bagian utara. Struktur geologisnya merupakan daerah pegunungan lipatan yang terjadi pada jaman *Oligasin-Miosin* dan *Pliosin*. Batuan dasar pegunungan utara tersebut terdiri dari batuan kapur dan *Mergel*.

Selanjutnya mengenai keadaan tinggi rendah (*relief*) permukaan bumi di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Dataran rendah
Yang termasuk ke dalam daerah dataran rendah ialah daerah yang ketinggiannya kurang dari 500 meter. Luas daerah dataran rendah ini meliputi 4.121.293,50 ha atau 86% dari seluruh luas daerah Jawa Timur. Dari seluruh luas dataran rendah tersebut 61% nya terletak di daerah dengan relief landai-bergelombang (lereng 0-25%). Sedangkan yang 18% nya terletak di daerah berbukit-bukit yaitu daerah dengan kemiringan 25-40%, dan yang 7% nya terletak di daerah bergnung-gunung yaitu daerah dengan kemiringan lebih besar dari 40%.

b. Dataran tinggi

Yang dapat digolongkan ke dalam daerah dataran tinggi ialah daerah yang ketinggiannya antara 500-100 meter. Luas daerah dataran tinggi ini ada 431.291,16 ha atau 9% dari luas daerah Tingkat I Jawa Timur. Dari seluruh luas dataran tinggi ini yang 2% nya mempunyai kemiringan antara 25-40% atau berbukit-bukit, sedangkan yang 7% nya mempunyai kemiringan di atas 40% atau daerah bergunung-gunung, dan yang selebihnya yaitu yang 5% adalah merupakan daerah pegunungan tinggi yaitu daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter dan kemiringan lerengnya lebih dari 40%.

Di propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, terdapat 80 sungai. Sesuai dengan arah kemiringan daerah di Jawa Timur, maka sebagian besar dari sungai-sungai itu, mengalir ke arah utara melalui dataran rendah yang sangat luas dan akhirnya bermuara ke Laut Jawa di Pantai Utara. Dari sejumlah sungai-sungai itu, Sungai Brantas yang panjangnya 290 km, adalah merupakan salah satu sungai yang terpanjang alirannya di Jawa Timur.

Sungai-sungai tersebut, sangat penting artinya untuk keperluan pertanian. Sedangkan untuk kepentingan pelayaran masih kurang bisa dimanfaatkan, karena sungai-sungai tersebut sebagian besar sangat tergantung kepada musim. Pada musim penghujan air sungai meluap, sedangkan pada musim kemarau air sungai sangat kecil.

Selain sungai-sungai, di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur juga terdapat danau-danau, baik alam maupun buatan. Danau alam di Jawa Timur yang penting adalah Danau Sarangan di lereng bagian timur Gunung Lawu. Danau ini merupakan tempat wisata yang indah. Danau-danau alam yang lain adalah Danau Kelut di Puncak Gunung Kelut, danau vulkanis di sekitar gunung api Lamongan dan Ijen. Sedangkan danau buatan di Jawa Timur adalah merupakan danau-danau bendungan sungai yang dibuat dengan tujuan serbaguna,

seperti irigasi, pengendalian banjir, pembangkit tenaga listrik, pemeliharaan ikan, pariwisata, dan lain-lain. Danau-danau buatan yang penting adalah danau-danau bendungan Karangates, Lahor, Selorojo, Wlingi Raya, Widas dan lain-lainnya.

Keadaan tanah di Provinsi Jawa Timur, ada beberapa jenis. Secara garis besar macam-macam jenis tanah itu sebagai berikut. Tanah *alluvial* dan *organosol* luasnya 35,59% dari luar Jawa Timur. Tanah *mediteran* 19,08%, tanah latosol 14,68%, tanah regosol 13,43%, tanah grunosol 8,51% dan tanah *andosol* 8,61%.

Luas hutan di Jawa Timur 1.361.623,7 ha atau 28,4% dari luas wilayah seluruh Jawa Timur. Berdasarkan fungsinya, hutan seluas itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu: hutan pelindung 519.258,8 ha, dan hutan produksi 842.374,9 ha. Hutan produksi Jawa Timur terdiri dari hutan jati seluas 561.327 ha, sedangkan sisanya berupa hutan rimba. Jenis-jenis kayu yang lain adalah: sonokeling, ramin, mindi, aghatis, trembesi, pakis, eboni, kruing, dolog bayam, mangrove, dan lain-lainnya. Di samping itu, di Jawa Timur juga terdapat hutan suaka alam dan margasatwa seluas 249.877 ha atau 18,3% dari luas hutan seluruhnya.

2.1.3 Kependudukan

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang luas 47.922,0175 km, pada tahun 1975 berpenduduk 27.742.262 jiwa. Dengan data ini maka kepadatan penduduk tiap-tiap km² 570 jiwa. Seluruh jumlah penduduk tersebut tersebar pada seluruh daerah Tingkat II di Jawa Timur yang meliputi 8 kotamadya dan 219 kabupaten. (lihat tabel 6)

Tabel 6
Jumlah Penyebaran dan Kepadatan Penduduk
di Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1975

Kotamadya/ Kabupaten	Luas (km ²)	Jml. Penduduk (jiwa)	Kepadatan Pen- duduk (km ²)
1	2	3	4
<u>Kotamadya</u>			
1. Surabaya	274,06	1.691.326	6.171
2. Mojokerto	7,25	65.222	8.996
3. Madiun	30,00	147.963	4.932
4. Blitar	16,30	73.745	4.524
5. Malang	69,03	459.093	6.651
6. Kediri	63,40	194.390	3.066
7. Pasuruan	13,58	73.745	6.023
8. Probolinggo	25,24	89.125	3.531
<u>Kabupaten</u>			
9. Gresik	1.137,05	663.965	584
10. Sidoarjo	591,59	725.585	1.226
11. Mojokerto	835,93	647.929	775
12. Jombang	1.159,50	883.003	762
13. Bojonegoro	2.384,02	937.281	393
14. Tuban	1.904,70	813.636	427
15. Lamongan	1.812,82	987.938	545
16. Madiun	1.033,82	634.615	614
17. Ngawi	1.145,70	754.320	606
18. Magetan	672,70	605.433	900
19. Ponorogo	1.311,09	802.875	612
20. Pacitan	1.310,50	517.926	395
21. Kediri	963,21	1.174.491	1.219
22. Nganjuk	1.182,64	841.819	712
23. Blitar	1.667,93	1.033.324	620
24. Tulungagung	1.055,00	825.801	783
25. Trenggalek	1.205,22	566.522	470
26. Malang	4.778,37	1.920.425	402
27. Pasuruan	1.315,20	948.544	721
28. Probolinggo	1.428,93	822.023	575
29. Lumajang	1.790,90	854.903	477
30. Bondowoso	1.560,10	605.332	386
31. Panarukan	1.457,67	510.910	350
32. Jember	2.948,87	1.854.365	629
33. Banyuwangi	5.782,50	1.417.577	245
34. Pamekasan	732,85	494.886	675
35. Sampang	1.152,04	582.102	505
36. Sumenep	1.857,59	828.806	446
37. Bangkalan	1.144,76	886.260	600
Jawa Timur	47.922,60	27.742.262	579

Sumber : Direktorat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel 6 dapat dikemukakan bahwa ternyata kepadatan penduduk di seluruh daerah tingkat II di Jawa Timur tidak sama. Kepadatan penduduk tertinggi adalah di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yaitu 8.996 jiwa tiap km². Sedangkan daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dengan kepadatan penduduk 245 jiwa tiap km².

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang komposisi penduduk di Jawa Timur menurut golongan umur dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Komposisi Penduduk Jawa Timur Menurut Umur dan
Jenis Kelamin Tahun 1971

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	% terhadap Jml.	Jml. laki2 tiap 1000 Perempuan
0 - 4	1.873.492	1.863.086	3.736.578	14,648	1.006
5 - 9	1.961.051	1.912.548	3.873.459	15,186	1.025
10 - 14	1.509.534	1.380.673	2.890.207	11,330	1.093
15 - 19	1.129.167	1.135.409	2.264.576	8,878	995
20 - 24	703.724	892.983	1.596.707	6,260	788
25 - 29	842.496	1.134.306	1.976.897	7,750	743
30 - 34	802.496	1.031.589	1.834.085	7,190	778
35 - 39	971.300	1.004.466	1.498.511	7,746	967
40 - 44	745.849	752.662	1.168.368	5,875	991
45 - 49	609.476	558.892	1.168.368	4,580	1.091
50 - 54	437.583	488.019	955.602	3,629	897
55 - 59	273.850	290.607	564.457	2,213	942
60 - 64	243.193	323.951	567.144	2,223	751
65 - 69	115.150	145.179	260.329	1,877	793
70 - 74	100.295	123.465	223.760	0,877	812
75 +	62.583	89.218	151.801	0,595	70
Jml	12.381.334	13.127.053	25.508.387	100.000	945

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka Kantor Statistik dan Pemerintahan
Jawa Timur

Dari tabel 7 dapat dikemukakan bahwa penduduk yang berumur 0-14 tahun berjumlah 10.500.334 jiwa atau 41,164%, yang berumur antara 15--59 tahun berjumlah 13.834.969 jiwa atau 54,121% dan yang berumur 60 tahun ke atas 1.203.034 jiwa atau 4,716%. Dari angka-angka di atas ternyata bahwa golongan umur produktif (15--59 tahun) lebih besar jumlahnya daripada golongan umur yang tidak produktif (0--14 tahun dan 60 tahun ke atas). Ditinjau dari angkatan kerja, itu sangat menguntungkan, karena yang ditanggung lebih kecil jumlahnya dari yang menanggung.

Hingga akhir Pelita empat 1989 jumlah penduduk tiap kabupaten di Jawa Timur menunjukkan perkembangan. Hal ini dapat dilihat apda tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Jumlah Penduduk Akhir Tahun Jawa Timur 1985--1989

KABUPATEN	1985	1986	1987	1988	1989
Pacitan	499975	505369	507525	509482	511788
Ponorogo	818181	827203	833347	838119	844490
Trenggalek	596842	605135	610549	614651	620125
Tulungagung	867263	877141	881223	886103	892602
Blitar	1026326	1027162	1035388	1038931	1043661
Kediri	1252539	1284170	1293215	1270816	1281111
Malang	2115194	2145369	2164528	2114499	2128983
Lumajang	871837	886652	887251	888542	889513
Jember	1886296	1913156	1909020	1912777	1914326
Banyuwangi	1367682	1366527	1367527	1370824	1370401
Bondowoso	620236	630504	630298	631377	631519
Situbondo	524556	523570	536278	538658	540305
Probolinggo	833423	844325	850992	854953	869745
Pasuruan	1032232	1055876	1067220	1075758	1084356
Sidoarjo	905177	935225	955609	671849	993724
Mojokerto	738253	752785	759695	766698	774372
Jombang	975828	994027	1002974	1009832	1019489
Nganjuk	902163	929079	932019	934730	938302
Madiun	631237	634300	636280	638762	640054
Magetan	645885	649433	652704	654291	657434
Ngawi	798302	799843	803847	80649	810531
Bojonegoro	1038512	1069392	1078484	1084756	1090298
Tuban	905415	936092	91234	945990	952034
Lamongan	1088844	1110461	1118693	1124180	1130268
Gresik	775717	796186	805730	814348	821677
Bangkalan	695667	708784	712781	714792	714486
Sampang	612324	613921	615633	618390	619949
Pamekasan	552694	584243	586109	596176	599647
Sumenep	881018	897680	901430	904813	905422
KOTAMADYA					
Kediri	230041	232455	233834	232458	229514
Blitar	111186	112833	113937	116165	115985
Malang	111186	544319	548193	625851	638873
Probolinggo	151065	157027	157159	157905	159034
Pasuruan	133295	137976	138492	138492	139868
Mojokerto	90815	93559	94587	95583	97011
Madiun	178298	180197	181367	183367	183831
Surabaya	2096605	2126605	2159170	2173840	2189836
TOTAL/JATIM	29993177	30497581	30704628	30853999	31044550

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka 1989. Kantor Statistik dan Pemerintah Jawa Timur

Dari segi mata pencaharian penduduk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dapat dikemukakan sebagai berikut: Berdasarkan data tahun 1994, jumlah angkatan kerja yang ada di Jawa Timur 10.405.386 orang. Dari jumlah angkatan kerja ini yang telah bekerja atau telah mendapatkan pekerjaan sebanyak 10.185.520 orang atau 97,887% terhadap seluruh jumlah angkatan kerja. Sedangkan yang belum mendapatkan pekerjaan ada 219.866 orang atau 2,113%.

Dari data yang termuat di dalam tabel 9 dapat diketahui bahwa jumlah yang terbesar angkatan kerja menurut lapangan pekerjaan di Jawa Timur adalah pertanian/perkebunan yang jumlahnya 6.943.495 orang atau 66,67%. Sesudah itu, lapangan pekerjaan perdagangan/rumah makan/hotel termasuk yang nomor dua, jumlahnya 1.163.175 orang atau 11,17%. Berikutnya adalah angkatan kerja dalam lapangan industri pengolahan jumlahnya 572.707 orang atau 5,55%. Sedangkan angkatan kerja dari lain-lain lapangan jumlahnya dibawah 4% dari seluruh angkatan kerja (lihat tabel 9)

Tabel 9
Angkatan Kerja di Jawa Timur
Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 1974

No.	Lapangan Pekerjaan	Jumlah	%
1.	Pertanian/Perkebunan	6.943.495	66,67
2.	Pertambangan atau penggalian	5.075	0,005
3.	Industri pengolahan	577.707	5,55
4.	Listrik/gas/air minum	7.092	0,06
5.	Bangunan	121.214	1,16
6.	Perdagangan/rumah makan/hotel	1.163.175	11,17
7.	Angkatan dan Komunikasi	200.311	1,93
8.	Keuangan/asuransi dll.	13.342	0,12
9.	Jasa dll.	988.869	9,59
10.	Kegiatan lain.	385.106	3,70%

Sumber : Jawa Timur dalam Angka 1989, Kantor Statistik dan Pemerintah Jawa Timur

Hingga tahun 1989 dilihat dari jumlah pencari kerja, penempatan dan permintaan menurut jenis kelamin maka dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Jumlah pencari kerja, penempatan dan permintaan
menurut jenis kelamin 1988--1989

URAIAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Pencari kerja	289359	322079	150226	175696	439585	497775
Penempatan	11202	10096	10705	10991	21907	21087
Penghapusan Pencari- Kerja	83626	100073	47301	58306	130927	158379
Belum ditempatkan	194531	211910	92220	106399	286751	318309
Permintaan Lowongan	27042	30703	15887	17147	42929	47850
Dipenuhi	11202	10096	10705	10991	21907	21087
Penghapusan Lowongan	10235	9168	3725	3204	13960	12372
Sisa Lowongan	5605	11439	1457	2952	7062	14391

Sumber : Jawa Timur dalam angka 1989, Kantor Statistik dan Pemerintah Jawa Timur

2.2 Perkembangan Administrasi Pemerintah

Berdasarkan sejarah perkembangannya, kegiatan administrasi Pemerintahan Daerah di Jawa Timur, baru dimulai pada awal abad XX, yaitu pada masa penjajahan Belanda. Ini berarti bahwa sebelum masa itu, Jawa Timur belum merupakan kesatuan wilayah yang memiliki administrasi Pemerintahan Daerah sendiri, yang luas wilayahnya sebagaimana sekarang. Meskipun demikian, di dalam catatan Sejarah Indonesia, sebelum kedatangan orang-orang Eropa/Belanda, wilayah Jawa Timur pernah menjadi pusat kerajaan-kerajaan, seperti Kerajaan Icana, Darmawangsa, Airlangga, Kediri, Singosari dan Majapahit.²

Sesudah Majapahit jatuh, sebagian wilayah Jawa Timur berturut-turut menjadi bagian wilayah Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram. Selanjutnya ketika orang-orang Eropa/Belanda mulai menanamkan kekuasaannya di wilayah Indonesia, secara berangsur-angsur sebagian wilayah Jawa Timur jatuh dan dikuasai oleh Belanda.

Pada waktu itu, setelah wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia menjadi semakin luas, dan di daerah-daerah sering timbul perlawanan dari rakyat, Pemerintah Hindia Belanda sudah menganggap perlu adalah desentralisasi dalam sistem pemerintah. Oleh karena itu lahirlah U.U. Desentralisasi (*Decentralisatie wet*) tahun 1903 s. 329.

Secara garis besar butir-butir U.U. Desentralisasi itu berisi: Kesatuan hukum teritorial yang baru dapat dibentuk, di samping wilayah Hindia Belanda dan Desa sebagai kesatuan hukum. Kesatuan hukum baru ini dinamakan resor dewan lokal (*resortenvan locale raden*) atau swapraja lokal (*locale zelfbesturen*) atau "*local self government*" (sekarang disebut daerah otonom). Batas resor dewan lokal dimaksud sama dengan batas wilayah yang bersangkutan, yaitu ruang lingkup lingkungan kerja.

Untuk melengkapi U.U. Desentralisasi, pada tahun 1922 lahir lagi sebuah U.U. yang dinamakan Undang-Undang Pembentukan kembali Pemerintah. Dalam hubungan ini, Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta dua *Gubernemen* yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Selanjutnya secara struktural wilayah provinsi ini berturut-turut dibagi lagi dalam wilayah *afdeling* (Karesidenan); Kabupaten/Kotamadya; Kawedanan; Kecamatan; dan Desa.³

Bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini termasuk bangsa Indonesia yang berada di Jawa Timur, azas desentralisasi itu tidak memuaskan, karena masih dalam kerangka sistem pemerintahan kolonial. Konstelasi politik pada waktu itu, telah menciptakan struktur masyarakat yang dapat dibedakan

menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok kulit putih/ Belanda/Eropa, sebagai lapisan paling atas dan sekaligus penguasa yang memerintah kelompok yang lain. Kedua, kelompok Timur Asing yang sebagian terbesar terdiri dari orang-orang Tionghoa. Ketiga, kelompok pribumi walaupun jumlahnya paling banyak, tetapi mereka menjadi lapisan paling bawah di negerinya sendiri.⁴

Akibat pengelompokan berdasarkan ras seperti itu, dalam berbagai bidang kehidupan pada umumnya dibagi atas dasar perbedaan ras pula. Golongan Belanda karena memegang kekuasaan memiliki kesempatan lebih baik dan lebih luas daripada golongan pribumi untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam birokrasi pemerintahan dan juga untuk menguasai sumber-sumber ekonomi yang ada. Jabatan-jabatan seperti Gubernur, Residen, Asisten Residen, Kontrolir Adspiran, hanya boleh dijabat oleh orang-orang Belanda. Sedangkan orang-orang pribumi hanya boleh menduduki jabatan Kepala Desa, Camat, Wedono, dan Bupati, di bawah pengawasan orang-orang Belanda⁵ yang di dalam prakteknya selalu dieksploitir untuk memenuhi kepentingan kaum penjajah.

Menanggapi kenyataan-kenyataan yang demikian itu, di Jawa Timur timbul perlawanan-perlawanan rakyat menentang pemerintah kolonial Belanda. Di antara perlawanan-perlawanan itu misalnya rakyat desa di daerah Sidoarjo pada tahun 1903 yang dipimpin oleh Kyai Kasan Mukmin; perlawanan rakyat desa bendungan Berbek (sekarang termasuk Kabupaten Nganjuk) pada tahun 1907 yang dipimpin oleh K.H. Daramadjaja.⁶

Sementara itu golongan terpelajar yang merasa tidak puas terhadap sistem pemerintah kolonial Belanda, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dengan cara modern yaitu mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional, baik organisasi yang berstatus cabang dari daerah lain, maupun yang berstatus pusat. Beberapa tokoh pergerakan nasional itu antara lain ialah Umar Said Tjokroaminoto (SI), R.P. Singgih (Studie Club Indonesia), Dr. Sutomo, dan lain-lainnya.

Dalam kondisi demikian, datanglah tentara Jepang dengan maksud menguasai Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat, tentara Jepang menggantikan kekuasaan Belanda di Indonesia, setelah Belanda dengan resmi menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942.

Setelah tentara Jepang mulai berkuasa di Indonesia, maka mereka mengeluarkan U.U. No. 1 tahun 1942 yang menentukan bahwa: Untuk sementara waktu Jepang melaksanakan pemerintahan militer dengan susunan sebagai berikut. Gunseirikan (tahun 1943 diganti *Saikosikikan*) yaitu Panglima Besar Tentara Jepang sebagai pucuk pimpinan. Sedangkan pemerintahan sehari-hari dikerjakan oleh pembantunya yaitu *Gunseikan* (Pembesar Pemerintahan Balatentara). Untuk memulihkan ketertiban dan keamanan dibentuklah kordinator pemerintahan militer daerah yang disebut *Gunseibu* (Pemerintah Propinsi dan Gubernemen). Di Jawa, selain dua kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, terbentuk tiga *Gunseibu*, yaitu Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung, Jawa Tengah di Semarang dan Jawa Timur di Surabaya.

Pada 5 Agustus 1942 keluar U.U. No. 27 dan No. 28 yang mengakhiri pemerintah militer sementara. Kedua U.U. ini berlaku mulai 8 Agustus 1942 dan mengatur tata pemerintahan daerah. Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali dua kerajaan yaitu: Surakarta dan Yogyakarta, berdasarkan U.U. itu dibagi atas: Syu/Karesidenan dipimpin oleh *Syuucokan/Residen: Ken* dan *Syi/Kabupaten dan Kotamadya* dipimpin oleh *Ken-Co* dan *Syi-Co/Wedono*; Son/Kecamatan dipimpin oleh *Son-Co/Camat*; dan Ku/Desa dipimpin oleh *Ku-Co/Kepala Desa*.⁷ Dengan demikian pembagian daerah pemerintahan propinsi dihapuskan.

Berdasarkan kedua U.U. tersebut, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Syu atau Karesidenan. Jumlah Karesidenan di Pulau Jawa ada 17, sedangkan di wilayah ex Propinsi Jawa Timur ada 7 yaitu Karesidenan: Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki dan Madura.⁸

Berbeda dengan masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Jepang, situasinya adalah situasi perang. Karena itu, untuk kepentingan perangnya melawan sekutu, pemerintah Jepang menjalin kerjasama dengan bangsa Indonesia. Para tokoh nasionalis dan para tokoh Islam diberi kesempatan untuk menduduki berbagai jenis jabatan di dalam birokrasi pemerintahan. Pada akhir tahun 1943, kesempatan itu telah meningkat ke tingkat residen dan orang kedua diberbagai departemen.⁹ Bahkan pada 28 Mei 1945, yaitu menjelang kekalahan Jepang dalam perang melawan Sekutu, bangsa Indonesia telah berhasil membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Kemudian Badan ini pada 7 Agustus 1945 menjelma menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI.

Di Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Jepang juga memberikan jabatan residen kepada putra Indonesia yaitu RMTA Suryo dan ditugaskan di Karesidenan Bojonegoro. Sedangkan untuk golongan pemuda, pada waktu itu juga mendapat kesempatan, khususnya untuk memasuki berbagai jenis kesatuan militer dan semi militer seperti *Seinendan*, *Keibodan*, *heiho*, Tentara Peta, Barisan Hisbullah, dan lain-lainnya.¹⁰

Kebijaksanaan Pemerintah Jepang yang demikian itu tentu saja sangat menguntungkan perjuangan para pemimpin bangsa Indonesia. Karena itu, kesempatan ini dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya untuk menyebarkan ide nasionalisme dan ide anti imperialisme Eropa, sehingga ide tersebut dapat meluas mencapai segenap lapisan masyarakat.¹¹ Pertumbuhan ide nasionalisme dan ide anti imperialisme Eropa ini, kemudian diikuti pula oleh perasaan anti Jepang di kalangan masyarakat Jawa Timur. Berkembangnya perasaan anti Jepang ini karena politik Jepang ternyata menimbulkan penderitaan lahiriah dan batiniah penduduk di daerah Jawa Timur.

Penderitaan lahiriah itu timbul karena adanya paksaan melakukan *romusha*, dan adanya eksploitasi ekonomi secara

besar-besaran. Timbulnya penderitaan batiniah karena adanya tekanan-tekanan dan juga penangkapan bagi tokoh-tokoh perjuangan yang dicurigai. Tokoh-tokoh perjuangan seperti: Dul Arnowo, Ir Darmawan, ditangkap dan dimasukkan penjara. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya seperti: Pamudji, Abdul Aziz, Abdul Rochim, disiksa hingga meninggal dunia.¹² Penderitaan lahir batin rakyat Jawa Timur inilah yang juga menjadi salah satu sebab timbulnya perlawanan yang terkenal dengan sebutan Pemberontakan Peta di Blitar.

Berdasarkan uraian di atas, pada saat Perang Pasific berakhir, keadaan daerah Jawa Timur benar-benar sudah matang untuk mengadakan revolusi. Bahkan sebelum perang Pasific berakhir, pada 1 Juli 1945, para pemuda pelajar yang berkumpul di Gedung Radio, Jalan Simpang 35, telah berani mengajukan tuntutan Kemerdekaan Indonesia kepada Pemerintah Jepang.¹³ Oleh karena itu, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, disambut oleh warga masyarakat Jawa Timur dengan penuh kegembiraan dan penuh semangat kebangsaan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menjadi suatu bangsa yang merdeka. Sebagai bangsa yang baru terlepas dari penjajahan bangsa asing, tentu saja mempunyai tugas yang sangat berat yaitu mewujudkan kemerdekaan dan menyusun pemerintahan yang berdaulat. Di Propinsi Jawa Timur tugas tersebut dilaksanakan secara bertahap.

Tahap pertama ialah dilaksanakan “Aksi pengibaran Bendera Merah Putih”, yang pada awalnya di Surabaya, dan selanjutnya di berbagai tempat di Jawa Timur.

Tahap kedua, adalah pembentukan pemerintah daerah. Dalam hubungan ini, pada 28 Agustus 1945, dibentuk suatu badan yang bertindak sebagai badan perwakilan rakyat yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Surabaya. Selanjutnya pada 3 September 1945 Residen Sudirman mengumumkan berdirinya Pemerintah RI Daerah Surabaya

yang terlepas dari kekuasaan tentara Jepang.¹⁴ Kemudian pada 12 Oktober 1945, RMTA Suryo datang ke Surabaya untuk memangku jabatan sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian dimulailah pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Timur.

Tahap ketiga, pembentukan badan pembela negara. Berkaitan dengan ini, pada 4 September 1945 dibentuk Badan Keamanan Rakyat yang sudah disusun menjadi tiga tingkat yaitu tingkat Kotamadya Surabaya; tingkat Karesidenan Surabaya; dan tingkat Propinsi Jawa Timur.¹⁵ Pada perkembangan selanjutnya, BKR ini berturut-turut berubah menjadi TKR, TRI dan kemudian TNI. Selain BKR, di Jawa Timur juga dibentuk lasykar-lasykar perjuangan yang lain seperti Hizbullah, PRI, BPRI, dan lain-lainnya.

Untuk mewujudkan kemerdekaan dan pemerintahan yang berdaulat di Propinsi Jawa Timur ini, ternyata tidak selalu berjalan lancar. Dalam pelaksanaannya sering timbul perselisihan dan bahkan pertempuran, baik dengan pihak Jepang maupun dengan pihak Belanda.

Perselisihan dengan tentara Jepang terjadi karena pada mulanya tentara Jepang tidak mau menyerahkan kekuasaan dan senjatanya kepada bangsa Indonesia. Sikap Jepang ini tentunya dapat dipahami, karena sebagai pihak yang kalah dalam perang melawan Sekutu, sejak 16 Agustus 1945, tentara Jepang telah mendapat instruksi untuk tetap mempertahankan *status quo* sampai tentara Sekutu datang mengambil alih kekuasaan.¹⁶ Akan tetapi setelah tentara Jepang mengalami kesulitan terhadap gerakan dan perlawanan rakyat di Jawa Timur, akhirnya tentara Jepang menyerahkan senjata, gedung dan perlengkapan kantor lainnya kepada para pemimpin bangsa Indonesia di Jawa Timur.

Terjadinya perselisihan dan pertempuran antara rakyat Jawa Timur dengan orang-orang Belanda, karena orang-orang Belanda berusaha menegakkan kembali kekuasaan kolonialnya di Provinsi Jawa Timur. Ini berarti Belanda telah melanggar

hak kedaulatan Negara Republik Indonesia yang telah merdeka. Perselisihan dan pertempuran dengan orang-orang Belanda ini, berlangsung cukup lama, dan dalam uraian di sini akan dibagi menjadi tiga periode.

Pertama, periode awal yaitu sejak peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato sampai dengan persetujuan Linggarjati. Pada periode ini, tentara Belanda dibantu oleh tentara Inggris (Sekutu) yang mulai datang ke Surabaya pada akhir Oktober 1945 dan meninggalkan Surabaya pada Mei 1946. Jumlah kekuatan tentara Inggris ini 1 divisi ditambah 1 brigade. Meskipun demikian, para pemimpin dan rakyat Jawa Timur tetap mengadakan perlawanan dengan gigih, sehingga meletuslah pertempuran di Surabaya yang melahirkan Hari Pahlawan.

Dalam pertempuran di Surabaya itu, meskipun secara fisik bangsa Indonesia kalah dan kota Surabaya dapat diduduki musuh, namun semangat perjuangan membela Kemerdekaan Indonesia makin lama semakin berkobar dan meluas. Karena itu, untuk melanjutkan perlawanan, sesudah 17 November 1945, markas perjuangan dan kedudukan pemerintah daerah dipindahkan ke luar kota.

Untuk kedudukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, semula dipindahkan ke Kota Kediri, namun pada Februari 1947 kedudukannya dipindahkan lagi ke Malang. Perlu dikemukakan disini, bahwa pada Juni 1947 di Jawa Timur terjadi mutasi pimpinan pemerintahan. Gubernur RMTA Suryo oleh Pemerintah Pusat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung di Yogyakarta, dan sebagai penggantinya ditetapkan dr. Moerdjani.¹⁷

Kedua, periode setelah Perjanjian Linggarjati sampai dengan Perjanjian Renville. Pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan Agresi Militer I. Ini berarti bahwa Belanda telah melanggar Perjanjian Linggarjati. Dalam pertempuran ini Belanda menggerakkan angkatan laut, darat, dan udaranya, sehingga berhasil menduduki kota-kota penting (kota-kota

pantai dan daerah-daerah surplus) di daerah Karesidenan Surabaya, Malang, Besuki, dan Madura. Akibatnya Pusat Kedudukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dipindahkan ke kota Blitar.¹⁸ Agresi Militer Belanda I diakhiri dengan adanya perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948.

Ketiga, periode setelah Perjanjian Renville sampai dengan pengakuan kedaulatan RI. Setelah Perjanjian Renville ditandatangani, Wilayah Propinsi Daerah (RI) propinsi Jawa Timur menjadi semakin sempit, dan hanya meliputi Karesidenan Madiun, Kediri, Bojonegoro, sebagian Karesidenan Surabaya dan Malang. Sedangkan daerah-daerah lain berada dalam kekuasaan Belanda. Dalam kaitan ini, untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, Belanda pada 20 Februari 1948 menetapkan berdirinya Negara Madura dengan Wali Negara RAA. Tjakraningrat,¹⁹ dan pada 16 November 1948 menetapkan berdirinya Negara Jawa Timur dengan Wali Negara RTP Achmad Kusuma Negara.²⁰ Pembentukan Negara Madura dan Negara Jawa Timur ini, tentu saja rekayasa Belanda dalam kerangka untuk memperkuat usahanya dalam pembentukan Negara Indonesia Serikat.

Selain permasalahan tersebut di atas, pada periode ini di dalam tubuh Pemerintahan RI sendiri juga terjadi ketegangan politik dan militer yang mencapai puncaknya pada Peristiwa Madiun, yaitu penghianatan/pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso-Amir Syarifuddin di Madiun pada 18 September 1948. Untuk mengatasi pemberontakan ini, pada 19 September 1948, pemerintah mengangkat Kolonel Soenggono sebagai Komandan Tentara serta Gubernur Militer untuk Jawa Timur. Tidak lama kemudian, yaitu 1 Oktober 1948, pertahanan kaum pemberontak PKI di Madiun sudah dapat dipatahkan oleh pasukan RI.

Selanjutnya, dalam kondisi yang demikian, pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II. Di Jawa Timur, dalam Agresi Militer II ini, Belanda tidak hanya menghadapi pasukan TNI dan badan kelasykaran saja, tetapi juga menghadapi perlawanan rakyat yang rela berkorban untuk

kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, di antara peristiwa-peristiwa yang menonjol ialah, penyerbuan di kota Jombang (21--1--1949). Pertempuran Palagan Melanda di Kasembon, Malang, pertempuran di Desa Temayang Bojonegoro, dan lain-lain.

Agresi Militer Belanda II ini juga membawa akibat bagi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur. Setelah 21 Desember 1948, kota Blitar diserbu Belanda, akibatnya kedudukan Pemerintah Daerah provinsi Jawa Timur dipindahkan ke Gunung Wilis. Pada 24 Februari 1949 Gubernur Jawa Timur Dr. Moerdjani dengan beberapa stafnya ditangkap Belanda, karena itu untuk sementara Beliau memerintahkan kepada Residen Surabaya, Sudirman, untuk mewakili Jabatan Gubernur Jawa Timur. Namun tidak lama kemudian, Residen Sudirman meninggal dunia, maka roda Pemerintah Daerah (RI) Propinsi Jawa Timur dilanjutkan oleh Wakil Gubernur Samadikun, yang sejak kota Blitar diduduki Belanda, telah mendapat tugas dari Gubernur Militer Soengkono, untuk meneruskan perjuangan di daerah Blitar Selatan bersama-sama dengan Bupati Blitar Darmadi.²¹

Sementara itu, perjuangan para pemimpin pemerintahan di tingkat pusat, telah mencapai hasil yang menggembirakan, yaitu disetujuinya "Piagam Penyerahan Kedaulatan (istilah KMB Versi Indonesia Pengakuan/Pemulihan Kedaulatan) dari Kerajaan Belanda kepada RIS", yang harus dilaksanakan sebelum 1 Januari 1950.²² Peristiwa ini telah membawa perubahan di daerah Jawa Timur. Maka berlangsunglah pengembalian daerah Madiun (15-11-1949), daerah Bojonegoro (18-12-1949) kepada Pemerintah Karesidenan (RI) oleh pihak Belanda, yang disusul dengan penarikan tentara Belanda dari Kediri. Selanjutnya pada 24 Desember 1948, Gubernur Samadikun dan Gubernur Militer Soengkono kembali ke Surabaya.

Setelah diakuinya kedaulatan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), secara formal di wilayah daerah Jawa Timur dan Madura terdapat dua negara bagian yaitu, Negara Jawa Timur

dan Negara Madura. Namun kedua negara bagian ini tidak berusia lama. Adapun sebabnya ialah pembentukan Negara Jawa Timur dan Negara Madura pada dasarnya bukan kehendak rakyat setempat, tetapi rekayasa orang-orang Belanda yang ingin menanamkan kembali kekuasaan kolonialnya di wilayah Indonesia.

Akibat dari kenyataan seperti itu, timbullah pergolakan rakyat di wilayah Negara Jawa Timur dan Negara Madura, yang makin lama menjadi semakin panas. Mereka dengan tegas menuntut agar kedua negara tersebut segera dibubarkan dan kemudian digabungkan kembali dengan Negara RI. Hasilnya adalah pada 25 Februari 1950 dalam resolusi bersama yang diambil dalam konperensi antar DPR Jawa Timur dan Pemerintah Negara Jawa Timur di ruang Kantor Gubernur, dengan resmi dinyatakan bahwa daerah Negara Jawa Timur menjadi daerah Negara Republik Indonesia.²³ Berikutnya pada 7 Maret 1950, Gubernur RI Jawa Timur dengan Surat Ketetapan No. 24/A/50 mengangkat R. Soenarto Hadiwidjojo menjadi Residen (RI) di Madura. Kemudian pada 9 Maret 1950 Presiden RIS dengan Surat Keputusan No. 110 menetapkan daerah Madura sebagai Karesidenan dari RI.²⁴

Gerakan rakyat yang menuntut dibubarkannya negara bagian itu, ternyata tidak hanya terjadi di Jawa Timur saja, tetapi juga terjadi di negara-negara bagian yang lain. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah RIS dan RI, mengadakan panitia bersama untuk membentuk Negara RI Kesatuan. Hasilnya pada 17 Agustus 1950, dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk negara kesatuan baru yaitu Republik Indonesia.²⁵

Sementara itu, setelah Negara Jawa Timur dan Negara Madura bubar dan masuk kembali ke dalam Negara Bagian RI, pada Maret 1950, keluarlah UU No. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur. Pada waktu itu Propinsi Jawa Timur terdiri atas 7 Karesidenan (Surabaya, Malang, Besuki, Kediri, Madiun, Bojnegoro, dan Madura), 29 Kabupaten, 8 Kotapraja, 138 Kawedanan, 514 Kecamatan, 8.306 Kelurahan.²⁶ Gubernur Jawa Timur saat itu adalah Gubernur Samadikun.

Selanjutnya sejalan dengan perkembangan keadaan, para Pemuda Indonesia mengadakan Kongres IV di Surabaya dari 8--14 Juni 1950. Salah satu hasil kongres itu ialah tuntutan dihapuskannya pemerintahan militer. Tuntutan ini di Jawa Timur dapat dipenuhi. Berdasarkan perintah KSAD pada 30-6-1950 No. 338/KSAD/IH.50 dan Instruksi tanggal 24-7-1950 No. 48/KSAD/Intr.50,serta Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 1-8-1950, maka di Jawa Timur tanggal 7 September 1950 diadakan timbang terima penyelenggaraan pemerintahan dan keamanan dari pihak militer kepada pihak sipil.

Setelah selama kurang lebih 6 tahun Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur mengadakan konsolidasi, maka pada 18 Januari 1957, berlaku UU No. 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dalam hubungan ini secara teknis untuk menyebutkan pemerintahan daerah (otonom) dipergunakan istilah Daerah Swatantra Tingkat I, II, dan III. Sementara itu, Pemerintah Umum Pusat yang dijalankan oleh Pemerintahan Pamong Praja sebagai Pemerintahan Administratif Pusat di daerah, masih tetap berjalan. Dengan demikian di Jawa Timur terjadi dualisme pemerintahan daerah.²⁷

Untuk menghilangkan dualisme pimpinan di daerah dan untuk memberikan otonomi yang seluas-luasnya, maka pada 25 Maret 1959 dikeluarkan UU.No. 6 Tahun 1959 tentang penyerahan Pemerintah Umum Pusat kepada Daerah. Namun sebelum UU ini dapat dilaksanakan, pada 5 Juli 1959 terjadi pergantian ketatanegaraan yaitu Dekrit Presiden yang antara lain mengatakan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Oleh karena itu, untuk mengatasi dualisme pimpinan di daerah, berturut-turut diundangkan berlakunya Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, dan No. 5 Tahun 1960 tentang DPRGR dan Sekretariat Daerah.

Berdasarkan Penetapan Presiden tersebut, istilah teknis penyebutan Pemerintah Daerah Tingkat I dan II. Adapun gelar Kepala Daerah Tingkat I menjadi Gubernur/Kepala Daerah; Kepala Daerah Tingkat II menjadi Bupati atau Walikota/Kepala

Daerah. Sejalan dengan perubahan gelar ini, maka yang ada hanya satu Kepala Daerah yang mengemban dua bidang tugas sekaligus yaitu alat Pemerintah Daerah dan juga alat Pemerintah Pusat.²⁸ Sedangkan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah dibantu oleh sebuah Badan Pemerintah Harian (BPH). Untuk Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur, pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur/Kepala Daerah R. Soewondo Ranuwidjojo (1959-1963).

Guna melengkapi peraturan-peraturan terdahulu, pada 25 September 1963 berlaku PP. No. 50 Tahun 1963 tentang Pernyataan Mulai Berlakunya dan Pelaksanaan UU Penyerahan Pemerintahan Umum. Selain itu pada 25 Oktober 1963 berlaku Peraturan Presiden No. 22 Tahun 1963 yang menghapuskan Karesidenan dan Kawedanan, serta menimbulkan Jabatan pembantu Gubernur sebagai pengganti Residen, dan pembantu Bupati sebagai pengganti Wedono. Di Daerah Jawa Timur upacara peresmian dan serah terima urusan pemerintahan umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur dilakukan pada 25 Februari 1964 di Surabaya oleh Mendagri Ipik Gandamana kepada Gubernur/Kepala Daerah Kolonel Mohammad Wijono (1963-1967).²⁹

Selanjutnya untuk pengaturan operasionalnya, pada 1 September 1965 berlaku UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Akan tetapi sebelum Pemerintah Daerah propinsi Jawa Timur sempat melaksanakan UU ini, timbullah tragedi nasional yaitu pemberontakan G 30 S/PKI pada 30 September 1965. Akibatnya, perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jawa Timur terfokus untuk menghadapi pemberontakan G 30 S/PKI.

Catatan

1. Team Penulisan Naskah Pengembangan Media Kebudayaan Jawa Timur, *Monografi Daerah Jawa Timur*, (Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Depdikbud, 1977) hlm.
2. Drs. Abdurrachman, *Pengantar Sejarah Jawa Timur*, (Surabaya: 1976)
3. Bayu Surianingrat, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Dewaruci Press, 1981) hlm.
4. Yusmar Basri (ed), *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977) hlm. 155-156.
5. Bayu Surianigrat, *op.cit.*
6. Sartono Kartodirdjo, *Protest Movement in Rural Java*, (Singapura; Oxford University Press, 1973).
7. Bayu Surianingrat. *Op.cit.* hlm.
8. Nugroho Notosusanto (ed) *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) hlm. 155-157.
9. Mohammad Hatta, *Sekitar Indonesia 17 Agustus 1945*. (Djakarta: Tinta Mas, 1970) hlm. 10.
10. ODP. Sihombing, *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Djepang*, (Jakarta: Sinar Djaja, 1962) hlm. 77-153.

11. Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1962), hlm. 7.
12. Geoge Mac Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*. (Ithaca: Cornell University Press, 1969) hlm. 13.
13. A. Radjab, *Pelajar dan Perang Kemerdekaan*, Malang: Yayasan Widoro, 1977) hlm 26.
14. *Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur*, (Surabaya: Djawatan Penerangan, 1953 hlm. 909.
15. May. Jend. Soengkono, "Data-data Revolusi 10 November 1945" (Tulisan tidak diterbitkan, Surabaya, 1958), hlm. 25-29.
16. A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid I*, (Bandung: Angkasa, 1977) hlm. 211.
17. Kempen RI, *Detik dan Peristiwa 17-8-1945 s.d. 23-1-1950*, (Yogyakarta, 1950), hlm. 58.
18. Semdam VIII Brawidjaja, *Sam Karya Bhirawa Anoraga*, (Malang, 1968) hlm. 132.
19. Dr. Abdurachman, *Sejarah Madura Selayang Pandang*, Sumenep: 1988) hlm. 69.
20. *Republik Indonesia Provinsi Djawa Timur, op.cit.*, hlm. 113-115.
21. Semdam VIII Brawidjaja, *op.cit.* hlm. 72-74.
22. Nugroho Notosusanto (ed) *op.cit.* hlm. 71-72
23. *Republik Indonesia Provinsi Djawa Timur, op.cit.*, hlm. 117-123.
24. Dr. Abdurachman, *loc.cit.*
25. Nugroho Notosusanto (ed) *op.cit.*, hlm. 80-81.

26. Trimarjono, SH., *Kantor Pemerintahan Daerah Tingkat I Jawa Timur*, (Surabaya: 1975) hlm. 4.
27. Joeniarto, SH., *Seri Ilmu Hukum Tata negara "Pemerintahan Lokal"*, (Yogyakarta YB. Penerbit Gadjah Mada, 1967) hlm. 76-77.
28. *Ibid.* hlm. 103
29. Team Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jawa Timur, *Sejarah Daerah*, (Surabaya: Balai Penelitian Pendidikan IKIP Surabaya, 1977).

BAB III

PROPINSI JAWA TIMUR PADA MASA AWAL ORDE BARU

3.1 Keadaan Politik dan Pemerintahan

Menjelang lahirnya Orde Baru, situasi politik dan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah Jawa Timur, menunjukkan keadaan yang tidak stabil. Keadaan seperti ini mulai tampak pada masa dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin dan Politik Nasakom tahun 1960-1965.

Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, salah satu masalah politik yang paling hangat pada masa itu ialah masalah aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI/BTI dalam rangka pelaksanaan UUPA atau *landreform*.¹ Tujuannya adalah untuk mewujudkan terbentuknya kelas proletar tidak bertanah, dengan melalui suatu revolusi sosial, PKI berusaha menciptakan masyarakat sosialis-komunis.

Pada waktu itu, para pemimpin PKI seperti Aidit, MH. Lukman, Sudirman, Nyoto dan lain-lain dengan terang-terangan mengatakan bahwa *landreform* atau UUPA yang dilaksanakan oleh pemerintah bukanlah landasan yang mampu untuk menghapus penghisapan. Namun PKI telah menganggap *landreform* itu penting untuk memperhebat perjuangan kaum tani pengikut-pengikutnya, baik sebelum atau sesudah pelaksanaan UUPA. Dengan demikian aksi sepihak yang dilancarkan itu merupakan “kawah candra dimuka”nya

kader-kader PKI yang dipersiapkan melakukan revolusi komunis pada tahap berikutnya.

Di Jawa Timur, gerakan aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI/BTI dan simpatisannya, melakukan pengambilalihan secara paksa terhadap tanah-tanah lebih yang dimiliki oleh tuan tanah, terutama mereka yang dianggap musuh oleh PKI. Tanah lebih itu selanjutnya digarap secara kolektif oleh pengikut-pengikut PKI-BTI dari daerah setempat atau sekitarnya, tanpa memberitahukan pejabat yang berwenang dan juga tuan tanah yang bersangkutan.

Tindakan PKI-BTI itu tentu saja mendapat perlawanan dari golongan Islam, dan juga di beberapa tempat harus berhadapan dengan aparat keamanan. Peristiwa aksi sepihak oleh PKI-BTI ini terjadi di banyak tempat, yaitu antara lain di Jengkol Kabupaten Kediri, di Klodan Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk, di Pedomasan Kecamatan Kencong Kabupaten Jember di Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, di Sumberejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan lain-lainnya.

Selain melancarkan aksi sepihak, PKI juga melancarkan aksi teror, sabotase, agitasi dan propaganda. Bahkan di Daerah Jawa Timur PKI juga membentuk Biro Khusus sebagai penggerak perebutan kekuasaan yang diketuai oleh Rustomo. Biro Khusus ini pada pertengahan tahun 1965 sudah mengadakan persiapan-persiapan dalam rangka perebutan kekuasaan, antara lain sebagai berikut.

Pertama, mengadakan hubungan dengan Biro Khusus PKI di Pusat Jakarta, dan juga dengan para anggota TNI yang telah berhasil dibina, dalam rangka untuk mematangkan persiapan-persiapan. Untuk ini pada September 1965 diadakan rapat/pertemuan beberapa kali dengan petugas Biro Khusus di Jawa Timur guna:

1. Menyusun Komando Kesatuan propinsi dengan Rustomo sebagai ketua.

2. Mematangkan rencana yang sudah disusun dan mempersiapkan gerakan bersenjata di daerah Madiun, Malang, Jember dan Surabaya
3. Membentuk tim yang mempunyai tugas:
 - a. Menyusun Dewan Revolusi Daerah
 - b. Menghadap Pangdam VIII Brawijaya pada saat dimulainya gerakan (dalam hal ini yang ditugasi Kapten Soembodo dan Kapten Kasmidjan)
 - c. Membuat pernyataan mendukung Dewan Revolusi (dalam hal ini yang ditugasi Peltu Sudono).

Kedua, mengadakan uji coba kekuatan. Dalam kaitan ini, pada 27 September 1965 massa PKI yang terdiri dari anggota Pemuda Rakyat, Gerwani dan CGMI mengadakan demonstrasi dan pengrusakan terhadap Kantor Gubernur Jawa Timur. Tujuannya adalah mengadakan uji coba kekuatan PKI terhadap kewibawaan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur. Maka berusaha menangkap Gubernur, yang dijabat oleh seorang Perwira Tinggi AD. Brigjen TNI Wijono. Namun usaha PKI ini dapat digagalkan oleh aparat keamanan.² Demikianlah perkembangan keadaan politik di Jawa Timur makin lama justru menjadi semakin panas. Keadaan ini mencapai titik kritis pada saat meletusnya pemberontakan G 30 S/PKI pada 30 September 1965.

Meskipun pemberontakan G 30 S/PKI dapat digagalkan oleh satuan-satuan ABRI, namun sejak saat itu hingga beberapa bulan kemudian, keadaan politik dan pemerintahan masih tetap menjadi kacau. Hal ini disebabkan oleh sikap Presiden Soekarno yang tidak tegas. Beliau sebagai Kepala Negara/Pemerintahan tidak mau membubarkan PKI dan mengambil tindakan dan pernyataan Presiden Soekarno pada waktu itu, dari segi politik banyak menguntungkan PKI.³

Sikap dan tindakan Presiden Soekarno seperti itu, tentu saja tidak memuaskan sebagian para pemimpin negara dan juga

beberapa organisasi massa serta partai politik. Akibatnya timbullah protes atau demonstrasi besar-besaran, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Pada waktu itu, dalam melakukan aksi protes, massa rakyat membentuk wadah kesatuan-kesatuan aksi; misalnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan lain-lainnya dalam aksi protesnya itu, mereka mencetuskan tiga tuntutan (Tritura) yaitu:

1. bubarkan PKI;
2. bersihkan kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI; dan
3. turunkan harga-harga.⁴

Seperti halnya di Jakarta, di beberapa kota di daerah Jawa Timur juga terjadi gelombang demonstrasi yang mencetuskan Tritura. Bahkan lebih dari itu, massa rakyat yang dikerahkan oleh beberapa organisasi massa dan partai politik yang pernah menjadi sasaran fitnah dan teror PKI, tidak hanya melakukan demonstrasi saja, mereka juga merusak/membakar kantor PKI/BTI, rumah-rumah, dan juga membunuh orang-orang yang dianggap terlibat pemberontakan G 30 S/PKI.

Menghadapi kenyataan seperti itu, maka untuk mengatasinya, pada 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah kepada Letjen TNI Soeharto. Isi Surat Perintah itu secara garis besar adalah agar Letjen TNI Soeharto atas nama Presiden/Pangti mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia. Selanjutnya Surat Perintah itu dikenal dengan istilah Surat perintah Sebelah Maret atau disingkat Supersemar.⁵

Berbekal kewenangan yang bersumber pada Supersemar, Letjen Soeharto, atas nama Presiden/Pangti, mengambil langkah-langkah untuk menata sistem pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sejak saat itu, dimulailah suatu tatanan baru yang sampai sekarang dikenal dengan istilah Orde Baru. Selanjutnya langkah awal yang dilakukan oleh pengemban Supersemar adalah usaha untuk

memulihkan keamanan dan ketertiban. Berkaitan dengan ini dan menimbang bahwa masih ada kegiatan sisa-sisa G 30 S/PKI, pada 12 Maret 1966, dengan Surat Keputusan No. 1/3/1966, pengemban Supersemar secara resmi membubarkan PKI dan organisasi-organisasi yang bernaung/berlindung di bawahnya sekaligus menyatakannya sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara RI.⁶

Sementara itu, di Daerah Jawa Timur, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan satuan-satuan ABRI serta orpol/ormas yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berusaha untuk menertibkan keadaan. Untuk itu, setiap instansi baik sipil maupun militer mulai membersihkan diri dari unsur-unsur G 30 S/PKI. Selain itu, aparat keamanan yang ditugasi oleh Pemerintah, juga berusaha menangkap para tokoh dan anggota PKI atau organisasi yang berada di bawah naungan PKI.⁷

Sebaliknya, bagi para tokoh PKI yang berada di Jawa Timur, seperti Rustomo, Soewandi, Roeslan Widjajasastra, Munir dan lain-lainnya segera lari menyelematkan diri. Selanjutnya setelah mengadakan evaluasi terhadap kegagalan G 30 S/PKI di Jakarta, dan hancurnya basis pertahanan terakhir di Jawa Tengah, serta pergolakan yang mereka ciptakan di Jawa Timur dapat dipatahkan oleh pemerintah Daerah dan kaum Pancasilais, para tokoh PKI itu segera menyusun strategi baru untuk melanjutkan perjuangannya.

Langkah awal yang dilakukan oleh para tokoh PKI di Jawa Timur itu adalah mengumpulkan kembali sisa-sisa anggota PKI yang berhasil menyelamatkan diri. Selain itu, mereka juga berusaha mengadakan hubungan dengan para tokoh PKI di tingkat pusat dan daerah lain dalam rangka untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Setelah mengadakan konsolidasi seperlunya, para tokoh PKI itu melanjutkan perjuangannya dengan menggunakan taktik dan strategi PKI gaya baru berdasarkan ajaran Mao Tse Tung yang terkenal dengan istilah "Dari Desa Mengepung Kota". Dalam hubungan ini mereka menggariskan kembali

dasar-dasar perjuangan PKI yang mereka sebut Tripanji PKI yaitu sebagai berikut.⁸

1. Pembangunan kembali partai Marxis/Lenis yang bebas dari subyektivisme, revisionisme, dan oportunisme.
2. PKI harus mendasarkan perjuangannya pada perjuangan bersenjata (perjuta).
3. PKI harus menggalang front persatuan nasional yang revolusioner yang terdiri atas buruh, tani, borjuasi kecil, dan borjuasi nasional sebagai faktor tambahan.

Untuk melaksanakan taktik dan strateginya itu PKI memilih Jawa Timur sebagai daerah operasinya dan Blitar Selatan sebagai obyek basis pertahanan. Terpilihnya daerah Blitar Selatan ini tentunya dapat dimengerti, karena menurut Munir, seorang tokoh CC PKI, daerah Blitar memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adanya massa PKI yang kuat;
2. Berdasarkan sejarahnya, sejak jaman Belanda daerah tersebut daerah yang sukar dan banyak bromocorahnya (bekas tahanan kriminal);
3. Keadaan medannya baik dan merupakan suatu daerah yang terisolir dari masyarakat ramai.⁹

Pada akhir tahun 1967, sisa-sisa anggota PKI dari daerah provinsi lain di luar Jawa Timur secara berangsur-angsur dapat masuk ke wilayah Jawa Timur. Mereka bergabung dalam rangka membentuk organisasi illegal PKI gaya baru dengan membuat jaringan-jaringan yang berbentuk Triko (Trio Kota) dan Kompro (Komite Proyek). Pada waktu itu di Pulau Jawa terdapat 7 Triko yaitu Malang, Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Solo. Sedangkan di seluruh Jawa Timur terdapat kompro-kompro, yaitu Raung Argopuro, Semeru Selatan, Malang Selatan, KKA (Kelut-Kawi-Arjuno), Blitar Selatan, Lawu, Gunung Kendeng dan Benjeng.

Di antara kompro-kompro tersebut. Kompro Blitar merupakan kompro yang sempurna dan terkuat di Jawa Timur, karena sudah mempunyai persenjataan yang cukup dan mempunyai banyak pelarian anggota-anggota ABRI.¹⁰ Bahkan di Blitar Selatan telah berhasil dibentuk STPR (Sekolah Tentara Perlawanan Rakyat dan KKPR (Kursus Kader perang Rakyat), yang sedang giatnya terus melatih pemuda-pemuda setempat. Selanjutnya kader-kader hasil latihan tersebut disebar ke seluruh wilayah Jawa Timur.

Pada akhir tahun 1967, PKI gaya baru mulai mengadakan penyempurnaan organisasi dengan jalan penyusunan Detga (Detasemen gerilya) dan Gerda (Gerilya Desa) serta pembuatan Ruba (rumah bawah tanah) untuk tempat persembunyian tokoh-tokoh PKI. Pada waktu itu, tokoh-tokoh PKI yang berkumpul di Jawa Timur cukup banyak, antara lain, Hutapea, Roeslan Widjajasastra, Tjugito, Munir, Suwandi, mardjoko dan lain-lain.¹¹ Khusus untuk Kompro Blitar, telah tersusun dua Detga dan 17 Gerda yang terdiri dari para petani miskin.

Sejalan dengan rencana untuk menjadikan Blitar Selatan sebagai basis pertahanan, kota Surabaya oleh PKI akan dijadikan basis untuk mendapatkan informasi dan dana (logistik) dari para simpatisannya. Untuk ini mereka membentuk "Kompro Kota" atau Komando Kota yang bertujuan akan mengadakan aksi dengan sistem "Gerilya Kota". Karena itu, di Jawa Timur dibentuk Trio Kota (Komando di tiga kota yaitu Surabaya, Malang, Blitar). Rencana aksi tersebut tercantum dalam suatu dokumen yang disebut "Pedoman Aksi Kota" yang dibuat oleh Sugiarso, dkk.¹²

Di sisi lain, PKI gaya baru juga melancarkan aksi propta (Propaganda Bersenjata) berupa bermacam-macam kegiatan, seperti perampokan, penculikan, pembunuhan dan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Kegiatan-kegiatan semacam ini makin lama semakin meningkat. Selain itu, di kota-kota besar terutama di Surabaya mulai muncul orang-orang gelandangan yang jumlahnya makin lama semakin banyak.

Sementara itu, di pihak Pemerintah Daerah, pada tahun 1967 terjadi pergantian pimpinan pemerintahan. Di lingkungan ABRI, khususnya AD, pangdam VIII/Brawijaya Mayjend Soemitro diganti Mayjend Mohammad Yasin. Di lingkungan pemerintahan sipil, Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Mayjend Wijono, digantikan oleh Mohammad Noer.¹³ Kedua pimpinan baru ini tampaknya oleh Pemerintah Pusat memang sengaja disiapkan/ditugaskan untuk mengatasi situasi di Jawa Timur yang makin lama terasa menjadi semakin rawan.

Prioritas pertama yang dilakukan oleh para pemimpin pemerintah Daerah di Jawa Timur yang baru itu adalah mengadakan konsolidasi, mengembalikan dan meningkatkan wibawa/martabat aparat pemerintahan baik sipil maupun militer.¹⁴ Dalam hubungan ini di lingkungan instansi pemerintah segera ditegakkan disiplin dan tertib kerja. Di sisi lain, untuk jabatan-jabatan yang kosong karena pejabatnya terlibat G 30 S/ PKI, segera diisi dengan pejabat-pejabat yang baru. Khusus untuk jabatan-jabatan tertentu atau di tempat yang strategis di bidang politik dan pemerintahan seperti Kepala Desa, Bupati, Rektor dan lain-lainnya sebagian untuk sementara diangkat seorang anggota ABRI.¹⁵

Selain itu, para pemimpin-pemimpin daerah juga berusaha mengadakan peng-Orba-an secara menyeluruh di Jawa Timur. Sasarannya adalah segenap warga masyarakat, baik rakyat biasa, Pegawai Negeri Sipil, ABRI maupun karyawan swasta. Tujuan peng-Orba-an ini ialah pembinaan mental dengan menanamkan dan menyebarluaskan pengertian Orde Baru yaitu sebagai berikut:

1. Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara, yang diletakkan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Koreksi total atas penyelewengan-penyelewengan disegala bidang yang terjadi pada masa lampau, dan berusaha menyusun kembali kekuatan bangsa dan menentukan cara-cara yang tepat untuk menumbuhkan stabilitas nasional

Jangka Panjang, sehingga mempercepat proses pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁶

Selanjutnya untuk mengatasi keamanan yang semakin rawan akibat aksi Propta PKI, Pemerintah Daerah Jawa Timur segera mengambil tindakan-tindakan tegas. Dalam hubungan ini, Kodam VIII/Brawijaya sebagai inti kekuatan Laksus Kopkamtib Daerah Jawa Timur memerintahkan Korem-Korem untuk melakukan Operasi Inteljen dan Operasi Territorial bersama aparat sipil. Operasi Inteljen bertujuan untuk mengetahui secara jelas latar belakang segala bentuk peristiwa yang mengganggu keamanan dan sekaligus untuk mengetahui seberapa jauh peranan dan kekuatan sisa-sisa G 30 S/PKI di Jawa Timur. Sedangkan Operasi Territorial, bertujuan untuk mengembalikan kewibawaan pemerintah dan menegakkan Panca Tertib.

Perlu dikemukakan di sini, bahwa kaitan Operasi Inteljen, pada Januari sampai dengan Agustus 1968, di Surabaya diadakan "Operasi Sambar Raga" yang sifatnya operasi diam-diam. Dalam operasi ini pihak pemerintah berhasil menangkap 712 orang sisa-sisa anggota PKI.¹⁷

Dari hasil evaluasi terhadap operasi-operasi tersebut, menunjukkan bahwa kekuatan PKI gaya baru di Jawa Timur yang basis pertahanannya berada di Blitar Selatan, belum dapat dipatahkan atau dihancurkan. Atas dasar hasil evaluasi ini, Kodam VIII/Brawijaya meningkatkan dan mengintensifkan operasi penghancuran proyek basis PKI gaya baru di Blitar Selatan menjadi operasi *Trisula* dibawah pimpinan Kolonel Witarmin.¹⁸

Setelah kurang lebih 2 bulan dilancarkan Operasi Trisula, yaitu mulai tahap penjajakan, tahap penghancuran, tahap pemadatan dan pembersihan. kubu-kubu pertahanan dan proyek basis PKI gaya baru di Blitar Selatan dapat dihancurkan. Dalam operasi ini tokoh-tokoh PKI dapat ditangkap dan ada yang ditembak mati. Menurut keterangan Pangdam VIII/Brawijaya Mayjend A. Yasin dalam Konperensi

pers di Malang 9 Agustus 1968, mengatakan bahwa tahanan PKI hasil dari Operasi Trisula berjumlah 850 orang. Sedangkan senjata-senjata yang berhasil disita, berjumlah 37 pucuk dan 4 buah granat.

Selanjutnya untuk mengembalikan kewibawaan pemerintah dan stabilitas keamanan, dilancarkan operasi konsolidasi dan rehabilitasi territorial dan Pemerintah Sipil. Operasi ini dilaksanakan hingga 7 September 1968. Berikutnya disusul operasi tahap terakhir yaitu operasi pembinaan territorial yang dilaksanakan hingga 16 Desember 1968.

Kemudian setelah kekuatan PKI gaya baru dapat dihancurkan, maka Pemerintah Daerah mulai berusaha mengintensifkan peng-Orde Baru-an secara menyeluruh di Jawa Timur. Usaha ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan.

3.2 Keadaan Sosial Ekonomi dan Pendidikan

3.2.1 Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Jawa Timur pada saat itu, sangat berkaitan dan tidak terlepas dengan masalah struktur masyarakat Indonesia. Pada dasarnya struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. *Pertama*, ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang sangat tajam. *Kedua*, secara horizontal masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat dan kedaerahan. Perbedaan-perbedaan dalam kesukuan, agama, adat istiadat dan kedaerahan, sering disebut sebagai ciri masyarakat majemuk.¹⁹

Masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, pada masa penjajahan Belanda dan juga Jepang, terdiri dari elemen-elemen yang terpisah satu sama lain karena adanya perbedaan

ras. Konstelasi politik pada waktu itu, telah menciptakan struktur masyarakat yang dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. Dalam hal ini, bangsa Indonesia, walaupun jumlahnya paling banyak tetapi mereka selalu menjadi jumlahnya paling banyak tetapi mereka selalu menjadi warga negara lapisan paling bawah (ke-3) di negerinya sendiri.²⁰

Berbeda dengan jaman penjajahan/kolonial, pada jaman sesudah kemerdekaan Indonesia stratifikasi sosial masyarakat Indonesia, dalam hal ini termasuk masyarakat Jawa Timur, sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan serta keterlibatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian pula halnya tentang mobilitas sosial juga terjadi atas dasar itu. Supremasi ras kulit putih hancur di jaman Jepang dan supremasi Jepang hancur di jaman Republik Indonesia. Sementara itu, kemerdekaan Indonesia juga memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperoleh berbagai jenjang pendidikan, sehingga memungkinkan seseorang mencapai status sosial yang lebih tinggi.

Sesudah dua dasa warsa kemerdekaan Indonesia, struktur masyarakat Indonesia, dalam hal ini termasuk masyarakat Jawa Timur, terdiri dari tiga lapisan sosial. *Pertama*, kelompok intelektual menjadi kelompok yang menempati kedudukan tertinggi dalam masyarakat. *Kedua*, ialah kelompok menengah. Mereka ini umumnya terdiri dari pegawai rendah sampai menengah, pedagang-pedagang/pengusaha dan tukang. *Ketiga*, kelompok paling bawah yang terdiri dari golongan buruh kasar dan petani di desa-desa.²¹

Sedangkan struktur masyarakat berdasarkan cakrawala lain, dapat dilihat pula pada hasil penelitian Clifford Geertz yang dikemukakan dalam bukunya "*The Religion of Java*".²² Menurut pengamatan Geertz, dalam masyarakat Jawa terdapat orientasi budaya berbeda-beda, yang pada umumnya dibagi dalam tiga kelompok besar, yaitu priyayi, santri dan abangan.

Golongan priyayi adalah orang-orang yang mempunyai hubungan aristokrasi turun temurun, berakar dalam kerajaan

Jawa Kuno. Mereka oleh Belanda dipergunakan dalam pemerintahan kolonial dan setelah kemerdekaan dengan ditambah golongan terpelajar lainnya menjadi birokrasi di Jawa. Pada tahun 1960-an golongan ini dicirikan sebagai orang yang memiliki tata cara sopan santun sangat halus, dengan ilmu kebatinan intuitif serta mencerminkan kuatnya pengaruh unsur Hindu dalam sinkritisme Jawa. Status kelompok ini sebagai elite dalam masyarakat Jawa.

Golongan santri adalah orang-orang yang berdasarkan sub tradisi Islam di Jawa, yang secara tradisional dikaitkan dengan pedagang-pedagang pesisir. Dewasa ini golongan santri telah menyebar di seluruh pelosok Jawa, dan bahkan Indonesia. Mereka umumnya sangat taat melaksanakan ajaran Islam dan menolak unsur-unsur pra Islam yang diakulturasikan.

Golongan abangan yaitu orang-orang Jawa tradisional. Mereka memiliki pola kepercayaan yang mendekati kepercayaan priyayi, tetapi dengan stratifikasi sosial yang lebih rendah. Golongan abangan berorientasi kepada berbagai macam kepercayaan spiritual serta upacara selamatan ritual dengan penekanan pada unsur animisme dalam sinkretisme Jawa.

Jawa Timur sebagai daerah provinsi yang wilayah geografisnya cukup luas, pada tahun 1975 jumlah penduduknya sudah mencapai 27.742.262 jiwa. Dari seluruh jumlah penduduk ini yang tinggal di daerah Kabupaten ada 24.967.653 jiwa atau 89,998%. Sedangkan yang tinggal di daerah Kotamadya, ada 2.774.609 jiwa atau 10,002%. Ini berarti sebagian terbesar penduduk tinggal di daerah pedesaan.

Seluruh jumlah penduduk Jawa Timur ini terdiri dari berbagai golongan dan bermacam-macam suku bangsa yang berbeda-beda sub kultur dan mempunyai kepentingan serta kebutuhan yang berbeda-beda pula. Secara garis besar etnis penduduk Jawa Timur dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu penduduk asli dan pendatang/asling. Penduduk asli terdiri dari suku bangsa Jawa, Madura, Osing dan suku

bangsa Tengger. Sedangkan kelompok pendatang/asing terdiri dari orang-orang: Cina, Arab, India, Belanda, Jepang, Inggris, Australia dan lain-lain. Jumlah orang asing ini pada tahun 1975 telah mencapai 119.385 atau 0,430% dari jumlah penduduk Jawa Timur seluruhnya.²³

Sebagian terbesar dari penduduk Jawa Timur bekerja sebagai petani/buruh tani yang terbesar di seluruh wilayah Jawa Timur. Berdasarkan data sensus penduduk (1961), sensus pertanian (1963), seluruh penduduk petani di pedesaan Jawa Timur berjumlah sekitar 19.645.218 jiwa (kira-kira 2.806.460 Kepala Keluarga) terdiri dari 8.363.283 jiwa (1.194.755 Kepala Keluarga) atau 42,56% sebagai lapisan masyarakat tidak bertanah (bersawah). Sisanya 11.281.935 (1.611.705 KKK) atau 57,44% sebagai lapisan yang memiliki tanah (sawah). Mereka terdiri dari lapisan petani miskin 33,27%, petani sedang 23,98%, petani kaya 0,16%, dan tuan tanah 0,20%.²⁴

Besarnya jumlah petani miskin di Jawa Timur tentunya dapat dipahami, karena meningkatnya jumlah penduduk serta masuknya sistem ekonomi pasar (komersial), ke pedesaan, mengakibatkan para petani kecil secara berangsur-angsur tergusur dari tanahnya. Karena tanah yang dimiliki terlalu sempit, apalagi kurang dari setengah hektar, tidak ada lagi artinya ditinjau dari segi ekonomi. Akibatnya kaum tani semakin terikat dalam hutang. Terakhir sebagian dari mereka terpaksa melepaskan tanahnya kepada orang yang lebih mampu.

Selain sebagai petani, penduduk Jawa Timur sebagian ada yang bekerja sebagai pedagang, sedangkan sebagian yang lain ada yang bekerja sebagai buruh, yaitu buruh di pabrik-pabrik industri, di perkebunan, di bangunan/listrik dan sebagainya. Kaum buruh adalah pekerja kasar yang waktunya disibukkan oleh kerja keras untuk memperoleh upah. Akan tetapi sampai dengan dua dasa warsa setelah kemerdekaan Indonesia, mereka belum memperoleh kesejahteraan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, namun faktor yang paling pokok adalah keadaan ekonomi negara (RI) yang pada saat itu mengalami kesulitan.

Sebenarnya, sejak presiden mendekritkan kembali ke UUD 1945 pada 5 Juli 1959, Pemerintah sudah memikirkan rencana pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Delapan Tahun (1961-1969). Sasaran Rencana pembangunan ini ialah bidang mental, kesejahteraan, pemerintahan, produksi dan distribusi. Namun rencana pembangunan ini juga mengalami nasib yang sama dengan rencana pembangunan yang terdahulu yaitu tidak dapat terlaksana.

Adapun penyebab utama kegagalan Rencana Pembangunan Delapan Tahun itu, ialah kurang realistis dan juga kurang logis. Selain itu, karena prinsip-prinsip pembangunan ekonomi diabaikan, maka pendapatan Pemerintah makin lama semakin menurun. Sebaliknya pengeluaran Pemerintah makin lama semakin membesar, sehingga terjadi defisit anggaran. Di sisi lain pemerintah juga tidak berhasil mengendalikan pasar. Akibatnya pada tahun 1961-1962 harga-harga barang naik sebesar 400%.²⁵

Untuk memperbaiki keadaan ekonomi negara yang tidak sehat itu, maka Pemerintah Orde Baru melalui MPRS mengeluarkan Ketetapan No. XXIII/MPRS/1966 yang berjudul Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Tap MPRS ini terdiri atas 10 bab dan 71 pasal, yang pada azasnya meliputi landasan idiil dan landasan operasional. Landasan Idiil menentukan pokok yang harus dipegang teguh, yaitu azas demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi adalah produksi dikerjakan oleh semua dan di bawah pimpinan atau penilaian masyarakat. Ekonomi disusun atas dasar kekeluargaan tidak mengenal pertentangan kelas.²⁶

Sementara itu di daerah propinsi Jawa Timur, Pemerintah Orde Baru juga mulai menata dan mengadakan perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi, di samping mengatasi gerakan PKI gaya baru. Untuk ini pemerintah Daerah menetapkan peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 1967 tentang Pembangunan Tiga Tahun Daerah Jawa Timur Tahun 1967, 1968, dan 1969.

Pembangunan Tiga Tahun Daerah Jawa Timur adalah pembangunan daerah Jangka Pendek. Karena itu, dalam perencanaannya selalu memberikan prioritas utama pada program-program rehabilitasi dan stabilisasi. Program rehabilitasi tercermin dalam proyek-proyek pembangunan yang sasaran utamanya adalah pemilikan dan peningkatan kapasitas produksi di bidang pangan, sandang, dan ekspor, serta prasarana-prasarana ekonomi yang menunjang bidang-bidang tersebut.

Program stabilitas tercermin dalam usaha pembangunan yang sasaran utamanya adalah pembangunan yang dapat segera menambah pasokan barang dalam peredaran, dengan pemilikan proyek-proyek prioritas serta penggerakan segenap daya dan dana bagi terjaminnya pembiayaan rupiah dan devisa, guna pelaksanaan rencana fisik pembangunan.

3.2.2 Pendidikan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 disebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran". "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang". Berdasarkan amanat UUD 1945 ini, setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, pemerintah segera membenahi keadaan pendidikan, pengajaran nasional peninggalan pemerintahan kolonial.

Usaha Pemerintah untuk membenahi keadaan pendidikan/pengajaran itu makin lama memang mendapatkan kemajuan yang cukup baik, dibandingkan dengan masa penjajahan. Akan tetapi di sisi lain, sampai dengan akhir pemerintahan Orde Lama, hasilnya masih belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keadaan sosial politik yang selalu tidak stabil.²⁷

Setelah Orde Lama tumbang dan digantikan oleh Orde Baru, maka Pemerintah Republik Indonesia menaruh perhatian yang serius terhadap pembangunan di bidang pendidikan/pengajaran di samping bidang-bidang yang lain.

Di Jawa Timur, usaha pembangunan di bidang pendidikan/ pengajaran dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam hubungan ini, pada masa awal Orde Baru, yang mendapat prioritas utama ialah mengenai rehabilitasi sekolah-sekolah akibat G 30 S/PKI dan pelaksanaan kewajiban belajar.

a. Rehabilitasi Sekolah-sekolah Akibat G 30 S/PKI

Berdasarkan data pada Pemerintah Daerah Jawa Timur, dari sejumlah 46.815 orang guru, khususnya guru Sekolah Dasar, ada 8.347 orang yang hilang atau terlibat dalam G 30 S/PKI. Karena itu, untuk mengisi kekosongan tersebut, Pemerintah Daerah Jawa Timur mengambil kebijaksanaan sebagai berikut:

- 1) Segera mengangkat guru-guru tamatan SGA/SPG dari tahun 1965 dan sebelumnya;
- 2) Segera mengangkat semua lulusan SPG dan SPG-C tahun 1966
- 3) Mengangkat sukarelawan/sukarelawati guru, yang berijazah SLTP, sementara dengan pangkat jabatan pegawai tata usaha dengan tugas mengajar. Selanjutnya pada sukarelawan/sukarelawati itu segera diusahakan upgrading atau penataran oleh Pemerintah Daerah untuk dapat menempuh ujian negara guna mencapai ijazah persamaan sederajat SPG.

b. Pelaksanaan Kewajiban Belajar

Sementara itu jumlah anak yang wajib belajar/sekolah (umur 6-14 tahun), pada tahun 1966 kurang lebih ada 5.200.000 anak. Di antara jumlah ini, yang masih sekolah di SD, Madrasah atau di SLTP kurang lebih ada 2.300.000 anak. Jadi sisanya yang masih belum tertampung mendapat kesempatan belajar ada kurang lebih 2.900.000 anak. Menghadapi kenyataan seperti ini, untuk mensukseskan kewajiban belajar, Pemerintah Daerah Jawa Timur pada tahun 1967/1968 mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Membangun 29.000 ruang sekolah/belajar (kurang lebih 4.833 SD dipakai pagi/sore) untuk 2.333 desa yang belum mempunyai SD.
- 2) Menambah 29.000 orang guru (untuk mengajar pagi/sore). Khusus untuk mencapai target kebutuhan guru, pada tahun ajaran 1967 dan 1968, tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya di Jawa Timur, diharapkan dapat “menghasilkan” 400 orang guru SD baru. Untuk ini di tiap-tiap daerah diharapkan membuka kelas-kelas SPG-C di tiap-tiap SMP Negeri dan SMA Negeri, sedangkan tenaga pengajarnya meminta bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa IKIP yang sedang ada di Jawa Timur. Sementara itu, SPG yang telah ada diharapkan mampu memproduksi kurang lebih 2000 orang guru setiap tahunnya.²⁸

Di sisi lain, pada saat itu, di Jawa Timur juga mulai berkembang lembaga-lembaga pendidikan jenjang yang lebih tinggi negeri dan swasta, baik yang dibina oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun Departemen Agama. Lembaga Pendidikan yang dibina oleh Depdikbud yang ada pada saat itu, selain SD dan TK adalah sebagai berikut. Tingkat SLTP ialah: SMP, SMEP, ST dan SKKP. Tingkat SLTA ialah: SMA, SMEA, STM, SPG, SGO, dan SKKA. Tingkat Pendidikan Tinggi Negeri ialah: Universitas Airlangga, Universitas Jember, ITS, IKIP Malang, IKIP Surabaya dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta. Sedangkan lembaga pendidikan yang dibina oleh Departemen Agama ialah Roudlotul Athfal, Madrasah, Diniyah Alawiah, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, Pendidikan Guru Agama (PGA), dan IAIN Sunan Ampel.²⁹

Usaha Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam rangka mencerdaskan bangsa pada masa Orde Baru tersebut, ternyata makin lama menunjukkan hasil yang semakin baik. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah warga masyarakat yang mendapat kesempatan belajar pada setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 1971 penduduk Jawa Timur yang berumur 10 tahun ke atas, yang jumlahnya kurang lebih 17.898.210 orang, komposisi tingkat pendidikannya sebagai berikut:

- a. Yang tamat Akademi/Perguruan Tinggi kurang lebih 39.878 orang;
- b. Yang tamat SLTA Kejuruan kurang lebih 116.105 orang;
- c. Yang tamat SLTA Umum kurang lebih 140.213 orang;
- d. Yang tamat SLTP Kejuruan kurang lebih 165.697 orang;
- e. Yang tamat SLTP Umum 462.827 orang;
- f. Yang tamat SD kurang lebih 3.110.497 orang;
- g. Yang belum tamat SD kurang lebih 5.231.300 orang;
- h. Yang tidak sekolah kurang lebih 8.631.693 rang.³⁰

Kemudian bagi warga masyarakat yang berumur 10 tahun ke atas tapi belum mendapatkan pendidikan di sekolah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Masyarakat. Pada mulanya Pendidikan Luar Sekolah ini, berbentuk kursus-kursus dan dikenal sebagai Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Namun pada perkembangan berikutnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pendidikan Masyarakat ini berbentuk kelompok-kelompok belajar sesuai dengan jenjangnya. Kemudian kelompok-kelompok belajar tersebut dikenal dengan istilah Kelompok Belajar (Kejar Paket A, B, dan lain sebagainya).

Catatan

1. Drs. Aminudin Kasdi, MS. *Pengantar Sejarah Indonesia Modern: Tinjauan Struktur Gerakan Sosial Politik di Jawa Tahun 1960*. (Surabaya: University Press IKIP, 1995).
2. Moerdiono. *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1994) hlm. 79-88.
3. *Ibid*. hlm. 141-149.
4. Nugroho Notosusanto, (ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1977) hlm. 123-126.
5. *Ibid*
6. Moerdiono. *Op.cit*. hlm. 139.
7. Sam karya Bhirawa Anaraga. *Sejarah Militer Kodam VIII/ Brawijaya*. (Surabaya: Dinas Sejarah Kodam VIII/ Brawijaya, 1974) hlm. 305-315.
8. Moerdiono. *Op.cit*. hlm. 160.
9. Sam karya Bhirawa Anaraga. *Op.cit*. hlm. 77-78.
10. Semdam VIII/Brawijaya. *Operasi Trisula*. (Surabaya: Jajasan Taman Tjandra Wilwatikta, 1960) hlm. 5.
11. Sam karya Bhirawa Anaraga. *Op.cit*. hlm. 80.

12. Sketsamasa. *Operasi Trisula. Tjet. Ke.3* (Surabaya: Grip, 1969) hlm. 34.
13. Mien A. Rivai. *Mohammad Noer*. (Jakarta: Yayasan Biografi Indonesia, 1990) hlm. 68-69.
14. *Ibid.*
15. Sam karya Bhirawa Anaraga. *Op.cit.* hlm. 353-391.
16. Nugroho Notosusanto, (ed). *Op.cit.* hlm. 125-126.
17. Sketsmasa. *Op.cit.* hlm. 40-41.
18. Sam Karya Bhirawa Anaraga. *Op.cit.* hlm. 72-114.
19. Nasional *Suatu Pendekatan untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia*. (Yogyakarta: Fakultas Sospol UGM, 1974) hlm. 51.
20. Yusmar Basri, (ed). *Sejarah Nasional Indonesia V*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1977) hlm. 155-156.
21. Nugroho Notosusanto, (ed). *Op.cit.* hlm. 192-193.
22. Clifford Geertz. *Abangan, Santri dan Priyayi. Terjemahan The Religion of Java*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989)
23. Team Penulisan Naskah pengembangan Media Kebudayaan Jawa Timur. *Monografi Daerah Jawa Timur*. (Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Depdikbud, 1977) hlm. 227-228.
24. Drs. Aminudin Kasdi, MS. *Op.cit.* hlm. 62.
25. Nugroho Notosusanto. *Op.cit.* hlm. 232-235.
26. *Ibid.*
27. Yang menyebabkan Keadaan Sosial Politik tidak Stabil setelah Kemerdekaan Indonesia ialah: Perang Kemerdekaan, Demokrasi Liberal, Demokrasi terpimpin, dan pemberontakan G 30 S/PKI.

28. Perda No. 3 Tahun 1967 tentang Pembangunan Tiga Tahun Daerah Jawa Timur 1967, 1968, 1969.
29. Drs. Heru Sukadri K. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*. (Surabaya: Proyek IDKD, 1986) hlm. 171-234.
30. Team Penulisan Naskah Pengembangan Media Kebudayaan Jawa Timur. *Op.cit.* hlm. 173-176.

BAB IV

JAWA TIMUR PADA MASA PEMBANGUNAN (1969-1988)

Pembangunan secara terencana dan terarah yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia baru benar-benar terealisasi setelah memasuki fase Orde Baru. Hal ini bukan berarti sebelumnya tanpa perencanaan yang matang dan sasaran yang jelas, akan tetapi pada masa Orde Lama kondisi sosial ekonomi dan politik yang kurang stabil sehingga mengakibatkan jalannya pembangunan juga tersendat-sendat.

Rencana dan arah Pembangunan Nasional itu benar-benar terlaksana setelah dicanangkannya Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang dimulai tahun 1969. Keberhasilan itu dapat dilihat dari arah pembangunan dan sasaran yang jelas yang dituangkan dalam Tap MPRS maupun Tap MPR 1973 tentang GBHN.

Di Jawa Timur kondisi sosial masyarakat menjelang Repelita I (1969) juga kurang mendukung bagi pelaksanaan pembangunan. Hal ini karena warisan Pemerintah Orde Lama yang tidak mengadakan usaha-usaha pembangunan berencana yang mampu membawa masyarakat kepada kemakmuran dan keadilan.¹ Kondisi tersebut sebagai akibat terkotak-kotaknya suatu kelompok untuk kepentingan para tokoh politik, sehingga mengakibatkan seringnya berganti-ganti tampuk pimpinan pemerintahan yang menyebabkan tugas utama untuk membangun masyarakat belum tersentuh. Dalam kondisi

seperti ini, pemegang pemerintahan di Jawa Timur memasuki REPELITA I mendapat tugas yang tidak ringan karena menyangkut strategi apa yang harus dilakukan.

Tampuk pimpinan pemerintah Jawa Timur pada awal Repelita I dipegang oleh seorang yang cukup populer di kalangan masyarakat Jawa Timur, bahkan hingga dewasa ini pun masih cukup dikenal meskipun sudah tidak menjabat yaitu Bapak Muhammad Noer. Pola pemikiran beliau sebagai Gubernur banyak mewarnai pola pembangunan yang diterapkan di Jawa Timur pada masa Repelita I. Karakter kepemimpinan Muhammad Noer memang cukup menonjol karena didasari oleh pemikiran bahwa “seorang Kepala Daerah harus mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan di pundaknya kepada rakyat, pemerintah, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Bertanggung jawab kepada rakyat berarti selalu melakukan kegiatan yang harus menguntungkan rakyat. Bertanggung jawab kepada pemerintah yaitu berkaitan dengan kedudukan pemimpin formal. Adapun bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan sikap hidup umat Islam yang tak dapat ditawar lagi.²

Tipe kepemimpinan yang demikian itu membawa konsekuensi kepada kepemimpinan hingga di tingkat paling bawah untuk selalu mengadakan perbaikan dan berorientasi kepada tatanan kehidupan masyarakat. Jalan yang ditempuh adalah dengan menggalakkan komunikasi dan sambung rasa dengan masyarakat, rakyat pedesaan memerlukan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu semua jajaran harus mempersatukan antara keinginan atau kebutuhan rakyat dengan pelaksanaan aktivitas pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya Repelita I di daerah Jawa Timur pola yang diterapkan oleh Muhammad Noer adalah menerapkan keseimbangan dan sinkronisasi antara pembangunan makro dan pembangunan yang sifatnya mikro, yaitu berupa peningkatan taraf hidup dan pendapatan masyarakat.

Dalam mensukseskan Repelita I di Jawa Timur terdapat tiga aspek yang sangat mendesak untuk diatasi yaitu: aspek demografi, aspek ketenagakerjaan dan aspek agraria. Ketiga aspek tersebut berkaitan langsung dengan permasalahan yang harus dihadapi dalam Repelita I Jawa Timur yaitu permasalahan pangan. Hal ini karena menyangkut jumlah penduduk di Jawa Timur yang cukup padat dan pertumbuhannya yang masih tinggi sehingga produksi pangan yang terjadi di Jawa Timur sama sekali tidak seimbang dengan peningkatan taraf kehidupan rakyat.

Untuk menghadapi tantangan tersebut maka Jawa Timur berusaha menjadikan pedesaan sebagai daerah produsen, melalui peningkatan produktivitas yang diharapkan dapat mensuplai bahan pangan pokok ke daerah-daerah lain khususnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan harapan tersebut maka secara sinkron dan terpadu oleh Muhammad Noer disusun suatu *regional planning*. Yaitu perencanaan wilayah berdasarkan pada suatu kebijaksanaan daerah yang disusun berdasarkan perkiraan dan target kemampuan maupun kesanggupan daerah sehingga daerah dapat berperan serta dalam menyukseskan pembangunan nasional. Dalam menerapkan pola *regional planning* lebih diutamakan penggunaan pendekatan mikro daripada pendekatan makro seperti yang diterapkan dalam skala pembangunan nasional. Pendekatan mikro dalam *regional planning* yang dimaksud adalah melihat dan menilai pembangunan dari segi kepentingan daerah untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Jawa Timur.

Regional planning harus mempunyai nilai praktis yang tinggi. Tidak sekedar berisikan inventarisasi pikiran-pikiran mengenai masalah pengarahan pengembangan aktivitas pembangunan yang sifatnya sektoral. Karena itu dalam kaitan pelaksanaan Repelita I di Jawa Timur, gagasan itu dituangkan dalam program 3P yakni: pendidikan, pangan, dan perhubungan.

Penggunaan pola *regional planning* sebagaimana yang diterapkan di Jawa Timur yang dipelopori oleh Gubernur Muhammad Noer tersebut hingga Repelita II, III dan IV masih tetap diterapkan dengan menggunakan istilah "Perwilayahan Pembangunan". Perwilayahan Pembangunan itu pada hakekatnya mengacu pada GBHN yang menyatakan bahwa untuk menjamin agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan serasi perlu diusahakan keselarasan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Hal tersebut berarti bahwa dalam setiap kegiatan pembangunan di samping pertimbangan yang bersifat sektoral perlu pula diperhatikan pertimbangan-pertimbangan regional.³ Untuk itu berhasilnya pembangunan di daerah perlu diusahakan kemudahan-kemudahan, baik dalam segi pemikiran, perencanaan, maupun dalam pelaksanaannya. Perlu diusahakan pula agar kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan kemampuan dan potensi yang terdapat di daerah yang bersangkutan.

Provinsi Jawa Timur pada Repelita II dan III yang didalamnya terbagi menjadi 37 daerah tingkat II dan I (satu) kota Administrasi Jember, pembagian perwilayahan dan pengembangannya dibagi menjadi 5 pusat pengembangan pembangunan yaitu: (1) Wilayah pengembangan GERBANGKERTOSUSILA (meliputi wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo dan Lamongan) dengan pusatnya Surabaya, (2) Wilayah pengembangan dataran tinggi tengah dengan pusatnya Malang, terutama dititikberatkan pada pertumbuhan dan perkembangan/peningkatan produksi pertanian dan perkebunan serta industri yang mengolah dari bahan baku hasil pertanian dan pariwisata, (3) Wilayah pengembangan dataran tinggi dan rendah sebelah timur dengan pusatnya Jember. Wilayah ini dititikberatkan kepada usaha intensifikasi produksi pangan dan ekspor, (4) Wilayah pengembangan dataran rendah sebelah barat pusatnya Madiun yang dipersiapkan untuk mengembangkan produksi bahan galian dan hasil hutan, (5) Wilayah pengembangan khusus Madura dengan pusatnya Sumenep. Wilayah ini dipersiapkan untuk daerah peternakan, perikanan, penggaraman, dan pariwisata.

Selain struktur pusat-pusat wilayah pengembangan di atas dalam usaha mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan laju pertumbuhan pembangunan antar daerah Tingkat II serta guna mencapai hasil guna dan daya guna yang setinggi-tingginya dan mengingat kondisi fisik alami yang berbeda secara geografis, Jawa Timur juga dibagi dalam tiga perkembangan (sub regional) yaitu: (a) Sub Regional I, yang merupakan daerah dataran tinggi.tengah yang diklasifikasikan sebagai wilayah/sub regional subur dan maju, (b) Sub Regional II, yaitu meliputi daerah rendah di sebelah utara Jawa Timur dan Madura yang diklasifikasikan sebagai daerah/sub regional sedang, (c) Sub Regional III, yaitu meliputi daerah dataran rendah di selatan Jawa Timur diklasifikasikan sebagai wilayah.sub regional kritis/minus.

Usaha-usaha kebijaksanaan regionalisasi di atas semuanya guna menunjang perwujudan pelaksanaan pembangunan dalam pemberian prioritas-prioritas pembangunan terhadap beberapa sektor pembangunan yang disesuaikan dengan potensi daerah yang bersangkutan.

Dengan melihat Perencanaan Pembangunan Jawa Timur sejak Repelita I 91969) hingga Repelita II (1988) dapat dilihat pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor pembangunan Jawa Timur selama periode tersebut yang meliputi berbagai sektor.

4.1 Pertanian

4.1.1 Tanaman pangan

Sebagaimana penduduk Indonesia umumnya, penduduk Jawa Timur mayoritas petani. Hal ini karena sebagian besar penduduk tinggal di daerah (pedesaan) dan hanya 15% pada tahun 1971 penduduk yang tinggal di kota. Dari sejumlah penduduk yang tinggal di desa itu, 70% di antaranya adalah masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan pertanian. Karena itu sejak Pelita I pembangunan dalam sektor pertanian memperoleh prioritas utama. Pada tahun 1969/1970 untuk

pembiayaan pembangunan disektor pertanian Jawa Timur telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 196.413.000. Jumlah ini dari tahun ke tahun bertambah secara meyakinkan, sebagai tanda meluasnya program-program yang harus diselesaikan. Hingga tahun 1973/1974 sebagai akhir Pelita I jumlah ini telah meningkat menjadi Rp. 733.483.000.

Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam usaha mencapai tujuan pembangunan di sektor pertanian adalah dengan cara mengadakan kegiatan penelitian. Kegiatan ini mampu memberikan arti yang besar sekali dalam usaha meningkatkan produksi pangan yang kelak akan meningkatkan pendapatan serta taraf hidup para petani. Kegiatan ini berusaha menemukan varietes-varietes baru, khususnya tanaman pangan seperti padi, jagung maupun kacang-kacangan yang akan lebih unggul dari varietes-varietes baru yang telah ada. Yang paling menarik dari kegiatan ini adalah karena penelitian juga harus memberikan dasar yang kuat dan kokoh bagi penggunaan teknologi baru di bidang pertanian. Untuk mewujudkan upaya tersebut, ditugaskan kepada dua institusi yang bergerak di bidang penelitian yaitu Lembaga Pusat Penelitian Pertanian, serta Lembaga Penelitian Holtikultura.

Sampai pada Oktober 1973 aktivitas di bidang Penelitian Tanaman Bahan Makanan telah menggunakan biaya Rp. 160.785.000. Pembiayaan ini secara persentase mendapatkan kenaikan 49% dari biaya yang telah dikeluarkan di tahun pertama Repelita I yang berjumlah 23.649.000. Jumlah itu telah dipergunakan untuk enam kegiatan besar penelitian yakni penelitian bidang agronomi, penelitian hama dan penyakit tanaman, penelitian fisiologi tanaman, penelitian sosial ekonomi, pengembangan hasil penelitian serta pengadaan atau rehabilitasi prasarana penelitian. Jenis-jenis bahan makanan yang telah diteliti selama Pelita I, di samping juga jenis bahan makanan seperti kacang tanah, kedele, ubi kayu, ubi jalar, juga menangkut penelitian teknis penanaman, pemupukan, jenis pupuk serta penyakit dan hama tanaman. Jenis penelitian yang

lain adalah aktivitas penelitian Hortikultura yang diharapkan dapat menunjang promosi-promosi hortikultura.

Untuk membiayai lima proyek penelitian selama Pelita I telah dikeluarkan uang sejumlah Rp. 42.174.500. Berapa jenis sayuran telah dijadikan proyek penelitian di bidang ini, seperti sayur-sayuran, bawang putih, bawang merah, tomat, kobis, cabe, apel, mangga, anggur, jeruk, pisang samai tanaman hias dan bermacam-macam bunga.

Dalam usaha meningkatkan produksi pangan, pemerintah telah memberikan satu kebijaksanaan melakukan bimbingan massal atau apa yang populer dengan sebutan BIMAS. Bimbingan massal ini diharapkan dapat mempercepat berhasilnya tujuan pembangunan pertanian secara menyeluruh. Petani yang menurut statistik berjumlah 70% dari seluruh penduduk Indonesia, sebagian besar hidup dalam kekurangan. Enam puluh persen dari mereka berada di Pulau Jawa dan menyebar dengan luasnya termasuk di Jawa Timur. Memang setiap keluarga adalah pemilik-pemilik tanah pertanian, namun rata-rata mereka hanya memiliki 0,3 hektar per keluarga.

Jika produksi meningkat, maka GNP (*Gross National Product*) akan meningkat. Peningkatan GNP akan meningkatkan income per capita. Ini berarti peningkatan kehidupan masyarakat ke arah lebih layak dan baik.

Melalui BIMAS pemerintah menetapkan dua program: *Pertama*, berusaha memberikan bimbingan agar para petani menggunakan teknik pertanian yang lebih baik. *Kedua*, usaha pemerintah memberikan bantuan modal kepada para petani, baik yang berupa kredit, maupun subsidi.

Cara yang pertama lebih banyak mengarahkan kegiatannya kepada penggunaan jenis tanaman yang mempunyai hasil produksi tinggi, cara-cara baru penggarapan sawah dan bercocok tanam, pembangunan irigasi, penggunaan pupuk secara rationil, serta pemberantasan hama.

✧ Cara yang kedua adalah yang sangat menarik sekali yakni dengan memberikan subsidi serta kredit kepada petani. Subsidi lebih banyak dilaksanakan melalui harga pembelian pupuk. Sedangkan kredit adalah berupa peminjaman uang sebagai modal kerja. Institusi-institusi yang diberi tanggung jawab untuk suksesnya program ini adalah Departemen Pertanian yang membentuk petugas-petugas lapangan yang disebut Petugas Pertanian Lapangan, serta Bank Rakyat Indonesia yang terkait dengan teknis-teknis dalam rangka pemberian kredit.

Selama pelita I untuk program peningkatan produksi pangan yang telah dilaksanakan melalui program BIMAS meliputi: Padi, Palawija, Kaps dan lain-lainnya, yang dikembangkan melalui Badan Usaha Unit Desa. Hingga akhir Pelita I telah berjumlah 576 BUUD tersebar di seluruh Jawa Timur. Untuk program bantuan modal bagi BIMAS padi dan palawija telah dikeluarka kredit sejak tahun 1971 sampai 1974 masing-masing sebesar Rp. 14.760.517.000 dan Rp. 15.393.510.000.

Tanggung jawab pengembalian ternyata dapat dilihat dengan angka-angka sebagai berikut. Untuk BIMAS Padi telah direalisir kredit selama Pelita I sejumlah Rp. 13.224.897.000 sedang yang telah dikembalikan sampai dengan November 1973 berjumlah Rp. 11.117.369.000. Untuk BIMAS palawija telah direalisir kredit Rp. 13.390.000.000 dan telah dikembalikan Rp. 11.258.825.000.

Badan Usaha Unit Desa (BUUD) adalah satu bentuk konkrit dari pelaksanaan pasal 33 UUD 1945. Bahan Usaha ini bergerak di sektor pertanian sebagai satu reorganisasi koperasi pertanian yang akan dipelihara sedemikian rupa sehingga kelak menjadi koperasi pertanian serba usaha. Daerah kerja BUUD adalah sebuah unit desa, yaitu suatu daerah kesatuan ekonomis yang meliputi persawahan BIMAS antara 600-1000 hektar. Sebagai pola ekonomi desa yang baru yang mengorganisir para petani produsen, BUUD di Jawa Timur baru dimulai pada tahun 1972. Tahun itu dicoba didirikan 22 buah BUUD yang kelak

akhirnya ternyata telah memberikan bantuan yang pesat bagi pembangunan pertanian.

Pada permulaan tahun 1973 BUUD meningkat menjadi 496 buah dan sampai dengan akhir Oktober 1975 bertambah menjadi 667 BUUD yang telah beroperasi dengan baik, di antaranya 96 buah telah menjadi KUD dan sebuah pusat KUD. Sebagai koperasi pertanian, BUUD ternyata telah memberikan bantuan yang banyak sekali kepada usaha-usaha Pemerintah sesuai dengan tugas-tugasnya seperti membantu mengadakan penyuluhan, menyalurkan sarana produksi, memberikan kredit bahkan mengusahakan processing dan pemasaran hasil-hasil pertanian. Sampai pada akhir Pelita I peralatan-peralatan yang dimiliki BUUD untuk mendukung kegiatannya hanya terdiri dari 225 buah rice milling unit/huller, 113 lantai penjemuran, 99 buah gudang serta 212 moisture tester. Walaupun demikian dalam rangka pengadaan pangan stock nasional di tahun 1973, BUUD telah melakukan pembelian beras sebanyak 140.638 ton serta penyerahan kepada Dolog beras sejumlah 118.26 ton. Dari 413 BUUD yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, 369 buah diantaranya telah memperoleh keuntungan sejumlah 257.619.205,78 sementara 20 buah di antaranya mengalami kerugian Rp. 15.730.297,68. Aktivitas yang menunjang dari badan ini nampak sekali pada akhir tahun 1973 ketika ternyata 116 BUUD telah dapat memasarkan 5.500 ton beras.

Di tahun 1973/1974 untuk kegiatan pengadaan pangan, melihat hasil-hasil positif yang telah dibuktikan BUUD sampai akhir 1973, Lembaga Jaminan Kredit Koperasi di Jawa Timur telah menyediakan jaminan anggaran kepada seluruh BUUD sejumlah Rp. 4.420.565.280. Keberhasilan dalam sektor pertanian itu terus ditingkatkan dalam Repelita berikutnya guna mencapai tujuan dari sektor pertanian yaitu tercapainya swsembada pangan dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama.

Dalam Pelita III dan IV pembangunan sektor pertanian terus ditingkatkan dengan berlandaskan pada TRILOGI Pembangunan dengan sasaran yang lebih menonjol kepada segi

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial.

Dalam sektor pertanian tujuan dan usaha ditingkatkan dalam rangka meningkatkan produksi pangan, peningkatan ekspor, meningkatkan penghasilan petani dan memungkinkan dukungan yang kuat terhadap pembangunan industri.⁴

Khususnya dalam produksi pangan diupayakan dalam peningkatan produksi beras, palawija, produksi pangan yang berasal dari hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan guna mencukupi kebutuhan pangan menuju swasembada sekaligus memperbaiki mutu makanan khususnya memperbesar penyediaan protein, baik nabati maupun hewani. Di samping itu produksi pangan juga diarahkan untuk memperbaiki tingkat hidup petani, memperluas kesempatan kerja dan menjamin penyediaan pangan untuk masyarakat pada tingkat harga yang layak bagi petani produsen maupun konsumen.

Dalam Repelita III dan IV pembangunan sektor pertanian sebagaimana diamanatkan dalam GBHN bertujuan meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat, yang semakin merata dan adil serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di Jawa Timur sektor pertanian selama Pelita III juga mendapat prioritas utama dengan arah kebijaksanaannyaditunjukkan kepada:

- Peningkatan produksi dan pendapatan petani
- Meningkatnya pendapatan negara berupa devisa
- Terciptanya perluasan lapangan kerja yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Keterampilan dan kesediaan petani dalam menerapkan teknologi baru adalah usaha mempertinggi produksi dan pendapatannya, sehingga turut meningkatkan produksi lain

yang berkaitan sektor pertanian seperti pupuk, obat-obatan dan pengamanan hasil komoditi yang telah menjadi kebutuhan mutlak bagi petani.

Hal itu juga ditunjang dengan adanya Wilayah Unit Desa (WILUD) yang dilengkapi dengan KUD dan BRI Unit Desa telah memberi kemudahan petani dalam meningkatkan produksi dan pemasarannya.

Dalam Pelita III sektor pertanian Jawa Timur telah memberikan sumbangan terhadap target produksi nasional sebagai berikut:

- Padi beras	sebesar	19,73 %
- Jagung	sebesar	44,99 %
- Kedele	sebesar	55,23 %
- Daging	sebesar	24,63 %
- Telur	sebesar	22,23 %
- Susu	sebesar	36,54 %
- Ikan	sebesar	10 %
- Gula	sebesar	69 %

Meningkatnya produksi sektor pertanian tersebut juga sekaligus meningkatkan sektor industri lain yang berkaitan dengan pertanian seperti: bidang produksi, sarana produksi, ketenagakerjaan, perdagangan dan koperasi. Dalam bidang industri yang berkaitan dengan pertanian adalah dalam upaya meningkatkan hasil olahan agar mutu komoditas secara ekonomis lebih tinggi nilainya, seperti penggilingan padi, pengolahan tapioka, pengolahan ikan, pengolahan susu, pengolahan daging, dan yang lebih besar seperti pabrik rokok, pabrik gula, dan pengolahan minyak kelapa.

Selama Pelita II kedudukan sektor pertanian terhadap sektor lain dalam rangka menyumbang pendapatan daerah, dapat dilihat pada tabel 11. Sedangkan potensi peruntukan tanah untuk berbagai sektor pertanian, dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 11
Perkembangan GRDP Sektor Pertanian
Jawa Timur Dalam Pelita III

Uraian	GRDP Pelita III (jutaan rupiah)				Rata-rata Per Tahun	Kenaikan Rata-rata
	1979	1980	1981	1982		
Tnm. Pangan	1.882.568	2.050.568	3.219.281	2.001.434	2.288.368	9,36 %
Peternakan	142.933,4	150.794,7	159.088,4	167.838	155.163,6	5,5 %
Perikanan	50,887	48,315	51,614	54.701,2	51.379,3	2,58 %
Perkebunan	278.844	246.214	283.146,1	325.618	283.455,5	6,1 %
Jumlah untuk sektor perta- nian	2.355.232,4	2.495.891	3.713.129,5	2.549.591,2	2.778.461,2	7,8 %

Sumber: Repelita IV Jawa Timur. Buku IIA hlm. 8.1-6

Tabel 12
Peruntukan Tanah Di Jawa Timur

PERUNTUKAN TANAH	AREAL YANG TERSEDIA (HA)
Sawah	1.247.421,75
Tegal	1.187.695,50
Setlemen	641.792,75
Perkebunan	164.252,50
Kebun Campur	43.077,75
Kebun Sayur	18.858,25
Hutan	1.208.057,50
Kolam	30.191,25
Waduk	1.700,50
Tegalan	289,00
Rawa	20.068,50
Tanah Rusak	170.977,00
Tanah Tandus	15.157,25
Penggaraman	7.230,75
Tanah Tambak	22.500,75
Lain-lain	13.029,25

Sumber : Repelita IV Jatim, Buku IIA. hlm. 8.1-11

Seperti halnya dalam pelita III dalam Pelita IV, sektor pertanian masih merupakan titik sentral pembangunan di negara kita. Dalam Pelita IV target pencapaian sektor pertanian adalah tercapainya Swasembada pangan termasuk protein, lemak, vitan, harus terlampaui secara mandiri dan berkesinambungan. Untuk mencapai sasaran tersebut di Jawa Timur dilaksanakan dengan memanfaatkan sepenuhnya segala potensi yang ada.

Penduduk Jawa Timur dalam sensus tahun 1980 telah mencapai 29.188.852 jiwa atau sekitar 30 juta jiwa pada awal Pelita IV 91.984). Dari jumlah tersebut jumlah rumah tangga terdiri dari 6.478.680. Hal ini berarti dalam satu keluarga terdiri dari 4-5 orang. Dari jumlah rumah tangga tersebut, sebanyak 3.537.169 rumah tangga merupakan keluarga yang mengusahakan/menggarap tanah pertanian. Dari sejumlah keluarga tersebut dilihat dari segi kepemilikan dan garapannya terdiri dari 38,3% menggarap tanah kurang dari $\frac{1}{4}$ ha, 31,0% menggarap tanah antara $\frac{1}{4}$ ha - $\frac{1}{2}$ ha, dan 30,7% menggarap tanah pertanian dengan luas tanah lebih dari $\frac{1}{2}$ ha.

Hasil sektor pertanian dan peternakan Jawa Timur yang menonjol yaitu padi, jagung, kedele, kacang tanah, sayur/buah-buahan, sapi, sapi perah, kambing domba, unggas dan ternak lainnya. Sementara hasil perkebunan berupa tebu, tembakau dan karet, dari kehutanan berupa kayu jati dan dari laut berupa bandeng.

Untuk meningkatkan hasil pertanian di Jawa Timur di samping mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pertanian, juga berusaha untuk membina dan mengembangkan institusi-institusi guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan pertanian. Institusi itu meliputi: bidang pendidikan dengan berbagai sekolah pertanian (Sekolah Pertanian dan Sekolah Peternakan dan Sekolah Perikanan), bidang latihan, bidang penyuluhan pertanian, bidang pembenihan, bidang penelitian dan bidang perlindungan.

Hasil dari usaha tersebut adalah meningkatnya produksi tanaman pangan dengan hasil-hasil yang nyata. Hasil-hasil tersebut merupakan hasil positif dari perkembangan teknologi dan pengembangan areal panen serta pengembangan berbagai sarana pelayanan pembangunan.

Tabel 13
**Produksi Pertanian Tanaman Pangan Jawa Timur
Tahun 1979-1982**

KOMODITI	PRODUKSI DALAM 1000 TON			
	1979	1980	1981	1982
Padi (beras)	3.412	3.973	4.471	4.458
Jagung	1.627	1.660	1.991	1.493
Ubi Kayu	4.117	4.190	4.040	3.544
Ubi Jalar	296	278	263	226
Kacang Tanah	361	371	377	289
Kedele	361	371	377	289
Kacang Hijau	29	34	40	35
Sorghum	19	17	23	14
Sayur/buah	3.298	3.477	3.630	2.300

Sumber: Repelita IV Jawa Timur Buku IIA hlm. 8.1-15

Dilihat dari tabel 13 tersebut, beberapa komoditi khususnya produksi palawija mengalami penurunan karena arealnya juga mengalami fluktuasi dalam setiap tahun.

Dari segi produksi perhektar produksi tanaman terutama padi setiap tahunnya selalu meningkat sebagaimana terlihat dalam tabel 14 berikut ini:

Tabel 14
Rata-rata Per Hektar Hasil Pertanian Tanaman Pangan
Jawa Timur Tahun 1979-1982

KOMODITI	TAHUN (Dalam Kwintal/Hektar)			
	1979	1980	1981	1982
Padi (beras)	24,41	27,80	29,46	30,28
Jagung	14,83	15,30	16,01	16,88
Ubi Kayu	92	96	95	93
Ubi Jalar	69	69	69	78
Kacang Tanah	8,89	9,09	9,43	9,60
Kedele	9,66	9,96	9,54	9,22
Kacang Hijau	4,71	5,10	5,18	5,72
Sorghum	15,23	13,32	16,69	15,32

Sumber : Repelita IV Jawa Timur Buku IIA hlm. 8.1-16

Meningkatnya hasil per hektar dalam berbagai komoditi tanaman pangan selama Pelita III khususnya tanaman padi (beras) tersebut kiranya telah menjadi landasan yang kuat dalam Pelita IV untuk biasa berswasembada pangan (beras)

Sebagaimana dijabarkan dalam Panca Bakti Pembangunan Pertanian bahwa tujuan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan secara nasional adalah untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, memantapkan swasembada pangan, dan meningkatkan ekspor hasil pertanian tanaman pangan, juga sekaligus memperbaiki mutu gizi masyarakat melalui penyediaan protein, vitamin lemak dan mineral nabati.

Untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian tersebut di Jawa Timur secara kuantitatif dijabarkan dalam target sasaran sebagaimana dalam tabel 15 berikut ini:

Tabel 15
Target Sasaran Produksi Tanaman Pangan Jawa Timur
Tahun 1984-1988

JENIS TANAMAN	LUAS PANEN (1000 ha)	TAHUN (produksi per 1.000 ton)				
		1984	1985	1986	1987	1988
Padi (beras)	1550	4915	5177	5346	5519	5696
Jagung	1200	2293	2403	2519	2640	2769
Ubi Kayu	425	3935	3994	4054	4115	4177
Ubi Jalar	40	278	284	291	297	303
Kacang Tanah	145	147	150	153	156	159
Kedele	400	408	432	493	496	531
Kacang Hijau	65	43	46	49	52	57
Sorghum	15	25	26	27	28	29
Sayur-sayuran	300	1114	1170	1229	1555	
Buah-buahan	152000	3114	3270	3434	3605	3780

Sumber: Repelita IV Jawa Timur Buku IIA hl. 8.1-44

Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan tersebut tentunya juga sekaligus akan meningkatkan produksi lainnya yang berkaitan dengan sektor pertanian seperti kebutuhan pupuk, kebutuhan mesin, pengolah, dan penggunaan tenaga kerja dalam sektor terkait dengan pertanian.

Khususnya untuk upaya intensifikasi, peremajaan, diversifikasi, dan rehabilitasi terutama di Pulau Jawa kebutuhan pupuk menjadi sangat menentukan. Selama Repelita IV diproyeksikan kebutuhan pupuk seperti terlihat dalam tabel 16.

Tabel 16
Kebutuhan Pupuk Jawa Timur Tahun 1984-1988

JENIS PUPUK	TAHUN (Dalam Ribuan Ton)				
	1984	1985	1986	1987	1988
Urea	113	123	134	144	149
Z.A	181	190	200	120	220
TSP	132	139	148	156	160
KCL	49	52	55	59	61

Sumber: Repelita IV Jawa Timur Buku IIA hlm. 8.1-51

Selanjutnya untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil-hasil pertanian di Jawa Timur, arah dan kebijaksanaan pembangunan pertanian terutama diarahkan untuk meningkatkan harkat dari masyarakat pedesaan. Dalam rangka menunjang hal tersebut tujuan pembangunan pertanian selama Repelita IV ditetapkan 4 (empat) langkah utama yang merupakan usaha-usaha pokok: a. Intensifikasi, b. Ekstensifikasi, c. Diversifikasi, d. Rehabilitasi.

a. Intensifikasi

Adalah usaha meningkatkan produktifitas sumber daya alam, peningkatan penggunaan teknologi tepat guna, peningkatan penggunaan tanah kering, perairan dan areal pasang surut, serta peningkatan pemanfaatan segala sarana produksi seperti air, benih unggul, dan insektisida.

b. Ekstensifikasi

Adalah usaha untuk meningkatkan luas panen dari tanaman pangan maupun perkebunan, perluasan areal penangkapan ikan dengan perluasan budidaya ikan, perluasan penanaman rumput unggul untuk makanan ternak, mengembalikan tanah yang telah menjadi areal tanah kritis, serta perluasan sumber daya lainnya.

c. Diversifikasi

Dimaksudkan adalah keanekaragaman dalam usaha tani baik secara vertikal mulai produksi sampai pemasaran maupun secara horisontal yang merupakan imbalan pengembangan antar berbagai komoditi dan wilayah. Juga diterapkan dalam menerapkan dan pemilihan lokasi pembangunan, artinya diversifikasi juga diperhatikan dalam pengembangan wilayah sehingga terjadi keseimbangan antara daerah maju dan daerah yang sedang tumbuh.

d. Rehabilitasi

Ini adalah kegiatan pemulihan kemampuan daya produktivitas sumber daya pertanian yang kritis serta membahayakan kondisi lingkungan dan pemilihan kemampuan berproduksi usaha tani masyarakat di daerah-daerah rawan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut.

Sebagai realisasi untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh melalui struktur Program dan Proyek. Adapun program-program pembangunan sektor pertanian di Jawa Timur ditempuh melalui delapan program yang lebih dikenal dengan istilah 5p + 3 k yaitu:

- 1) Program pembangunan pertanian dan industri kecil (pangan)
- 2) Program perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja (pekerjaan)
- 3) Program pencukupan prasarana ekonomi dan produksi (prasarana)
- 4) Program pembangunan perumahan dan lingkungan pemukiman (perumahan)
- 5) Program pendidikan dan peningkatan ketrampilan (pendidikan)
- 6) Program kesehatan dan kependudukan (kesejahteraan)

- 7) Program kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana (kesehatan)
- 8) Program kelestarian dan pengawetan lingkungan hidup (kelestarian).

Untuk pembiayaan sektor pertanian di Jawa Timur dalam Repelita IV dapat dilihat dalam tabel 17 berikut ini:

Tabel 17
Biaya Sektor Pertanian Tahun 1984-1989

Sub Sektor	1984	1985	1986	1987	1988	1989
DARI APBN						
- Tanaman Pangan	6.635	7.836	9.302	11.013	13.039	47.845
- Peternakan	2.703,9	3.185,4	3.666,9	4.148,4	4.629,8	18.334,4
- Perikanan	1.135	1.305,9	1.501,8	1.727,1	1.986,2	7.656,6
Perkebunan	4.130	5.200	6.550	8.260	10.410	34.550
Jumlah	14.604,5	17.547,3	21.020,7	25.148,5	30.065	108.386
Dari APBD						
- Tanaman Pangan	2.928	3.467	4.105	4.861	5.755	21.116
- Peternakan	1.368,9	1.612,7	1.856,4	2.100,2	2.343,9	9.282,1
- Perikanan	2.805,3	3.226,1	3.710	4.266,5	5.106,5	19.114,4
Perkebunan	970	1.220	1.530	1.940	2.440	8.100
Jumlah	8.072,2	9.525,8	11.210,4	13.167,7	15.645,4	57.612

Sumber: Repelita IV Jawa Timur Buku IIA hlm. 8.1-63

Adapun proyek-proyek yang dikembangkan dalam sektor pertanian tanaman pangan di Jawa Timur selama pelita IV meliputi:

- a) Proyek Bimas/Inmas
- b) Proyek Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
- c) Proyek Perlindungan Tanaman Pangan
- d) Proyek Pengawasan dan Sertifikasi Benih
- e) Proyek Pengembangan Produksi

- f) Proyek Pendidikan dan Latihan Pertanian
- g) Bagian Proyek Pembinaan Pertanian Pangan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dalam penyediaan lapangan kerja sektor pertanian di Jawa Timur selama Repelita IV dapat dilihat dalam tabel 18 berikut ini;

Tabel 18
Kesempatan Kerja Sektor Pertanian Jawa Timur
Tahun 1984-1988

No.	Sub Sektor	1984	1985	1986	1987	1988
01	Pert. Tanaman Pangan	60.691	70.065	71.466	72.985	74.354
02	Peternakan	55.814	57.7355	9.655	61.576	63.496
03	Perikanan					
	Nelayan	148.500	148.500	148.500	147.500	147.00
	Petani Ikan	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
04	Perkebunan	1212.650	1225.466	1239.679	1225.481	12273026
05	Kehutanan	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000

Sumber: Repelita IV Jawa Timur Buku IIA hlm. 8.1-64

4.2 Tanaman Perkebunan

Tahun 1969 adalah awal Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama, atau lebih populer disebut REPELITA. Baru saat ini pula kita mempunyai kesadaran yang dalam akan arti tanah-tanah perkebunan sebagai suatu kekayaan. Karena itu tanah perkebunan harus dikembangkan dan dibangun yang lebih baik guna kebutuhan pembangunan.

Untuk membenahi tanah-tanah perkebunan di Jawa Timur melibatkan tim ekspedisi yang dipelopori oleh tujuh instansi. Lembaga "Peningkatan produksi Perkebunan Besar Negara" ditangani oleh PNP/PTP, sedangkan Inspektorat Perkebunan bertugas menangani Peningkatan perkebunan Swasta. Unit-unit Balai Penelitian Perkebunan di Jember melaksanakan

penelitian perkebunan, Lembaga Penelitian Tanaman Industri Cabang Wilayah II Malang untuk penelitian tanaman industri, Balai Penyelidikan perusahaan perkebunan Gula untuk penelitian gula, sementara penelitian tembakau ditangani oleh Koordinasi Research Tembakau di Jember.

Untuk tujuan yang besar itu para perencana telah menetapkan pentahapan-pentahapan sebagai berikut: pertama, (1969--1973) disebut sebagai periode menuju Swasembada; kedua (1974--1978) disebut Periode Perkembangan Industrialisasi; Ketiga (1978 dan seterusnya) disebut sebagai periode Ekspor Hasil Jadi.

Untuk tahap pertama usaha itu telah diperinci dalam beberapa bidang, seperti bidang produksi, bidang organisasi dan manajemen, bidang pemasaran, bidang penelitian dan bidang pembiayaan. Tentang bidang produksi usaha pemerintah adalah menjalankan apa yang disebut Panca Usaha Perkebunan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Balai Penelitian Perkebunan di Bogor dan Cabang Jember serta Balai Gula Pasuruan.

Dalam bidang organisasi dan manajemen telah dilaksanakan secara bertahap pengalihan bentuk dari bentuk PNP menjadi bentuk Pesero (PTP) sesuai dengan yang telah digariskan dalam ketetapan MPRS No. XXIII/MPRRS/1966.

Di bidang pemasaran diadakan penelitian pemasaran di daerah-daerah yang baru, penyederhanaan dan modernisasi disesuaikan dengan permintaan pasar, mendekati calon-calon pembeli di luar negeri, dan diusahakan informasi perkembangan harga di pasar secara *up to date* dan *multi business* sebagai penunjang usaha tanaman tunggal yang mengandung resiko seperti tembakau, kapas dan sebagainya.

Di bidang penelitian dilakukan cara-cara yang dapat mempercepat proses pengolahan, menganalisa kesuburan tanah, serta menguji alat-alat pengolahan baru. Kerjasama dalam bidang ini telah dilakukan bersama dengan beberapa tim asing. Seperti *Team Perancis Sogreah-Sodeci* di PNP Gula. *Team Jepang* untuk usaha tembakau dan *Team ILCO* untuk

research kapas, juga diadakan kerja sama dengan beberapa tim di dalam negeri.

Dalam bidang pembiayaan diusahakan dari sumber-sumber dan dana-dana intern perusahaan sendiri, seperti penyusutan, rehabilitasi, dan dana keuntungan cadangan secara umum. Sementara itu kurangnya biaya dapat diperoleh dengan kredit investasi jangka panjang dan jangka menengah, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Di daerah Jawa Timur tanaman perkebunan yang dikenal adalah karet, kopi, coklat, teh, tebu, tembakau, dan kapas.

Karet pada dekade terakhir ini mulai disaingi oleh adanya karet sintetis. Karet alam mencatat angka permintaan di tahun 1973 sebanyak 3,8 juta ton. Sebelum Pelita I produksi karet berkisar pada 5.557 ton tetapi setelah diadakan usaha-usaha peningkatan selama pembangunan, angka itu telah berubah menjadi 6.759 ton. Ini disebabkan karena dilaksanakannya intensifikasi peremajaan, serta penerbitan sadapan. Harga ekspor karet di tahun 1973 mengalami peningkatan 172% dibanding dengan tahun 1969.

Hasil kopi di Jawa Timur selama Pelita menikmati harga yang menarik, karena berkurangnya produksi kopi Brasilia. Dari keseluruhan ekspor kopi nasional yang berjumlah 108.853 ton, Jawa Timur telah memberikan 20.786 ton. Sebelum Pelita I hasil kopi daerah Jawa Timur hanya menunjukkan angka 5.336 ton. Tetapi setelah Pelita I hasil itu mengalami kenaikan menjadi 8.061 ton, pertahun.

Dalam usaha perkebunan coklat juga mengalami kenaikan, baik perluasan areal maupun peningkatan hasil per hektar. Hasil produksi dari 780 kg/ha menjadi 1500 kg/ha atau naik sekitar 120%, sedangkan hasil pertahun dari 1.302,1 ton tahun 1972 menjadi 10.000 ton pertahun.

Ekspor teh di Jawa Timur mengalami kenaikan 45.000 ton pertahun, walaupun ada persetujuan pembatasan ekspor teh internasional. Usaha perbaikan dalam pemetikan serta pemupukan kloon-kloon baru nampaknya hasil produksi teh yang dimasa sebelum Pelita hanya menunjukkan jumlah 387 ton

pertahun setelah Pelita I menjadi 462 ton pertahun. Kuantitas produksi selama Pelita I telah menjadi 1.014 kg/ha dari 904 kg/ha, sementara dibidang harga terjadi kenaikan 13,3% yaitu US\$ 0.58 di tahun 1968 menjadi US\$ 0.77 di tahun 1973.

Tanaman kapas dan cengkeh belum mendapat posisi yang baik karena dalam pemasaran di luar negeri jenis ini masih kurang baik. Hasil kapas dan cengkeh lebih banyak dipergunakan untuk konsumsi dalam negeri. Tanaman cengkeh memang merupakan komoditi kita yang masih muda namun demikian telah mengalami kenaikan yang cukup meyakinkan dari 1,2 ton di tahun 1968 menjadi 134 ton pertahun di tahun 1973.

Tanaman tebu merupakan hasil yang utama di daerah Jawa Timur. Hasil tebu mengalami kenaikan walaupun belum memenuhi target yang ditetapkan. Kenaikan produksi merupakan hasil usaha perbaikan dalam bidang pengairan, penggunaan bibit unggul dengan analisa daun, pemberantasan hama penyakit dengan rumput-rumput liar, perbaikan dan restorasi alat-alat tua sehingga *rendement* dapat dinaikkan. Pendirian pabrik hasil sampingan baru dilakukan pada pabrik alkohol, sementara pabrik sampingan lain seperti *hardboard*, kertas, dan makanan penguat ternak masih akan dilaksanakan pada Pembangunan Lima Tahun ke II. Berdasarkan penelitian PT Agriconsult Internasional dan para ahli dari BP3G untuk tanaman tebu ini dapat disusun rencana yang lebih mantap lagi.

Untuk lebih meningkatkan produksi gula serta meningkatkan pendapatan para petani tebu, pemerintah mulai tahun 1975 mengambil langkah-langkah untuk mengalihkan perusahaan tanaman tebu produksi pabrik gula di atas tanah sewa ke arah tanaman tebu rakyat intensifikasi dan yang diikutsertakan dalam pelaksanaan intensifikasi ini adalah BUUD. Pada akhir Pelita II, pabrik gula sudah tidak lagi mengadakan persewaan tanah untuk tanaman tebu akan tetapi kebutuhan tebu dari semua pabrik gula akan dipenuhi oleh tebu hasil tanaman tebu rakyat intensif.

Tembakau di Jawa Timur telah ditanam dalam berbagai jenis. Dan telah memberikan harapan yang baik bagi

masyarakat dan pemerintah. Beberapa jenis tembakau itu antara lain seperti, tembakau Besuki NO (PNP 27), tembakau Lumajang VO (Perw. PTP 19) menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang sangat baik. Tetapi jenis tembakau Virginia FC (Perw. PTP 19) kurang menarik buat pemakaian luar negeri kecuali bagi pemasaran lokal. Ini mengakibatkan turunnya produksi sampai 57% selama Pelita I. Sebaliknya tembakau Besuki memperlihatkan kenaikan dalam output perhektar dari 8998 kg perhektar di tahun 1968 menjadi 1.046 kg perhektar di tahun 1973, kurang lebih 25% kenaikannya.

Tabel 19
Produksi Perkebunan di Jawa Timur

Tahun	Karet (Ton)	Kopi (Ton)
1969	19.235	13.056
1970	19.281	45.450
1971	19.217	17.839
1972	19.586	21.939
1973	19.708	9.264
1974	20.409	14.993
1975	19.337	14.452

Tahun	Coklat (Ton)	Teh (Ton)
1969	644	2.068
1970	746	1.913
1971	827	2.077
1972	943	2.390
1973	732	3.049
1974	1.995	3.203
1975	2.629	3.421

Tahun	Cengkeh (Ton)	Tebu (Ton)
1969	1	452.245
1970	65	462.923
1971	41,5	524.068
1972	136,5	578.340
1973	98	537.983
1974	16,4	661.769
1975	127,64	605.985

Tahun	Tembakau (Ton)	Kapas (Ton)
1969	5.246	263
1970	4.817	197
1971	4.774	148
1972	4.871	353
1973	4.841	906
1974	5.332	1.645
1975	5.178	1.262

Sumber : Metropolitan Surabaya dan Jawa Timur hlm. 334-336

Perkembangan areal dan budidaya perkebunan Repelita III dan IV di Jawa Timur terus ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya areal budidaya perkebunan utama di Jawa Timur hingga tahun 1982 mencapai 869,15 ha atau lebih kurang 27,2% dari luas tanah pertanian di Jawa Timur atau lebih kurang 18,15% dari luas daerah Jawa Timur, hal ini berarti naik 2,265 dibanding Pelita II yang luas arealnya 707.442 ha.

Tabel 20
Luas Areal Tanaman Perkebunan Utama
Jawa Timur 1978--1982

Tanaman	TAHUN (Dalam Hektar)					Rata-rata
	1978	1979	1980	1981	1982	Kenaikan
Tanaman Semusim						
1. Tebu	89.298	101.194	106.280	107.858	145.956	13,79
2. Tembakau	89.918	98.177	96.473	80.613	114.033	16,34
3. Serat Karung	831	1.280	1.248	3.634	3.897	62.49
4. Kapas	500	1.600	1.104	3.661	5.317	124,21
Tanaman Tahunan						
1. Kelapa	234.294	239.273	241.127	276.007	274.133	4,17
2. Kapok Randu	127.450	128.948	131.705	133.360	132.743	1,02
3. Kopi	67.600	70.631	72.659	83.611	75.403	2,64
4. Cengkeh	21.804	30.080	32.251	40.034	36.435	2,64
5. Karet	34.506	33.509	31.160	30.518	30.518	3,00
6. Jambu Mente	21.102	22.263	23.963	25.794	25.651	5,06
7. Coklat	9.313	11.567	12.214	12.688	12.239	7,53
8. Siwalan	7.578	8.443	9.504	10.078	10.150	7,72
9. Teh	3.248	2.806	3.090	3.331	3.325	1,03
Jumlah	526.895	547.520	557.931	674.962	601.716	3.99
Jumlah Total	707.442	749.771	763.036	870.278	869.489	2,26

Sumber: Repelita IV Jawa Timur Buku IIA hlm. 8.1-23

Tabel 21
Perkembangan Produksi Perkebunan Terpenting
Jawa Timur 1978 -- 1982 (Dalam Ton)

Komoditi						Rata-rata % Kenaikan
	1978	1979	1980	1981	1982	
1. Kopra	130.541	137.190	143.047	150.488	145.260	2,77
2. Kopu	25.505	27.545	29.998	35.131	29.510	4,50
3. Karet	18.627	19.640	21.968	22.907	19.967	2,18
4. Coklat	4.001	5.928	7.349	7.568	5.973	13,51
5. Serat Kapok	15.796	16.894	17.455	22.477	23.877	11,32
6. Cengkeh	3.786	968	4.148	2.584	2.899	44,76
7. Teh	4.336	4.204	4.254	3.487	3.236	-2,25
8. Tembakau	33.260	56.568	43.402	52.318	66.442	23,59
9. Gula	715.261	810.455	754.093	736.555	1.035.654	12,33
10. Serat Kapas	293	1.314	636	1.597	2.229	122,26
11. Biji Mente	2.872	3.273	3.784	3.895	4.947	14,88
12. Serat Karung	836	1.603	4.343	5.504	4.975	74,75
Jumlah	952.113	1.085.582	1.031.477	1.044.511	1.344.969	9,7

Sumber: Repelita IV Jawa Timur Buku IIA hlm. 8.1-23

Dengan semakin meningkatnya produksi perkebunan melebihi kebutuhan konsumsi di dalam negeri, memberikan peluang pada peningkatan volume ekspor. Di Jawa Timur ekspor komoditi perkebunan selama Pelita III terus meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,89%. Volume pada masing-masing komoditi dapat dilihat dalam tabel 22 berikut ini.

Tabel 22
Perkembangan Volume Ekspor Perkebunan
Tahun 1978--1982

Komoditi	Tahun (Dalam Ton)					Rata-rata %
	1978	1979	1980	1981	1982	Kenaikan
Karet	18.198	18.198	17.373	17.067	19.718	2,16
Kopi	23.293	35.037	20.197	30.822	23.087	8,89
Tembakau	16.901	19.139	18.525	19.039	14.785	-2,38
Bungkil Kopra	151.893	131.309	156.200	125.053	123.505	-3,94
Tetes Cair	145.382	177.685	86.203	116.127	248.035	29,76
Biji Coklat	733	1.560	1.976	1.137	2.765	60,05
Minyak Kelapa	-	-	5.305	20.631	12.562	124,89
Teh	2.908	2.281	2.447	2.314	2.252	-5,60
Lain-lain	993	4.710	5.165	12.526	22.932	152,39
Jumlah	360.241 (48,59%)	390.916 (34,55%)	323.757 (39,92%)	336.716 (38,19%)	470.641 (49,88%)	8.78
Jawa Timur	741.238 (100%)	1.131 (100%)	810.840 (100%)	881.551 (100%)	943.367 (100%)	12.88

Sumber: Repelita IV Jawa Timur Buku IIA hlm. 8.1-23

Produksi perkebunan secara keseluruhan telah menunjukkan kenaikan selama Pelita III dan mencapai kenaikan rata-rata setiap tahun sebesar 9,77%. Perkembangan yang baik terutama terjadi dalam perkebunan-perkebunan besar. Untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan guna mengejar ketinggalan produksi perkebunan rakyat telah dikembangkan proyek perkebunan rakyat dengan pola terpadu menggunakan teknologi baru seperti bibit unggul, pupuk, insektisida dan pengolahan hasil yang lebih baik.

Pertumbuhan volume ekspor komoditi perkebunan selama Pelita III rata-rata mencapai 8,7% setiap tahun. Kenaikan harga komoditi perkebunan seperti karet, kopi, teh, coklat dan lain-lainnya di pasaran dunia ditambah dengan kebijaksanaan

Pemerintah dalam rangka mendorong pengembangan ekspor telah pula dapat menaikkan penerimaan petani.

Untuk usaha perkebunan di Jawa Timur dapat dikategorikan 3 kelompok yaitu: (a) Perkebunan yang diusahakan oleh Negara (PNP/PTP); (b) Perkebunan yang diusahakan oleh Swasta (Perkebunan Besar Swasta); (c) Perkebunan yang diusahakan oleh rakyat (Perkebunan Rakyat).

Perkebunan rakyat dalam melakukan usahanya mencakup areal + 760.250 ha dengan rata-rata pemilikan tanah antara 0,3--0,5 hektar. Sedangkan untuk perkebunan yang diusahakan oleh negara (PNP/PTP) dan perkebunan besar swasta perkembangan unit usahanya dapat dilihat dalam tabel 23 berikut:

Tabel 23
Perkembangan Perkebunan Milik PNP/PTP
Dan Perkebunan Besar Swasta Selama Pelita III

NO.	TAHUN	JUMLAH PNP/PTP (unit)	JUMLAH PERK.BESAR SWASTA	KETERANGAN
01.	1979	88	106	Telah digabung
02.	1980	88	106	
03.	1981	88	106	
04.	1982	71*	106	
05.	1983	71*	106	

Sumber: Repelita IV Jawa Timur

Tabel 23 menunjukkan bahwa kebun PNP/PTP dari tahun 1979--1981 tidak mengalami kenaikan. Dari sejumlah 88 unit perkebunan tersebut terbagi dalam 55 unit kebun milik PTP XXIII, XXVI, XXIX yang merupakan budi daya gunung, sedangkan 33 unit kebun lainnya merupakan pabrik gula yang dimiliki oleh PTP XX, XXI, XXII, XXIV, XXV yang merupakan budidaya daratan. Tahun 1982--1983 turun sekitar

20% karena adanya beberapa kebun PNP/PTP yang digabungkan menjadi satu.

Untuk perkebunan besar milik swasta sejak tahun 1979-1983 jumlahnya tidak mengalami perubahan. Hal ini karena semuanya merupakan tanaman budidaya gunung yang terbesar di wilayah eks Karesidenan Besuki, Malang, Kediri, madiun dan Surabaya

Sejalan dengan perkembangan areal, dalam Repelita IV di Jawa Timur terjadi peningkatan produksi sebagai berikut:

Tabel 24
Proyeksi Produksi Perkebunan
Di Jawa Timur Tahun 1984 -- 1988

Komoditi	TAHUN (Dalam Ton)				
	1984	1985	1986	1987	1988
Kopra	185.990	196.630	198.548	200.087	229.030
Kopu	39.300	46.800	48.200	49.670	50.500
Karet	25.800	26.280	26.620	25.460	25.760
Coklat	6.500	7.630	8.950	11.090	11.100
Kapuk	22.800	34.300	35.350	36.450	37.500
Cengkeh	7.100	7.800	10.000	10.750	11.600
Teh	4.800	5.020	5.050	5.090	5.100
Gula	1.111.750	1.167.300	1.225.700	1.287.000	1.351.300
Tembakau	62.200	62.800	63.450	64.100	64.750
Biji Mente	9.150	9.950	11.050	12.250	13.500
Serat Karung	10.650	12.650	15.000	17.800	21.000
Serat Kapas	10.650	12.650	15.000	17.800	21.000

Sumber: Repelita IV Jawa Timur Buku IIA hlm. 8.1-47

4.2 Industri

Jawa Timur merupakan daerah padat industri sebab lebih kurang 23% industri yang ada di Indonesia berada di Jawa Timur. Industri tersebut meliputi berbagai jenis industri seperti

industri kecil (industri perumahan), industri sedang (industri menengah) dan industri besar (industri pabrik).

Pembangunan sektor industri kecil di Jawa Timur diarahkan untuk berkembang menjadi lebih besar, sedangkan industri besar sebaliknya diarahkan untuk dapat memberikan landasan-landasan hidup pada industri-industri kecil, baik yang telah ada maupun yang baru, untuk memberikan kesempatan kepada wiraswasta terutama yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah. Termasuk industri kecil meliputi industri tekstil, industri pakaian jadi, industri kulit dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam industri besar seperti pabrik makanan, minuman, tembakau (rokok) dan sebagainya. Di samping itu terdapat industri sedang seperti industri kayu/barang dari kayu, perabot rumah tangga, kertas/barang kertas, percetakan dan penerbitan.

Menurut catatan Dinas perindustrian provinsi Jawa Timur, jumlah perusahaan industri sampai akhir tahun Pelita I (1975) tercatat sejumlah 10.083 unit, berbanding 8.658 unit pada tahun sebelumnya. Jumlah ini diikuti pula dengan kenaikan karyawan industri 269.300 orang (1974) menjadi meningkat 278.142 karyawan industri (1975). Jumlah unit kerajinan rakyat tahun 1973/1974 196.953 unit, berkembang menjadi 222.000 unit dalam tahun 1974/1975. Dan pengrajin pada tahun 1974 berjumlah 312.013 pengrajin, berkembang menjadi 342.000 pengrajin ditahun 1975.

Di bidang investasi berdasarkan Undang-Undang tentang PMA dan PMDN, dominasinya ada pada PMDN. Dapat diuraikan bahwa sektor pembangunan industri pada hakekatnya kita tidak tergantung dari modal asing. Gejala sedemikian perlu diusahakan dan tetap dipertahankan. Dapat dikemukakan menurut catatan adanya 59 unit PMA yang menelan modal Rp. 20.060,5 juta (US\$ 48.338), berbanding 326 unit PMDN dengan sebesar Rp. 22.728.072 juta.

Khusus di daerah Kotamadya Surabaya, dapat pula dikemukakan adanya kenaikan dan peningkatan unit-unit

produksi. Untuk industri makanan, minuman dan tembakau misalnya terdapat kenaikan jumlah: 437 unit (1970), 510 unit (1973), 542 unit (1975) dan meningkat lagi menjadi 551 unit per 31 Juli 1976.

Jumlah industri di Surabaya, yang meliputi industri-industri tekstil dan kulit, industri kayu dan barang-barang dari kayu, industri kertas percetakan dan penerbitan, industri kimia, karet dan plastik, industri barang-barang galian buan logam, industri barang-barang logam (bukan besi), industri logam, mesin dan perlengkapannya dan industr-industri permata dan lain-lain pada umumnya menunjukkan kenaikan. Hal ini dilihat dari angka kenaikan sebagai berikut: 1970 terdapat 1902 industri (42.770 karyawan), tahun 1975 telah melonjak menjadi 2.398 industri (70.858 karyawan), dan naik menjadi 2.422 industri dengan 72.131 karyawan per 31 Juli 1976.

Gambaran perusahaan Industri PMDN di wilayah Kotamadya Surabaya sampai dengan 31 Juli 1976, aplikasi yang disetujui tercatat 143 perusahaan dengan modal Rp. 49.605.890 juta. Tetapi yang sudah direalisir per 31 Juli 1976 meliputi 90 perusahaan dengan modal Rp. 21.022.785 juta. Sedangkan industri yang masuk golongan PMA untuk periode yang sama tercatat 25 perusahaan industri dengan investasi sebesar US\$ 42.910.960.000 atau Rp. 4.768.830 juta. Namun yang sudah direalisir per 31 Juli 1976 ada sebanyak 18 industri dengan modal US\$ 16.412.923.000 dan Rp. 1.563.187 juta.

Berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan industri di Jawa Timur, memberikan kesan adanya peningkatan maupun perbaikan dalam banyak hal. Ini wajar, sebab di samping semakin meningkatnya perkembangan teknologi, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Jawa Timur telah memberikan dorongan dan garis-garis kebijaksanaan ke arah perkembangan itu.

Kondisi Jawa Timur, dengan Surabaya sebagai sentralnya sebenarnya sudah sejak lama dikenal sebagai daerah industri. Berbagai jenis industri, dengan modal dan peralatan sederhana,

sampai yang bermodal “raksasa”, dengan peralatan super modern, dewasa ini bertebaran baik di kota maupun di pelosok-pelosok daerah.

Potensi Jawa Timur memungkinkan industri di daerah ini berkembang baik. Selain kaya akan tenaga kerja, Jawa Timur memiliki sumber-sumber alami baik dari laut maupun buminya, baik yang agraris maupun yang ekstratip, seperti halnya hasil-hasil pertambangan. Belum semua potensi ini digarap oleh tangan manusia. Pertumbuhan dan pengembangan industri telah digariskan oleh Pemerintah Daerah meliputi tiga hal: (1) Pengembangan wilayah industri; (2) Pembinaan industri kecil dan kerajinan rakyat; (3) Kecukupan prasarana.

Selama Pelita I, Jawa Timur mendapat anggaran sejumlah Rp. 160.278.500 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk membiayai proyek-proyek industri di Jawa Timur. Sementara itu Pemerintah Daerah Jawa Timur telah pula mengeluarkan anggaran sejumlah Rp. 108.485.000 untuk pembiayaan rutin dan pembangunan sektor lain.

Diungkapkan pula sejak dimulai Pelita I hingga akhir tahun, proyek-proyek swasta yang bergerak di bidang industri dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai jumlah Rp. 185.944.930.000. Sedangkan untuk proyek-proyek Penanaman Modal Asing (PMA) telah mencapai US\$ 242.523.360.

Untuk merangsang perkembangan industri di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Jawa Timur berperan dengan kegiatan-kegiatannya meliputi: (1) Memberi informasi pada para calon investor; (2) Menyajikan data statistik mengenai perkembangan PMA dan PMDN; (3) Mengadakan press release tentang perkembangan PMA/PMDN; (4) Menerbitkan leaflet (buletin) untuk promosi penanaman modal dari luar negeri.

Selama pelita I, Dirjen Perindustrian Ringan dan Kerajaan Rakyat Departemen perindustrian telah menangani 15 proyek

di Jawa Timur. Proyek-proyek ini meliputi: Induk Pande Besi di daerah Balung-Jember, Gedog-Blitar, Tuban, Sampang; Induk Pengerjaan Bambu di daerah Cluring-Banyuwangi, Magetan; Pusat-pusat Penyediaan Pande Besi di daerah Kesamben-Blitar, Pakong-Pamekasan, Kapas-Bojonegoro; Pusat Penyediaan batik Tulis di daerah Trenggalek, Ppacitan, Ponorogo; Pilot Proyek tenun Bukan Mesin (ATBM) di daerah Bagong-Blitar, Puser-Tulungagung.

Di Jawa Timur juga membangun dan memperbesar produksi industri-industri berat (dasar) antara lain: Petromikia di Gresik, Pabrik Kertas Basuki Rahmat di Banyuwangi, Proyek Redrying Tembakau di Bojonegoro. Yang memperluas produksinya, antara lain PT. BARATA di Surabaya, PT. Boma Bisma Indra di Surabaya dan pasuruan, PT. Semen Gresik, Pabrik Kertas Leces di Probolinggo, PN. Soda Waru di Waru, PN. Iglas di Surabaya, PN. Garam di Sumenep, PN. Maduratex di Kamal dan PT. Marmer di Besole Tulungagung.

Menurut catatan Dinas perindustrian Jawa Timur, jumlah Perusahaan Industri sampai akhir tahun (1975), tercatat sejumlah 10.083 unit, berbanding 8.658 unit dari tahun sebelumnya. Jumlah unit Kerajinan Rakyat tahun 1973/1974 196.953 unit, berkembang menjadi 222.000 unit dalam tahun 1974/1975.

Perkembangan industri di tiap daerah di Jawa Timur juga menunjukkan adanya jumlah dan peningkatan di Kota Malang yang meliputi: Jumlah industri sebanyak 517 buah. Jumlah itu terdiri dari industri berat 3 buah; industri menengah 15 buah; dan industri ringan 4999 buah. Dari jumlah tersebut terbagi dalam berbagai jenis industri seperti:

- Industri makanan/minuman = 147 buah
- Industri rokok/pertembakauan = 33 buah
- Industri percetakan/grafika = 32 buah
- Industri kayu/mebel/bahan/bangunan = 113 buah
- Industri pertekstilan/rajut = 23 buah

- Industri pengolahan bahan kimia = 55 buah
- Industri kerajinan keramik = 10 buah
- Industri kerajinan alat olah raga = 14 buah
- Industri kerajinan rakyat lain = 90 buah.

Sedangkan jumlah pengusahanya terdiri dari: Pengusaha Nasional 623 orang; Pengusaha Asing 271 orang.

Dari jumlah industri tersebut tenaga kerja yang dapat ditampung meliputi: Tenaga kerja nasional 14.221; Tenaga kerja asing 15 orang.

Industri yang paling menonjol di Jawa Timur terutama adalah industri rokok. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi yang dihasilkan oleh Jawa Timur seperti di Malang terdapat beberapa jenis produk rokok antara lain:

PT. Faroka SA	=	3.626.000.000	batang
PT. PHILIP MORRIS	=	917.702.620	batang
PT. BENTOEL	=	3.785.224.000	batang
PT. GRENDEL	=	338.378.500	batang
PT. OEPET	=	338.784.000	batang
PT. ORONG-ORONG	=	165.556.400	batang
PT. SAM-SAM-SAM	=	112.141.000	batang
PT. ITIC	=	17.997.300	batang
PT. RAMBON	=	16.370.000	batang
PT. JAGUNG	=	87.682.000	batang
PT. AGUNG	=	363.144.950	batang
Lain-lain	=	26.805.160	batang

Di samping industri rokok di Malang di Jawa Timur juga terdapat pabrik rokok yang sangat terkenal yaitu Rokok Gudang Garam yang berlokasi di Kabupaten Kediri. Keberadaan pabrik rokok ini mampu menampung jumlah tenaga kerja yang cukup besar dan sekaligus memberi pendapatan perkapita kepada Jawa Timur dalam pembangunan daerah.

Sebagai gambaran produksi Rokok Gudang Garam di Kediri yang telah berdiri sejak tahun 1958 memproduksi jenis rokok antara lain:

1. Sigaret Kretek Klobot (SKL)

- Sigaret Kretek Klobot Manis isi 5 batang
- Sigaret Kretek Klobot Tawar isi 5 batang
- Sigaret Kretek Klobot Tawar isi 10 batang

2. Sigaret Kretek Tangan (SKT

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - GG Tanda mata | isi 10 batang |
| - GG Taman Sriwedari | isi 10 batang |
| - GG Taman Sriwedari Lurik | isi 10 batang |
| - GG Djaya hijau | isi 10 batang |
| - GG Merah King Size (ekspor) | isi 10 batang |
| - GG Merah King Size | isi 12 batang |
| - GG Merah King Size | isi 10 batang |
| - GG Special de Luxe | isi 20 batang |

3. Sigaret Kretek Mesin (SKM)

- | | | | |
|------------------------------------|-----|----|--------|
| - GG Filter Internasional | isi | 12 | batang |
| - GG Filter Internasional Coklat | isi | 12 | batang |
| - GG Filter Internasional Merah KZ | isi | 12 | batang |
| - GG Surya | isi | 16 | batang |
| - GG Surya | isi | 18 | batang |

(Sumber: Identifikasi Masalah Sosial Ekonomi, hlm. 47)

Pabrik rokok yang berlokasi di atas tanah seluas 132,6 hektar tersebut dalam menjaring tenaga kerja banyak menggunakan tenaga kerja penduduk setempat karena lokasi pabrik itu sendiri banyak menggunakan tanah masyarakat yang telah dibeli.

Untuk menunjang proses produksi PT. Gudang Garam memiliki 54 unit mesin dengan kecepatan produksi antara 2.200--5.500 batang rokok permenit. Di samping itu juga mesin pengemas rokok sejumlah 91 unit, terutama untuk mengemas rokok dengan variasi kecepatan antara 140--360 pak permenit.

Jumlah tenaga kerja yang tertampung mencapai 48.050 orang terdiri dari 10.401 tenaga pria dan 37.649 tenaga wanita. Hasil produksi yang dicapai oleh Perusahaan Rokok Gudang Garam pada Januari-Mei 1990 mencapai 20.979.703.600 batang dengan pemasukan cukai kepada pemerintah sebesar Rp. 248.400.158.500. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa pabrik rokok yang lain, seperti Sampoerna yang berlokasi di Surabaya dengan jumlah produksi pada tahun yang sama sebesar 2.461.680.000 batang dan pemasukan cukai sebesar 28.901.046.500.

Keberhasilan produksi rokok Gudang Garam juga diikuti dengan penyediaan fasilitas bagi para karyawan seperti sistem pengupahan sebesar 30%-100% di atas Kesepakatan Kerja Bersama yang dibuat oleh Pimpinan Unit Kerja SPSP (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dengan PT. Gudang Garam. Di samping itu sejak tahun 1983 PT. Gudang Garam juga menyediakan fasilitas seperti sarana pendidikan, sarana kebugaran jasmani, sarana pembinaan mental dan spiritual, koperasi karyawan, serta fasilitas lainnya. Sedangkan untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan para tenaga kerja maka karyawan PT. Gudang Garam sejak tahun 1978 telah dimasukkan dalam peserta Program Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK).

Di samping pabrik rokok di Malang dan Kediri, di Surabaya juga terdapat pabrik rokok yang cukup terkenal yaitu PT. HM Sampoerna yang memproduksi rokok Djie Sam Soe. Pabrik rokok Sampoerna memberi sumbangan yang cukup besar dalam pendapatan pajak daerah dan bahkan pajak nasional. Hal ini dilihat dari jumlah produksi rokoknya yang telah mencapai 2.461.680.000 batang selama Januari-Mei 1990. Jumlah itu menghasilkan cukai bagi pemerintah sebesar Rp. 28.901.046.500 atau menguasai pangsa pasar sebesar 4,49 dari pabrik rokok yang lainnya.

Dalam perkembangannya berbagai industri di Jawa Timur selama Repelita III dan IV mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari tabel 25 berikut ini:

Tabel 25
Perkembangan Industri Jawa Timur Tahun 1979--1983

NO.	TAHUN	I.L.D (unit)	I.K.D (unit)	AN INKARA	I. KECIL (UNIAT)	JUMLAH (UNIT)
01.	1979 - 1980	221	36	5.111	344.300	345.086
02.	1980 - 1981	224	41	5.507	367.781	373.553
03.	1981 - 1982	234	41	5.727	378.797	384.797
04.	1982 - 1983	234	44	6.017	408.461	414.756

Sumber: Repelita IV Jatim Buku IIC hlm. 26--21

Keterangan :

ILD = Industri Logam Dasar

IKD = Industri Kimia Dasar

AN INKRA = Aneka Industri

I. KECIL = Industri Kecil

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa selama Pelita III terdapat adanya kenaikan jumlah unit industri di Jawa Timur baik industri logam dasar, kimia dasar, aneka industri, dan industri kecil. Dengan adanya kenaikan sektor industri tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat/peningkatan income per capita dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini sekaligus merupakan pencerminan upaya pemerintah dalam menunjang 8 (delapan) jalur pemerataan.

Di lihat dari sumbangan industri terhadap produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 1982 17,5% pada akhir Pelita IV sebesar 27,9%. Sedangkan sumbangan industri terhadap Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 1984--1988 dapat dilihat dalam tabel 26 berikut ini:

Tabel 26
**Sumbangan Sektor Industri Terhadap PDRB
 Jawa Timur Tahun 1984–1989**

TAHUN	PDRB JAWA TIMUR (dalam milyar)	SUMBANGAN SEKTOR INDUSTRI	PROSENTASE
1984	9.888.614	1.888.725	19,13%
1985	10.383.045	2.149.290	20,72
1986	10.902.197	2.442.092	22,40
1987	11.447.307	2.764.524	24,15
1988	12.019.672	3.123.912	25,99
1989	12.620.656	3.519.900	27,89

Sumber: Pelita IV Jawa Timur Buku IIA. Hlm. 9--27

4.2.1 Peranan Industri Kecil

Dalam rangka mengemban misi pemerataan dan kesempatan kerja akan diutamakan pembinaannya pada industri-industri kecil yang berkelompok dalam sentra, terutama untuk yang menghasilkan barang-barang konsumsi langsung. Bagi industri kecil yang mempunyai keterkaitan dengan industri lain, akan didorong pengembangannya hingga menjadi industri kecil yang dinamis dan mampu menghasilkan produksi yang sesuai dengan standar dan harga yang bersaing, serta jumlah dan ragam yang cukup sehingga memenuhi segmen-segmen pasar.

Untuk mencapai hal tersebut usaha yang ditempuh antara lain ialah menciptakan keterkaitan dengan industri lain. Dalam usaha melestarikan kebudayaan bangsa akan dilanjutkan pembinaan terhadap industri yang menghasilkan barang-barang yang bernilai seni dan barang-barang yang diproduksi atas dasar ketrampilan tradisional.

Khususnya mengenai pembinaan dan pengembangan industri kecil dan kerajinan akan diberikan prioritas kepada

industri-industri yang mampu mendukung laju pertumbuhan dan mempunyai nilai tambah yang cukup tinggi, jenis industri kecil tertentu akan mendapat dorongan utama untuk dikembangkan yaitu industri kecil dan kerajinan yang mempunyai ciri-ciri antara lain: (1) mampu menyerap tenaga kerja yang relatif besar; (2) mampu memenuhi kebutuhan rakyat banyak; (3) berkaitan dengan pembangunan dengan sektor ekonomi lainnya, terutama sektor pertanian; (4) mempunyai keterkaitan dengan industri lainnya terutama industri permesinan. Di samping itu, dalam rangka peningkatan industri kecil dan kerajinan rakyat daerah Jawa Timur akan sekaligus dikaitkan dengan partisipasi kaum wanita dan generasi muda dalam sektor industri, dengan meningkatkan desa-desa binaan yang secara ekonomis memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

4.2.2 Peranan Industri Menengah dan Besar

Industri menengah dan industri besar diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dengan menggalakkan berbagai industri seperti:

a. Industri Kimia Dasar

Industri Kimia Dasar tergolong industri yang mempunyai ciri-ciri padat energi, padat modal dan teknologi tinggi.

Perkembangan Industri Kimia Dasar di Jawa Timur ditandai dengan berkembangnya daerah-daerah seperti: Gresik, Madura, Probolinggo, dan Banyuwangi menjadi zona industri Kimia Dasar yang berintikan pada pengembangan Semen Gresik, PT. Petro Kimia, PN Kertas Leces dan Besuki Rahmat.

Golongan industri ini adalah termasuk golongan industri kunci maka pengaruh perkembangan industri Kimia Dasar ini akan dapat merubah ekonomi dan sosial di daerah tersebut khususnya dan umumnya daerah Jawa Timur. Pembangunan industri Kimia Dasar akan selalu diarahkan

kepada optimasi kebutuhan dalam negeri dan kelebihan produksinya untuk ekspor.

b. Industri Logam Dasar, Mesin, dan Peralatan Berat

Program ini mencakup industri dasar besi baja, logam dasar non ferro, motor diesel dan motor bensin, mesin perkakas, mesin konstruksi dan bangunan. Perkembangan industri ini ditugaskan untuk meletakkan dasar-dasar industri yang merupakan tulang punggung ekonomi dan pertahanan serta ketahanan nasional.

3. Industri Alat Angkutan Umum

Khususnya industri alat-alat kendaraan bermotor masih dalam tahap *assembly*, dan skala nasional baru tahap rintisan untuk pembuatan kendaraan dalam negeri. Dengan telah dapatnya dibuatkan komponen-komponen yang menunjang, dalam Pelita IV kemampuan untuk memproduksi sendiri kendaraan bermotor dengan memanfaatkan sebanyak mungkin komponen produksi dalam negeri dapat mempunyai harapan cukup besar.

Sebagai hasil perkembangan industri menengah dan besar di Jawa Timur hingga Repelita IV dapat dilihat dalam tabel 27 berikut ini:

Tabel 27
Produksi Industri Kimia Dasar, Logam Dasar, Peralatan
Berat dan Angkutan Umum Jawa Timur
Tahun 1984/85--1988/1989

	TAHUN			RATA-RATA %/TH KENAIKAN
	1984/85	1988/89	SATUAN	
1. Besi beton	164.000	205.000	ton	25%
2. Pengecoran	222.000	255.300	ton	15%
3. G.I. Sheet	108.000	118.800	ton	10%
4. Besi strip/siku	28.950	36.187	ton	25%
5. Kikir	300.000	345.000	dz	15%
6. Sambungan pipa	1.100	1.265	ton	15%
7. Kend. Bermotor				
- roda empat	4.000	4.800	bh	20%
- roda dua	-	-	-	-
8. Spare Part				
- Accu	295.000	368.750	bh	25%
- Pegas/Spring	7.800	9.750	unit	25%
- Lampu mbl	2.427.000	5.445.000	bh	25%
- Karoseri	6.000	18.000	ribu bh	25%
- Ban mobil	15.000	18.000	ribu bh	25%
- Ban spd mtr	42.188	94.923	ribu bh	25%
9. Pupuk Urea	45.000	50.000	ton	10%
- ZA	200.000	243.000	ton	12%
- TSP	500.000	550.000	ton	10%

Sumber: Repelita IV Jawa Timur Buku IIA

4.2.3 Industri Pariwisata

Di Jawa Timur sebenarnya telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah ini yakni dengan menjadikan sektor wisata ini menjadi salah satu sektor unggulan daerah. Namun masih terbatasnya angka kunjungan manca negara tentu patut di pertanyakan. Gromay berpendapat bahwa masih terbatasnya angka kunjungan wisata

manca negara ke suatu daerah antara lain disebabkan (1) rendahnya mutu produk wisata yang ditawarkan; (2) kurangnya data dan informasi, khususnya pada sejumlah obyek wisata bercorak sejumlah budaya.⁵

Pentingnya pemeliharaan aspek kebudayaan daerah ini dengan sendirinya mengandung arti adanya keterlibatan aspek-aspek kesejarahan yang melekat padanya. Hal ini memang pada hakekatnya aspek sejarah dan aspek budaya kapan dan di manapun selamanya akan berjalan seiring. Oleh karena itu dalam upaya meninjau, menelaah maupun menganalisis aspek-aspek tersebut harus mengacu pada konteks kebersamaan dari keduanya.

Dalam hal ini cakupan pariwisata Jawa Timur dapat dijabarkan meliputi (1) tradisi lisan (oral tradisional), (2) warisan kesejarahan, (3) dinamika sosial budaya, dan (4) keunikan seni budaya. Ia menambahkan: “keempat unsur budaya ini dapat ditemukan pada setiap suku bangsa di manapun, termasuk di Jawa Timur.

Jawa Timur banyak menyimpan warisan sejarah. Keberadaan masyarakat dan daerah Jawa Timur dapat dilacak hingga zaman prasejarah. Untuk penggambaran tentang dinamika sosial, dapat ditelusuri melalui aktivitas-aktivitas di bidang perekonomian, kepercayaan, sistem kehidupan sosial, politik, dan sebagainya.

Sedangkan untuk unsur-unsur seni-budaya dapat dilihat lewat aktivitas masyarakat, khususnya dalam seni drama, seni musik, seni sastra, dan seni tari lainnya. dalam hal ini masing-masing dapat diperinci lagi, seperti untuk seni rupa cakupannya meliputi seni lukis, seni pahat, seni ukir, seni desain; bahkan seni dekorasi, seni arsitektur dan semacamnya. Masih terdapat banyak lagi unsur-unsur budaya yang sudah tercatat maupun belum sempat diinventarisasi. Sedangkan pada bagian lainnya, tidak sedikit pula di antaranya yang telah memudar dan tidak lagi dikenal oleh generasi sekarang.

Problem yang masih menjadi kendala dalam pengembangan wisata Jawa Timur adalah kekurangan data dan informasi, khususnya pada sejumlah obyek wisata sejarah budaya. Hal inilah yang harus ditanggulangi, berarti bahwa sejumlah data dan informasi yang berkaitan dengan aset wisata di daerah Jawa Timur ini perlu dicari.

Sesuai dengan pedoman Orientasi Pengembangan Wilayah dan obyek wisata Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, rencana pengembangan pariwisata di Jawa Timur tidak dilakukan hanya demi pariwisata itu sendiri. Pembangunan pariwisata di Jawa Timur dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan nasional secara keseluruhan. Berdasarkan pedoman di atas, kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan di Jawa Timur, secara garis besarnya diarahkan untuk: meningkatkan pendapatan negara berupa peningkatan devisa; memperluas lapangan kerja; untuk wisatawan domestik, pengembangan pariwisata di Jawa Timur ditujukan pada pengenalan budaya bangsa dan tanah air; memperkenalkan dan mempertahankan budaya bangsa.

Untuk peningkatan pendapatan negara, kebijaksanaan pengembangan pariwisata dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan obyek-obyek wisata untuk terus menarik jumlah kunjungan dari luar negeri. Dalam hal ini juga dicakup tujuan untuk memperkenalkan dan mempertahankan budaya bangsa, sehingga pariwisata Jawa Timur turut menyuguhkan Indonesia secara utuh kepada dunia.

Perluasan lapangan kerja dalam sektor pariwisata dilakukan sejalan dengan program pembangunan daerah. Untuk itu kebijaksanaannya diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat baik sebagai pemakai maupun produsen jasa wisata.

a. Potensi Wisata Jawa Timur

Jawa Timur memiliki potensi kepariwisataan dalam bentuk sumber-sumber daya alam, dan buatan. Dalam garis besarnya obyek-obyek wisata Jawa Timur dapat digolongkan:

- 1) Sumber daya alam, mengetengahkan keindahan alam, seperti laut pasir Bromo, Ijen, Tretes, Selecta, Sarangan, Semeru, dan Wilis.
- 2) Obyek pantai: Pasir Putih, Pantai Popoh, Ngliyep, Watu Ulo, Banyuwangi, Kenjeran, Tuban, Rajekwesi, Meneng, Hijau, Popoh, Grajagan, dan Telaga Sarangan.
- 3) Obyek Petilasan: Sumenep, Bangkalan, Majapahit, Singosari, Penataran, Blambangan, Wiraraja, Candi Kidal, Candi Jawi, Candi Jago, Ngrimbi.
- 4) Obyek Sejarah/Perjuangan: Kota Pahlawan Surabaya, Monumen Tugu Pahlawan, Makam Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Syeh Maulana Malik Ibrahim, Trowulan Mojokerto bekas Ibu Kota Kerajaan Majapahit.
- 5) Obyek Flora Fauna: Suaka Margasatwa Baluran, Betiri, Hutan Purwo, Kebun Raya Purwodadi, Kebun Binatang Surabaya.
- 6) Obyek Kesenian/Kebudayaan: Ludruk Surabaya, Sendra Tari Wilwatikta Pandaan, Kuda Kepang Tulungagung, Reog Ponorogo, Tiban Blitar, Kerapan Sapi Madura, Gandrung Banyuwangi, kentrung, Kuda encak.
- 7) Obyek Buatan: Dep perkeretaapian, PT. Pal Surabaya.

Obyek wisata tersebut tersebar dalam wilayah Dati II Jawa Timur seperti:

a) Malang:

Di Malang obyek pariwisata cukup banyak seperti: Pemandian Air Panas "Songgoriti" merupakan pemandian air panas dengan sumber alami. Di sekitarnya juga dilengkapi berbagai fasilitas hiburan, *bilyard* dan *convention hall* untuk pertemuan dan konverensi. *Selecta* : merupakan obyek wisata yang cukup indah dengan pemandian air jenihnya dan dengan berbagai sayuran dan buah apel. *Wendit/mendit* : obyek wisatanya menarik

dengan adanya Pekan Raya tiap lebaran dan dengan wisata perahu di danau-danau buatan. *Ngliyep*: merupakan obyek wisata dengan pemandangan pantainya yang indah dan ombaknya yang besar, dan keindahan berbagai souvenir dari batu laut dan kerang. *Sendang Biru*: terkenal dengan pemandangan pantai selatan dan wisata memancing. *Bendungan Karang Kates*: merupakan obyek wisata untuk ski dan memancing serta terdapat lapangan golf yang terkenal di Asia Tenggara. *Bendungan Selorejo*: merupakan obyek wisata memancing dan ski. *Gunung Kawi*: merupakan obyek wisata peziarah. Di samping itu juga banyak obyek peninggalan purbakala yang menjadi obyek pariwisata di Malang seperti: Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidal, Arca Ganesha di Karangates.

b) Pasuruan:

Di Kabupaten pasuruan terdapat beberapa obyek wisata yang cukup menarik seperti: Tretes di Kecamatan Prijen, Taman Candra Wilwatikta, pemandian Alam Banyu Biru.

c) Sumenep:

Kabupaten Sumenep adalah bekas daerah keraton, karenanya banyak sekali monumen-monumen peninggalan sejarah yang sangat ebrharga. Adapun beberapa obyek wisata yang masih dapat dikunjungi antara lain:

Keraton Sumenep: didirikan tahun 1763. Yang masih ditempati sebagai ekdiaman Bupati, namun akan dijadikan monumen dan kediaman Bupati disediakan tempat tersendiri. *Masjid Djamik* : merupakan lambang keagungan rakyat Sumenep yang hampir 100% Islam. *Asta Tengghi*: yaitu tempat pasarean/peristirahatan para raja-raja dan Ratu Sumenep beserta keluarganya.

Pantai Pasir Putih Selopeng, *Gua Kuning*: terletak di pulau kangean merupakan gua stalaktit yang indah. *Sea Garden of Mamburit*: merupakan aquarium alam, berupa pemandangan dasar laut yang dapat dilihat langsung dari permukaan dengan berbagai keindahan karangnya.

Dari sejumlah obyek wisata di Jawa Timur dapat dilihat persentase kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung seperti dalam tabel 28 dan 29 berikut ini:

Tabel 28
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia
Tahun 1983--1987

TAHUN	JUMLAH KUNJUNGAN	PERUBAHAN
1983	638.855	
1984	700.910	+ 7,9%
1985	749.351	+ 9,7%
1986	825.035	+ 10,1%
1987	1.060.347	+ 28,5%

Sumber: Dampak pariwisata Jatim hlm. 66

Tabel 29.
Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
Ke Kawasan Gunung Bromo

TAHUN	WISATAWAN MANCANEGARA	WISATAWAN NUSANTARA
1978	19.767	4.238
1979	20.574	4.868
1980	24.404	6.181
1981	20.690	4.779
1982	21.539	6.824
1983	24.418	7.025
1984	29.047	6.500
1985	20.871	8.143
1986	17.179	7.475
1987	49.143	9.327
1988	55.206	17.914
1989	63.486	33.532
1990	57.815	33.532

Sumber: Dampak pengembangan pariwisata Jatim hlm. 72

b. Arus Wisata dan Motivasinya

Kedatangan wisatawan di Jawa Timur dilihat dari beberapa kegiatan usaha kepariwisataan adalah sebagai berikut:
Arus wisata melalui hotel

Awal Pelita III Tahun 1979

Wisatawan Asing :	35.266	59.740
Wisatawan Domestik :	290.800	383.816

Arus wisatawan melalui biro perjalanan

Awal Pelita III Tahun 1982

Tour Luar Negeri :	6.699	8.573
Tour Keluar Negeri :	2.450	2.136
Domestik :	3.807	8.512
Kapal Wisata :	5.011	2.644

Dilihat dari asal kebangsaan kunjungan wisatawan asing ke Jawa Timur secara garis besar terdiri atas:

- Eropa :	49 %
- Asia :	36 %
- Australia :	6 %
- Amerika :	6 %
- Lain-lain :	3 %

Dilihat dari motifasi wisatawan komposisi kunjungan wisatawan ke Jawa Timur dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Berdagang :	46 %
- Konperensi :	8,61 %
- Rekreasi :	19,43 %
- Pemerintahan :	16,12 %
- Lain-lain :	9,84 %

Hasil pendapatan Pemerintah Jawa Timur dari pemasukan sektor pariwisata dapat dilihat dalam tabel 30 berikut:

Tabel 30
Pendapatan Pemerintah Dari Pariwisata Untuk Pajak
Pembangunan Tahun 1979--1983

NO.	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH/RUPIAH
01.	1979/1980	882.739.840,56
02.	1980/1981	1.125.526.463,62
03.	1981/1982	1.367.797.923,58
04.	1982/1983	1.571.264.388,00

Sumber: Diperda Tk I Jatim Dalam Repelita IV IIA hlm. 111.2--107

Dilihat dari jumlah Kunjungan Wisatawan dengan sasaran meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing dengan tingkat pertumbuhan 11,6% pertahun, proyeksi kunjungn wisatawan ke Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Kunjungan Wisatawan Ke Jawa Timur Tahun 1984--1988

TAHUN	DOMESTIK	ASING
1984	482.000	67.000
1985	540.000	75.000
1986	605.000	83.000
1987	677.000	93.000
1988	758.000	104.000

Sumber: Repelita IV Jawa Timur Buku IIA hl.11.2--111

Dari jumlah wisatawan, laam tinggal dan pengeluaran setiap hari yang diharapkan, devisa yang diterima dari kedatangan wisatawan asing khususnya di Jawa Timur sebagai berikut:

Tahun	1984	=	Rp. 23.450.000.000
Tahun	1985	=	Rp. 26.250.000.000
Tahun	1986	=	Rp. 29.050.000.000
Tahun	1987	=	Rp. 32.550.000.000
Tahun	1988	=	Rp. 36.400.000.000

Dilihat dari segi pemasukan pendapatan industri pariwisata itu meliputi biaya yang dikeluarkan dalam layanan: akomodasi; rumah makan; transportasi; cendera mata; atraksi wisata, dan sebagainya.

Sesuai dengan maksud untuk mengembangkan kepariwisataan diperoleh berbagai macam pendapatan, baik dalam bentuk devisa, pajak daerah, penambahan pendapatan masyarakat setempat, maupun hasil lainnya dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, pengembangan seni budaya dan lain-lain. Dari hasil kunjungan wisatawan tersebut kegiatan industri pariwisata dapat diperhitungkan seperti dalam tabel 32 berikut ini:

Tabel 32
Pendapatan Pemerintah Dari Pariwisata Untuk Pajak
Pembangunan Tahun 1984--1988

NO.	TAHUN	JUMLAH/RUPIAH
01.	1984	1.472.100.000
02.	1985	1.648.500.000
03.	1986	1.834.700.000
04.	1987	2.054.500.000
05.	1988	2.298.800.000

Sumber: Repelita IV Jawa Timur Buku IIA hlm.11.2-115

4.3 Penduduk dan Tenaga Kerja

4.3.1 Kependudukan

Sektor kependudukan dalam berbagai negara dan masyarakat pada umumnya merupakan masalah yang sangat kompleks. Hal ini karena masalah kependudukan di samping sebagai subyek pembangunan juga sekaligus merupakan obyek dari pada pembangunan itu sendiri. Dalam komposisinya sebagai modal pembangunan penduduk merupakan salah satu

modal dasar pembangunan nasional. Ini berarti jumlah penduduk yang sangat besar apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang.

Untuk menjadikan penduduk sebagai modal dasar pembangunan nasional dibutuhkan adanya keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sehingga besarnya jumlah penduduk perlu diimbangi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal. Tanpa peningkatan kualitas SDM yang andal tentunya jumlah penduduk yang besar bukannya menjadi modal dasar pembangunan tetapi justru sebaliknya menjadi beban pembangunan nasional yang perlu ditanggulangi.

Pembangunan sektor kependudukan itu sebagaimana tercantum dalam GBHN, pada dasarnya adalah untuk: meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat, meningkatkan pendapatan Nasional yang sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat, mempercepat pertumbuhan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran, dan untuk menyelaraskan pertumbuhan itu dirasakan perlunya pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk.

a. Komposisi Penyebaran Penduduk

Bagi Provinsi Jawa Timur yang pada Pelita I jumlah penduduk mencapai 27 juta dan merupakan daerah terpadat didunia dengan tingkat kepadatan 560 jiwa/km² dengan pertumbuhan 2,48%, masalah politik kebijaksanaan kependudukan sudah dirasakan urgensinya. Hal ini mengingat jumlah penduduk yang sangat padat itu tidak merata penyebarannya dan hanya 15% yang tinggal di kota dan 85% tinggal di desa (rural) atau masyarakat pedesaan. Dari jumlah itu jumlah yang paling padat berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kediri dengan kepadatan 1.000 jiwa/km².

Kepadatan penduduk di kota-kota besar di Jawa Timur seperti di Kotamadya Surabaya yang merupakan kota terbesar nomor dua di Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi yaitu 6.000 jiwa/km², semenara Kotamadya Mojokerto sebagai kotamadya terkecil memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 8.500 jiwa/km².

Padatnya penduduk kota akan menimbulkan permasalahan tersendiri seperti:

- 1) Susunan penduduk di kota menurut umur menunjukkan relatif lebih banyak orang-orang yang termasuk golongan pada usia bekerja, tetapi banyak yang menganggur.
- 2) Kota menjadi penuh sesak dengan kampung-kampung yang berjubel, rumah-rumah tempel dan gubuk-gubuk liar berdiri di mana-mana. Semua itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan (akan mudah kena wabah) dan merusak pemandangan (keindahan kota).
- 3) Banyak kendaraan bermotor sehingga meningkatkan kecelakaan lalu lintas dan polusi udara, baik karena asap yang keluar dari kendaraan maupun kebisingan suara.
- 4) Prostitusi dan bentuk kejahatan lain berkecenderungan untuk meningkat.
- 5) Nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan terancam.
- 6) Masalah-masalah kompleks yang lain, misalnya: sulitnya mengatur ketertiban masyarakat, kesulitan dalam hal penyediaan air bersih, dan sebagainya.

Cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah kepadatan penduduk di kota antara lain:

- a) Penyebaran industri ke daerah pedesaan, sehingga dapat menyerap tenaga kerja di desa.
- b) Meningkatkan usaha transmigrasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

- c) Menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum dan keterampilan, sehingga warga desa selain pengetahuannya bertambah juga dapat diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri selain bidang pertanian.
- d) Membuat suasana desa lebih segar yang diharapkan dapat menimbulkan suasana yang tidak membosankan khususnya bagi anak-anak muda supaya kerasan tinggal di desa.⁶

Dilihat dari jumlah penduduk dan permasalahannya, di Jawa Timur secara keseluruhan menunjukkan adanya proporsi yang besar pada kelompok anak-anak, kemudian persentasenya menurun dengan tajam pada umur-umur yang lebih tinggi sehingga membentuk piramida meruncing (penduduk muda).

Dari segi persentase penduduk berdasarkan umur maka komposisi penduduk di Jawa Timur menunjukkan bahwa 1/3 dari jumlah penduduk merupakan usia anak-anak di bawah 10 tahun. Dilihat dari usia dibawah 15 tahun jumlah itu meliputi 2/5 lebih dari jumlah penduduk di Jawa Timur.

Kondisi penduduk yang penyebarannya tidak merata, tidak stabil komposisi dan taraf hidup, serta pendidikannya, merupakan hal yang perlu diatasi. Tingkat kepadatan penduduk, meskipun bukan merupakan indikator kemakmuran atau keterbelakangan suatu daerah, tetapi cenderung kalau tidak tercapai keseimbangan antara jumlah penduduk dan pemanfaatannya, justru akan merupakan malapetaka. Secara ekonomis jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban, khususnya usia kerja. Sementara itu besarnya jumlah anak-anak akan menjadi beban pula karena sifat konsumtif, dalam hal makanan, pakaian, perawatan, dan biaya sekolah.

Besarnya beban ekonomis bagi penduduk usia kerja dapat terlihat dari besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Angka rasio ketergantungan dapat dilihat dari perbandingan antara anak-anak dibawah 15 tahun (usia belum produktif) ditambah orang-orang yang berusia di atas 65 tahun (usia tidak produktif) dengan penduduk umur 14-64 tahun (usia produktif).

Di Jawa Timur komposisi penduduk dilihat dari perbandingan rasio tersebut pada tahun 1971, 78%, yaitu perbandingan antara 11,2 juta anak dan orang tua dengan 14,2 juta orang penduduk produktif. Rasio itu meningkat dibandingkan dengan rasio penduduk pada tahun 1961 yang baru 71%.

Angka pertumbuhan penduduk Jawa Timur sebesar 2.48% pertahun atau kecepatan kelahiran 1 jiwa permenit merupakan problem serius yang perlu segera ditangani. Karena itu jumlah penduduk yang besar di Jawa Timur harus diikuti dan diarahkan, agar dapat berperan secara positif dan diberi motivasi serta purpose bagi pembangunan. Hal ini karena meskipun jumlah penduduk bukanlah merupakan indikator dari kemakmuran atau keterbelakangan daerah tetapi apabila suatu daerah padat penduduknya namun apabila sumber penghidupannya mencukupi maka tekanan ekonomi tidak akan dirasakan. Dan sebaliknya apabila suatu wilayah sangat jarang penduduknya, tetapi sumber-sumber penghidupannya terbatas sekali maka tekanan ekonomi akan dapat dirasakan dan keseimbangan antara kedua faktor tersebut jelas sangat menentukan tingkat kemakmuran daerah.

Pada akhir tahun 1980 berdasarkan sensus yang diadakan di seluruh Indonesia, penduduk Jawa Timur berjumlah sekitar 29,2 juta jiwa, atau 19,8% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia dengan kepadatan mencapai 609 orang per km². Dilihat dari segi kenaikan jumlah penduduk dibanding tahun 1971--1980, naik sekitar 3,6 juta jiwa. Namun dilihat dari segi pertumbuhan penduduk menunjukkan adanya penurunan yakni dari pertumbuhan penduduk, menunjukkan adanya penurunan yakni dari pertumbuhan 2,48% menjadi 1,49% pertahun. Angka pertumbuhan itu masih merupakan angka kasar dan jika dihitung berdasarkan perbandingan antara kelahiran kasar tahun 1971--1980 24,6 per seribu dengan angka kematian kasar 9,6 per seribu maka angka pertumbuhan penduduk Jawa Timur selama tahun 1980 hanya 1,5% pertahun. Pertumbuhan itu jika ditambah angka migrasi netto yang diperkirakan rata-rata

3 per seribu maka angka pertumbuhan menjadi 1,2% per tahun. Dilihat dari faktor yang dapat mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk kiranya dapat dilihat dari komposisi antara jumlah penduduk wanita usia nikah dan jumlah persentase wanita usia nikah yang masih sekolah.

Dilihat dari jumlah wanita usia menikah pada tahun 1981 dibanding tahun sebelumnya untuk umur 15--19 tahun menurun 56,6%, dan untuk usia 20--24 tahun turun 29,9%, dan usia 25--29 turun 32%. Menurunnya jumlah wanita usia menikah tentunya juga mempengaruhi angka pertambahan penduduk. Untuk mengetahui angka pertumbuhan penduduk yang masih sekolah pada tahun 1981 di Jawa Timur dapat dilihat dari tabel 33 berikut:

Tabel 33
Persentase Penduduk Yang Masih Sekolah

KELOMPOK UMUR	PERSENTASE YANG MASIH SEKOLAH		
	WANITA	PRIA	WANITA+PRIA
7 - 12	84,20	85,04	84,63
13 - 15	53,26	61,85	57,76
16 - 18	20,52	36,52	28,30
19 - 24	4,13	11,46	7,45

Sumber: Repelita IV Jawa Timur buku IIC hlm. 19--4

Persentase tersebut dapat dijadikan indikasi perkembangan penduduk Jawa Timur dengan melihat komposisi wanita usia menikah. Berdasarkan MRS (Multi Round Survey) tahun 1980 menunjukkan bahwa angka median pada pernikahan pertama 50% dari wanita menikah pada usia 16,9--19 tahun. Melihat tabel 33 dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk dilihat dari jumlah wanita usia yang mestinya menikah dengan jumlah wanita yang kenyataannya masih sekolah sebesar 20,52% atau 28,30% dari jumlah wanita dan pria pada usia menikah. Keberhasilan dalam sektor kependudukan di Jawa Timur

berkat adanya usaha dalam mengendalikan penduduk dan pembangunan diberbagai sektor di antaranya Keluarga Berencana.

Berbagai upaya untuk menanggulangi kepadatan penduduk di Jawa Timur terus diupayakan. Hal ini karena memasuki Repelita IV (1983) penduduk Jawa Timur telah mencapai 30.472.600 orang dengan pertumbuhan 1,23% pertahun. Jumlah penduduk tersebut jika dilihat dari luas wilayahnya yaitu 47.922 km², maka kepadatan rata-rata tiap 636 orang/km².

Menginjau Pelita IV kondisi kepadatan penduduk Jawa Timur masih diwarnai adanya perbedaan yang menyolok antara daerah satu dengan yang lain. Hal ini dapat dilihat dengan adanya daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang mencapai 9.787 orang/km², dan masih terdapat daerah yang kepadatan penduduknya hanya 250 orang/km². Jika dilihat dari komposisi ideal antara luas wilayah dengan jumlah penduduk maka idealnya daya dukung daerah Jawa Timur hanya diuni sekitar 20 juta sampai 22 juta orang. Dengan demikian maka Jawa Timur dengan laju pertumbuhan penduduk yang masih besar dan kepadatan penduduk di beberapa daerah yang cukup padat akan membawa implikasi pada beberapa permasalahan sekitar masalah kependudukan. Apalagi luas daerah Jawa Timur yang hanya 1/20 (seperduapuluh) dari luas Indonesia, dengan kondisi yang berbeda-beda secara fisik, sosial, dan ekonomi pada tiap daerah, terdapat daerah yang subur dan daerah yang kritis. Hal ini menimbulkan tingkat hidup masyarakat berbeda sangat menyolok terutama pada masyarakat pedesaan, petani dan nelayan.

Jumlah penduduk yang melebihi kapasitas itu berakibat pada penataan lingkungan hidup yaitu:

- 1) Adanya ketidakharmonisan kepentingan/keinginan masyarakat dengan penanggulangan pelestarian sumber daya alam dan kemampuan lingkungan hidup, yang belum dapat terpecahkan secara tuntas.

- 2) Terdapat tumpang tindih keperluan lahan antara kepentingan pelestarian dan perlindungan alam dengan kebutuhan pembangunan yang akibatnya berbagai kawasan dan tanah-tanah pertanian dipergunakan untuk kepentingan pemukiman, serta kawasan suaka alam hutan lindung dipergunakan untuk usaha pertanian, juga untuk sarana jalan, membuka daerah terisolir, daerah pengembangan industri-industri.
- 3) Pertambahan penduduk yang diikuti dengan urbanisasi ke kota-kota besar mempengaruhi keadaan lingkungan hidup perkotaan, berupaya kesehatan lingkungan, kekurangan pemukiman dan menurutnya disiplin sosial dan sebagainya.
- 4) Gejala-gejala penurunan kualitas lingkungan hidup di beberapa daerah masih kurang mendapat perhatian.

Dari beberapa permasalahan penduduk tersebut tentunya tidak dapat dipecahkan secara terpisah melainkan harus diintegrasikan dengan program lain. Program lain yang erat kaitannya dengan kependudukan itu antara lain: kesehatan dan keluarga berencana, transmigrasi dan ketenagakerjaan.

b. Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) merupakan bagian dari usaha mengatasi masalah kependudukan di Timur maupun di Indonesia umumnya. Hal ini karena program kesehatan dan KB merupakan salah satu upaya untuk membentuk masyarakat yang kuat dan produktif.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, yang menjadi landasan operasional dalam melaksanakan tugas Departemen Kesehatan ditegaskan bahwa untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat maka ditempuh usaha-usaha: (1) mencegah dan memberantas penyakit menular; (2) mempertinggi derajat kesehatan; (3) mengobati mereka yang sakit; (4) memulihkan daya kerja (rehabilitasi).

Untuk mewujudkan hal itu, dalam tahun I dan II Repelita I program kesehatan yang mendapat prioritas meliputi: (a) Pendidikan kesehatan pada masyarakat; (b) pengembangan infrastruktur kesehatan; (c) pemberantasan penyakit menular; (d) pendidikan kesehatan; (e) pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan; (f) peningkatan kesehatan dan survey.

Dalam bidang kesehatan di Jawa Timur selama Pelita I telah dibangun sarana kesehatan seperti PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) sebanyak 175 pada tahun 1969 dan telah bertambah menjadi 544 buah pada tahun 1973. Di samping Puskesmas juga telah dibangun Rumah Sakit Umum sejumlah 138 buah, 61 di antaranya adalah rumah sakit swasta. Balai pengobatan juga telah dibangun pemerintah sejumlah 758 buah dan didirikan swasta sebanyak 371 buah. Dalam bidang pendidikan kesehatan terdapat 4699 buah dan kurang lebih 17.600 orang guru telah mendapat penataran kesehatan.

Dalam bidang pemberantasan penyakit menular telah diintensifkan dengan ruang lingkup pemberantasan penyakit-penyakit malaria, kolera, TBC, frambusia, kusta, penyakit kelamin, surveillance epidemiologi, dan peningkatan *higiene* air minum di pedesaan dan karantina laut/udara.

Dari tahun ke tahun Puskesmas itu terus ditambah baik jumlahnya maupun jangkauannya. Dalam Pelita III (1983) telah dibangun sebanyak 146 buah Puskesmas dan 587 buah Puskesmas pembantu. Dengan demikian sampai Pelita II terdapat: Puskesmas 633 buah; Puskesmas pembantu 795 buah; Balai pengobatan 130 buah; BKIA 208 buah. Jumlah itu sebenarnya masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Timur yang mencapai 30 juta dalam tahun 1983/1984. Sebab jika dilihat dari ratio kebutuhan satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk saja, maka diperlukan sebanyak 1016 Puskesmas.

Di samping dibangun Puskesmas dengan jumlah yang terus ditingkatkan untuk menunjang kesehatan masyarakat juga

dibangun sarana air bersih dan kesehatan lingkungan. Penyediaan sarana air bersih di Jawa Timur merupakan persoalan serius yang perlu ditangani secara tuntas, mengingat sebagian besar penduduk Jawa Timur belum dapat menikmati pelayanan air bersih baik di kota besar, kecamatan, maupun pedesaan.

Dalam hal ini sampai tahun 1983 telah dibangun sarana tersebut lewat dana Inpres meliputi: SPT dangkal 39.573 buah; SPT dalam 1.693 buah; PAH 1.661 buah; S.A 10 buah; PP 158 buah; PMA 193 buah; Sumur Gali 867 buah; Jamban Keluarga 337.081 buah; Sarana pembuangan air limbah 1.450 buah. Sedangkan dana untuk pengadaan dan pelayanan air bersih diperoleh dari APBN APBD maupun dari bank Dunia atau IBRD.

Tabel 34
Anggaran APBN Untuk Air Bersih di Jawa Timur 1984--1989

TAHUN	SARAN	BIAYA/JUTA	LOKASI
1984-1985	20 Kota IKK	943	Kec. Tersebar di Jawa Timur
1985-1986	27 Kota IKK	2.270	Sda
1986-1987	23 Kota IKK	2.408	Sda
1987-1988	20 Kota IKK	2.094	Sda
1988-1989	35 Kota IKK	3.664	Sda
JUMLAH	125 Kota IKK	11.378	

Sumber: Repelita IV Jatim Buu IIC hlm. 20.2--24

Dana tersebut belum termasuk dana untuk pelayanan air bersih perkotaan sebesar Rp. 22.149,5 juta dan Dana dari IBRD untuk kota kecamatan sebesar Rp. 1.130.405.000,00 dan dana dari APBD I sebesar Rp. 6.750 juta.

Sedangkan untuk menunjang keberhasilan dalam meningkatkan sarana kesehatan diadakan peningkatan fasilitas pendidikan tenaga paramedik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan seperti terlihat dalam tabel 35 berikut ini:

Tabel 35
Sekolah Paramedik Jawa Timur
Pelita III--Pelita IV (s.d. Tahun 1989)

NAMA SEKOLAH	JUMLAH SEKOLAH	
	REPELITA III	REPELITA IV
1. PERAWAT		
a. Sekolah Perawat Kesehatan	23	30
b. Akademi Perawat	1	1
c. Akademi Anestasi	0	1
2. KESEHATAN MASYARAKAT		
a. Sek. Pemb. Pen. Hiygiene	2	3
b. Akademi Pen. Kesehatan	1	1
c. Akademi gizi	1	1
3. TEKNOLOGI KESEHATAN		
a. Sek. Pengatur Rawat Gigi	1	1
b. Sek. Pengatur Tukang Gigi	-	1
c. Sek. Menengah Farmasi	4	4
d. Sek. Menengah Alais Kesehatan	1	1
e. Akademis Analis Medis	1	1
f. Akademi Fisio Therapi	-	1
g. Akademi Penata Rontgen	-	1
h. Sekolah Guru Perawat	1	1

Keberhasilan bidang kesehatan di Jawa Timur tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan secara integral yang melibatkan peran: masyarakat, para pemimpin baik pemerintah maupun pemimpin masyarakat seperti ulama, guru, dan orang-orang yang berpengaruh, dan yang lebih penting adalah peranan PKK (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga).

Dalam bidang KB untuk menekan ledakan penduduk yang mengkhawatirkan, maka proyek keluarga berencana mendapat tugas besar yang melibatkan banyak komponen-komponen nasional. Akseptor KB di Jawa Timur dari tahun ke tahun

menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah peserta akseptor pada tahun 1972-1973 terdapat 500.513 akseptor yang menggunakan pil, IUD dan lainnya.

Upaya yang ditempuh untuk menunjang KB adalah melalui saluran-saluran komunikasi seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dan komunikasi langsung melalui pimpinan masyarakat yang mengarahkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga berencana bagi masa depan hidup mereka.

Hasil-hasil yang dicapai dalam bidang KB Jawa Timur kiranya dapat dilihat dari peningkatan yang cukup tajam dalam pengendalian penduduk melalui peningkatan jumlah akseptor KB yang pada akhir Pelita I telah mencapai 1.470.425 akseptor dan pada permulaan Pelita II telah bertambah menjadi 2.327.231 akseptor. Dari jumlah tersebut 615 di antaranya menggunakan pil dan 37% memakai Intra Uterine Device (IUD).

Keberhasilan dalam meningkatkan jumlah akseptor KB itu, karena di Jawa Timur dalam pelaksanaan KB melibatkan Pamong Praja untuk berperan aktif dalam mendapatkan akseptor baru. Di samping itu dengan tersedianya jumlah klinik yang memadai yang terdiri dari 761 buah klinik, 661 buah di antaranya milik Departemen Kesehatan dan 100 buah milik non Departemen Kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan dalam KB di Jawa Timur dilakukan secara integrasi dengan usaha Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Jumlah Balai Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Jawa Timur mencapai 1.322 buah.

Tabel 36
Pencapaian Akseptor Baru Keluarga Berencana
Tahun 1968--1974 Provinsi Jawa Timur

TAHUN	PIL	IUD	LAIN-LAIN	JUMLAH	TARGET	%
1986	1.117	5.869	468	7.454	-	-
1986-1970	4.527	4.875	2.130	11.532	34.375	33.54
1970-1971	31.736	26.137	8.106	65.979	40.000	164.94
1971-1972	142.721	86.216	5.797	23.734	267.500	87.75
1972-1973	275.664	204.143	20.706	500.513	400.000	125.13
1973-1974	119.024	68.446	14.002	201.472	500.000	40.29

Sumber: Jawa Timur Membangun 2, hlm. 326

Jumlah akseptor itu dari tahun ke tahun terus ditingkatkan dengan menambah sarana Puskesmas dan tenaga pegawai BKKBN, sehingga setiap tahun dapat dijangkau peserta baru akseptor KB.

Tabel 37
Pencapaian Akseptor Baru Keluarga Berencana
Tahun 1983--1984 Provinsi Jawa Timur

METODE	JUMLAH	PROSENTASE
IUD	179.840	32,7%
Pil	269.146	48,6%
Kondom	23.130	4,2%
MO	15.393	2,8%
Suntikan	62.366	11,3%
Lain-lain	103	-
TOTAL	549.978	100%

Sumber: Repelita IV Jawa Timur Buku IIC hlm. 19--5

Tabel 38
Pencapaian Pegawai BKKN Tahun 1983--1984
Berdasarkan Golongan

JENIS/GOLONGAN	BKKBN DATI I	BKKBN DATI II	BPKB
PNS dan CPNS			
Golongan I	42	1.706	47
Golongan II	86	2.111	46
Golongan III	27	86	36
Honorier	12	475	9
JUMLAH	167	4.378	138

Sumber : Repelita IV Jawa Timur hlm. 1--10

Sedangkan jumlah peserta KB baru untuk tahun 1985--1989 adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Target Peserta KB Baru Pelita IV (Per Tahun)

TAHUN	TARGET PESERTA BARU	MIN KONTRASEPSI*				
		35	45	4	12	4
1984-1985	1.376.168	35	45	4	12	4
1985-1986	1.364.507	36	42	4	13	5
1986-1987	1.382.542	37	39	4	14	6
1987-1988	1.417.029	40	30	4	16	10

* Perbandingan Untuk Peserta :
 IUD : PIL : Kondom : Suntikan : lain-lain

Jumlah itu masih ditambah dengan jumlah peserta KB aktif dalam pasangan usia subur di Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 40
Target Peserta KB Aktif Pelita IV (Per Tahun)

TAHUN	TARGET PESERTA AKTIF	PERSENTASE TERHADAP PUS
1984-1985	3.655.000	71,0
1985-1986	3.760.000	72,0
1986-1987	3.891.000	73,2
1987-1988	4.014.000	74,2
1988-1989	4.139.000	75,2

Di samping keberhasilan dalam program KB di Jawa Timur juga diupayakan peningkatan pengetahuan tentang gizi makanan, sosial, ekonomi, yang difokuskan pada daerah-daerah minus. Masalah gizi di Jawa Timur merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian, mengingat hal ini merupakan bagian yang sangat penting setelah masalah penyakit menular. Data yang ada di Jawa Timur menunjukkan bahwa masih banyak dijumpai gejala-gejala gizi kurang yang perlu mendapat perhatian secara sirus, seperti: kurang gizi secara umum, kekurangan protein dan kalori (PCM), penyakit karena kekurangan vitamin A, penyakit gondok akibat kekurangan jodium yang ditemukan di beberapa daerah.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang penting terhadap masalah gizi, namun pengertian tentang gizi memiliki peranan yang penting pula. Karena itu tujuan utama usaha perbaikan gizi di Jawa Timur adalah menyadarkan masyarakat dalam persoalan gizi melalui proses pendidikan. Mengingat kompleksnya faktor-faktor sebagai penyebab gangguan gizi maka dalam penanganannya di koordinasikan secara bersama-sama antar dinas yang tergabung baik ditingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ke tingkat pelaksana di desa. Dinas-dinas itu antara lain: Dinas Kesehatan, Pertanian, Kehewan, Pendidikan, Pramuka, Perikanan dan Sosial/ Pembangunan Masyarakat Desa.

Daerah-daerah yang mendapatkan prioritas pertama dari Badan perbaikan Gizi yaitu Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan. Pada tahun 1972 diperluas dengan Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan pada tahun 1974 untuk Proyek Badan Perbaikan Gizi Daerah sudah meliputi daerah Pamekasan, Sampang, Bangkalan dan Sumenep.

Peningkatan perbaikan gizi itu terus ditingkatkan dari tahun ke tahun dengan menggunakan integrasi model KB/Gizi di Jawa Timur. Hasil-hasil yang dapat dilihat dari keberhasilan program KB/Gizi pada tahun 1983/84 adalah terlaksananya program integrasi KB/Gizi ke berbagai desa yang telah menjangkau sejumlah 23.440 desa di Jawa Timur dengan sasaran anak Balita yang tempuh melalui kegiatan timbangan anak.

Tabel 41
**Liputan Pelaksanaan Program Integrasi KB/Gizi
Jawa Timur Tahun 1980-1984**

TAHUN	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
1980-1981	18	19	30
1981-1982	22	36	57
1982-1983	23	37	41
1983-1984	27	78	116

Sumber: Repelita IV Jawa Timur Buku IICHlm. 19-8

Jumlah penduduk yang besar merupakan beban yang berat bagi program-program pembangunan, termasuk KB. Jumlah penduduk yang besar berarti jumlah pasangan usia subur (PUS) yang perlu dibina juga besar. Tingkat pertumbuhan penduduk di Jawa Timur termasuk rendah, apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di

Indonesia. Namun, mengingat kepadatan penduduk yang sudah tinggi, maka tingkat pertumbuhan alamiah sebesar 1,5% sudah dirasakan cukup berat. Sesungguhnya tingkat kelahiran sudah mengalami penurunan yang cukup banyak selama kurun waktu 1970-an. Namun karena struktur umur penduduk Jawa Timur yang muda, dan adanya penurunan tingkat kematian yang besar, maka tingkat pertumbuhan alamiah itu belum dapat diturunkan secara berarti. Penurunan selanjutnya dari tingkat kelahiran dalam dasawarsa 80-an akan banyak dipengaruhi oleh proporsi wanita yang menikah dan usia pernikahan. Walaupun usia pernikahan telah mengalami peningkatan selama dasawarsa 70-an, namun masih adanya pernikahan di bawah umur dan masih banyaknya perkawinan dalam dasawarsa sekarang ini. Penanganan itu tidak boleh terlepas dari usaha untuk meningkatkan status pendidikan, terutama pada anak-anak wanita. Tingkat kematian bayi, walaupun sudah menurun selama dasawarsa 1970-an, namun masih cukup tinggi, dan sangat mengurangi keinginan untuk membatasi jumlah anak lebih lanjut. Oleh karenanya, usaha untuk memperluas kesertaan ber-KB tidak boleh terlepas dari usaha untuk menurunkan tingkat kematian bayi.

Dalam mengatasi masalah kependudukan juga ditunjang dengan penanganan masalah sosial Jawa Timur, yang diusahakan melalui program pembinaan kesejahteraan/pengembangan sosial khususnya di bidang kesejahteraan sosial seperti: (1) proyek pengembangan sosial bagi masyarakat pedesaan; (2) proyek pengembangan sosial bagi masyarakat kota; (3) program bantuan/rehabilitasi sosial; (4) program pembinaan/penyempurnaan aparat pelaksana pemerintah; (5) program pembinaan/ penyempurnaan aparat pelaksana non pemerintah.

Pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang kesejahteraan sosial berasal dari Pemerintah Pusat (Departemen Sosial) selama Pelita I sebesar Rp. 61.306.000 dan dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 112.411.000.

c. Transmigrasi

Problem yang sangat menonjol dalam masalah kependudukan di Pulau Jawa dan Bali umumnya adalah masalah kepadatan penduduk dan kesempatan kerja. Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 47.922 km² dan jumlah penduduk akhir Pelita I sejumlah 27 juta jiwa, masalah kepadatan penduduk dan kesempatan kerja menjadi problem utama. Untuk mengatasi problem kependudukan tersebut, di samping upaya menciptakan lapangan kerja yang memadai dan KB, juga ditempuh melalui program transmigrasi.

Program transmigrasi di Jawa Timur mempunyai sasaran khusus yaitu:

- 1) Memberikan kesempatan kerja kepada para tenaga kerja yang menganggur/setengah menganggur di Jawa Timur dan untuk menaikkan pendapatan.
- 2) Memindahkan penduduk dari daerah padat di Jawa Timur ke luar Jawa Timur.
- 3) Melakukan penyebaran penduduk yang lebih merata.
- 4) Memindahkan mereka itu sekaligus menggali kekayaan alam di luar Jawa.
- 5) Membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah yang lebih merata di tanah air.
- 6) Melakukan integrasi dan asimilasi di antara suku-suku bangsa Indonesia.

Dari sasaran tersebut dapat ditarik simpulan, bahwa transmigrasi bukan hanya sekedar memindahkan penduduk saja, akan tetapi juga menjamin mereka agar mendapat penghidupan yang lebih layak dan baik, di samping turut serta aktif membangun di daerah yang baru dengan mengerjakan kekayaan alamnya.

Untuk menunjang pelaksanaan transmigrasi di Jawa Timur dikoordinasikan oleh Direktorat Transmigrasi yang tugasnya melaksanakan yang telah digariskan dari pusat. Direktorat ini menjalin hubungan dengan Pemda Tingkat I dan Tingkat II dan hingga tingkat di bawahnya. Anggaran untuk transmigrasi disediakan oleh APBN maupun APBD yang diperuntukkan bagi pembinaan para transmigran.

Tabel 42
Anggaran transmigrasi Jawa Timur (APDB)

NO.	KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
01.	Pembinaan 200 KK	9.500.000	1969-1970
02.	Pembinaan 133 KK	8.000.000	1970-1971
03.	Pembinaan 200 KK	5.000.000	1971-1972
04.	Pemberangkatan spontan	8.486.463	1972-1973
05.	Pemberangkatan dan Pemberangan Transmigrasi gaya baru	1.500.000	1973-1974

Sumber: Jawa Timur Membangun 2 hlm. 293-194

Untuk menunjang suksesnya program transmigrasi Jawa Timur, telah dijalin kerjasama dengan ABRI dan Pramuka, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengadakan model transmigrasi integrasi yaitu antara ABRI dan transmigrasi Pramuka. ABRI dan Pramuka itu sebelum diberangkatkan ke lokasi transmigrasi telah dibekali kemampuan yang cukup diberbagai sektor agar nantinya di daerah transmigrasi diharapkan dapat memberi contoh kepada transmigran yang lain.

Daerah tujuan transmigran Jawa Timur pada Pelita I di berbagai daerah penempatan/proyek transmigrasi di luar Jawa antara lain: Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Tabel 43
Realisasi Pemberangkatan Transmigrasi
Jawa Timur Tahun 1969--1974

NO.	TAHUN	TRANS. UMUM		TSP. DBB		TSP. TBB		T. SEKT		JUMLAH	
		KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA
01.	1969-1970	601	2838	133	597	-	-	200	960	934	4.935
02.	1970-1971	635	3.060	172	593	16	58	209	913	1.032	4.624
03.	1971-1972	655	3.076	200	708	401	1.474	441	2.123	1.697	7.381
04.	1972-1973	1.550	7.479	2.200	8.884	347	1.614	200	988	4.297	18.965
05.	1973-1974	1.229	5.986	395	1.754	296	1.373	-	-	1.920	9113
	JUMLAH	4670	22439	3100	12536	1060	4519	1050	4984	9880	44478

KETERANGAN:

- TRAN UMUM = Biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah
- TSP. DBB = Transmigrasi spontan dan bantuan biaya Sebagian biaya ditanggung pemerintah
- TSP. TBB = Transmigrasi spontan tanpa bantuan biaya Semua biaya ditanggung sendiri peserta
- T. SEKT = Transmigrasi sektoral Biaya ditanggung oleh Pemda

(Sumber: Jawa Timur Membangun 2, hlm. 297)

Dalam Pelita II dan IV program transmigrasi bukan sekedar memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, tetapi juga menyangkut permasalahan pemukiman kembali penduduk yang berpindah-pindah. Hal ini ditegaskan dalam GBHN 1983 bahwa dalam rangka perluasan lapangan kerja, serta dalam rangka memecahkan masalah kependudukan, maka pemindahan penduduk dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan tenaga kerja melalui Program Transmigrasi dan Pemukiman Kembali dilanjutkan dan ditingkatkan. Dalam hubungan ini, di samping langkah-langkah lainnya untuk memperlancar pelaksanaan transmigrasi, perlu diberi perhatian yang lebih besar kepada pembina usaha tani transmigrasi dan penduduk setempat, pengembangan usaha industri pertanian dan usaha perdagangan di daerah-daerah transmigrasi.

Dalam menunjang pelaksanaan transmigrasi tersebut, di Jawa Timur juga ditingkatkan pengerahan dan pemberangkatan transmigrasi selama 5 tahun dalam Pelita III mencapai 193.161 KK = 680.395 jiwa, yang terdiri dari transmigrasi umum yang didukung oleh dana APBN maupun dana APBD Dati I dan Dati II Jawa Timur. Dengan demikian diuayakan agar transmigrasi mampu menunjang usaha kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Dalam pelita IV jumlah transmigran Jawa Timur ditargetkan sekitar 190.000 KK atau sekitar 255 dari target nasional yang mencapai 750.000 KK. Jumlah tersebut dibandingkan dengan jumlah sebelumnya mengalami peningkatan, namun dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur masih belum memadai.

Di samping itu dalam rangka pemindahan penduduk hal yang juga penting dalam menunjang sektor transmigrasi perlu ditunjang pula dengan berbagai kegiatan yang meliputi kegiatan operasional seperti: penerangan, penyuluhan, pendaftaran, seleksi, penampungan, pelayanan makanan, kesehatan, angkutan dari desa asal sampai ke daerah pemukiman transmigrasi, dan pengawalan, termasuk pengadaan sarana gedung untuk kantor, gedung asrama. Hal lain yang perlu juga dipersiapkan dalam menunjang transmigrasi adalah pemberian alat-alat perlengkapan bagi transmigrasi seperti:

- Alat pertanian,
- Alat dapur,
- Alat tidur,
- Alat pandai besi,
- Alat sandang dan pakaian,
- Alat perlengkapan asrama, dan berbagai fasilitas pemeliharaan gedung lainnya.

Sebagai realisasi dari pelaksanaan program transmigrasi Jawa Timur hingga Pelita IV dapat dilihat dalam tabel 44 berikut ini:

Tabel 44
Pemberangkatan Transmigrasi Jawa Timur
Tahun 1984--1988/89

TAHUN	TRAN. UMUM KK	TRAN. SPT (KK)	JUMLAH
1984/1985	25.800	9.200	35.000
1985/1986	27.200	9.800	37.000
1986/1987	28.000	10.000	38.000
1987/1988	28.800	10.200	39.000
1988/1989	30.000	10.800	41.000

Sumber: Repelita IV Jatim Buku IIB hlm. 13.2--5

4.3.2 Tenaga Kerja

Sektor tenaga kerja di berbagai daerah Indonesia pada umumnya mengalami permasalahan yang sama yaitu perlunya penyediaan lapangan kerja yang memadai bagi segenap pencari kerja. Namun untuk memenuhi semua tuntutan itu sudah barang tentu tidak mungkin. Apalagi di kota-kota besar seperti Surabaya, persoalan tenaga kerja akan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kesempatan lapangan kerja.

Tabel 45
Pertumbuhan Penduduk Kotamadya Surabaya 1970--1990
(Per 1.000 Penduduk)

PERIODE	PERTUMBUHAN ALAMI	MIGRASI MASUK PERTUMBUHAN	BERSIH SETAHUN
1970-1975	25.97	8.78	34.75
1975-1980	23.49	5.46	28.95
1980-1985	21.22	5.53	26.75
1985-1990	20.16	4.50	24.50

Sumber: Bappeda Dati II Kotamadya Surabaya (1989)

Besarnya jumlah penduduk dan tenaga kerja di kota sebenarnya bukan sekedar tidak seimbangnya antara jumlah lapangan kerja dengan perkembangan penduduk, namun juga sebagai dampak langsung dari urbanisasi yang sering tidak dibarengi dengan kebutuhan tenaga terampil yang dibutuhkan.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab urbanisasi ke kota antara lain:

- a. Faktor ekonomi (penyebab utama). Kesulitan hidup di desa karena makin besarnya tekanan penduduk, makin sempitnya tanah pertanian yang tak seimbang lagi dengan pertambahan penduduk, serta kurangnya kesempatan di luar lapangan pertanian. Akibatnya banyak penduduk yang meninggalkan rumahnya untuk pergi kota.
- b. Faktor keamanan, misalnya bencana alam yang menimpa desa.
- c. Di kota, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan masih luas, misalnya sebagai buruh perusahaan, pegawai kantor yang banyak bertebaran di kota dan sebagainya.
- d. Kota mempunyai daya tarik yang besar sekali (terutama bagi pemuda) karena banyaknya fasilitas untuk mengembangkan diri (sekolah, kursus) dan tempat-tempat hiburan.⁶

Sementara keadaan di desa bukan karena sempitnya lapangan kerja namun lebih banyak ditentukan homogenitas lapangan kerja yaitu pertanian, sementara pertambahan jumlah penduduk dan makin majunya pendidikan masyarakat mengakibatkan banyak pencari kerja yang enggan bekerja mengolah tanah dan berternak karena dianggap tidak memberi nilai keuangan secara langsung dibandingkan dengan buruh kota yang secara langsung menerima uang setiap minggu atau setiap bulan.

Untuk menanggulangi dan mencegah arus urbanisasi, beberapa cara untuk mengatasinya antara lain :

- 1) Penyebaran industri ke daerah pedesaan, sehingga dapat menyerap tenaga kerja di desa.
- 2) Meningkatkan usaha transmigrasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- 3) Menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum dan berbagai keterampilan, sehingga warga desa selain pengetahuannya bertambah juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri selain di bidang pertanian.
- 4) Membuat suasana desa lebih hidup, yang dapat menimbulkan suasana yang tidak membosankan khususnya bagi anak-anak muda supaya kerasan tinggal di desa.

Berkenaan dengan kondisi angkatan kerja terutama dengan tingkat pendidikannya di kota besar yang timbul akibat urbanisasi, dapat diketahui bahwa berdasarkan Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) jumlah pekerja yang tidak tamat SD 32,5%, Tamat SD 29,1%, Tamat SLTP 11,4%, Tamat SLTA 22,5%, dan Akademi/PT 3,6%.⁷ Sementara arus migrasi dari lapisan bawah dengan keterampilan yang terbatas serta tingkat pendidikan yang tidak mendukung dalam mencari pekerjaan menyebabkan mereka terjerumus pada kegiatan-kegiatan amoral dan kriminal.

Kondisi itu tentunya akan membawa dampak pada rendahnya mutu angkatan kerja sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan dimensi budaya. Rendahnya tingkat pendudukan menunjukkan bahwa 805 tenaga kerja hanya berpendidikan maksimal SD sehingga sulit untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Sementara dari aspek dimensi budaya ternyata pemahaman tenaga kerja kita terhadap ruang dan waktu masih kurang, sehingga sulit untuk mempertemukan norma-norma yang dituntut oleh sebuah aturan kerja dengan kondisi budaya yang ada. Akibatnya produktifitas rendah karena banyak di antara nilai-nilai budaya tradisional yang tidak sesuai dengan

kebutuhan pembangunan yang perlu diubah dan dimofikasi.⁸ Dilihat dari tingkat pendidikannya penduduk Jawa Timur dalam tahun 1971 menunjukkan bahwa dari penduduk 47% tidak pernah sekolah, 35% pernah sekolah tetapi tidak tamat, 17% tamat SD, 6% tamat SLTP ke atas.

Pembagian daerah rural dan urban menunjukkan perbedaan yang menyolok. Untuk persentase yang tidak pernah sekolah yakni 51% untuk pedesaan dan 28% untuk daerah kota. Meskipun persentase tenaga terdidik dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja tidak seimbang namun tidak berarti keberadaan tenaga kerja tidak diupayakan, baik yang mengenyam pendidikan maupun bagi mereka yang berpendidikan rendah.

Dalam kaitannya dengan penataan sektor tenaga kerja di Jawa Timur upaya yang dilaksanakan ditujukan untuk memanfaatkan tenaga penganggur dan setengah untuk penganggur. Menanamkan atau mengembangkan dalam diri mereka suatu motivasi kerja untuk meningkatkan produktivitasnya di samping mengembangkan kesadaran mereka sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan tersebut di Jawa Timur ditempuh dengan berbagai program antara lain:

1. Proyek Padat karya
2. Proyek pengerahan tenaga sukarela
3. Proyek percontohan peningkatan kesempatan kerja
4. Proyek survey tenaga kerja
5. Pembinaan keselamatan tenaga kerja
6. Proyek research/penanggulangan bahaya narkoba
7. Proyek tenaga kerja transmigrasi

Dalam proyek Padat Karya di Jawa Timur pelaksanaan program yang dijalankan selama Pelita I dengan memilih: wilayah dari kabupaten yang mendesak untuk diperbaiki keadaan sosial ekonominya, wilayah yang banyak tenaga penganggurnya, dan wilayah dimana upah minimum "buruh

kasar” relatif rendah. Bentuk proyek Padat Karya yang dilaksanakan itu meliputi: proyek pengairan, proyek penghijauan, proyek normalisasi jalan pedesaan, dan proyek terasiring. Proyek tersebut dilaksanakan di 16 wilayah (13 kabupaten dan 3 kotamadya) di Jawa Timur yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 13.500 orang per hari dalam tahun 1971. Sementara dalam tahun 1972 proyek padat karya telah meningkat menjadi 19 wilayah (16 kabupaten dan 3 kotamadya) dan menyerap tenaga kerja sebanyak 41.466 orang perhari.

Proyek padat karya tersebut setiap tahun terus meningkat, pada tahun 1974 telah meliputi 22 kabupaten yang secara keseluruhan mampu menambah kesempatan kerja, kesejahteraan rakyat, meningkatkan produktivitas, di samping perbaikan-perbaikan yang nyata dalam bidang prasarana perhubungan maupun prasarana ekonomi/produksi pedesaan.

Dalam proyek pengerahan tenaga sukarela di Jawa Timur ditujukan untuk memelihara dan memperkuat jiwa gotong royong sebagai suatu bagian penting dari kebudayaan Indonesia. hal ini dilakukan dengan jalan menanamkan dan mengembangkannya di dalam diri generasi muda sebagai pelopor-pelopor perubahan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pengerahan tenaga sukarela adalah dengan dibentuknya BUTSI (Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia) yang bertugas mengadakan *recruitment* tenaga kerja sukarela di Jawa Timur serta mengadakan seleksi/pemilihan calon tenaga sukarela dan mengadakan latihan (*training*) serta menentukan tempat/lokasi yang akan ditempati untuk tenaga kerja sukarela tersebut.

Dalam proyek survey tenaga kerja dimaksudkan untuk menemukan masalah ketenagakerjaan yang timbul dalam proyek-proyek pembangunan dan membantu proyek tersebut untuk mengatasi permasalahan. Di samping itu survey juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui volume dan susunan kesempatan kerja yang sudah ada dan yang akan diciptakan oleh proyek-proyek sehingga kebutuhan tenaga kerja dapat ditentukan.

Untuk mengetahui berapa kebutuhan dan pertumbuhan tenaga kerja secara keseluruhan di Jawa Timur dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi masalah tenaga kerja dapat dilihat dari tabel 46 berikut:

Tabel 46
Angkatan Kerja Jawa Timur Pelita I
Usia 10 Tahun Keatas

NO.	KLASIFIKASI	JUMLAH	KETERANGAN
01.	Angkatan kerja	9.321.041	Diatas 10 tahun
02.	Bukan angkatan kerja	2.478.248	
03.	Tidak terjawab	68.335	

Keterangan:

- Bukan angkatan kerja meliputi: anak-anak, orang yang sedang sekolah, ibu-ibu pengurus rumah tangga, pensiunan, orang yang hidup dari bunga dan sewa, cacat, lumpuh, dan lanjut usia.

Tabel 47
Angkatan Kerja Jawa Timur Pelita I Untuk Laki-Laki
Usia 10 Tahun Keatas

NO.	KLASIFIKASI	JUMLAH	KETERANGAN
01.	Angkatan kerja	6.092.237	71%
02.	Bukan angkatan kerja	2.401.924	28%
03.	Tidak terjawab	68.335	0,32%
	JUMLAH	8.521.470	100%

Keterangan:

Dari jumlah 6 juta angkatan kerja laki-laki tersebut masih dapat diklasifikasikan menjadi:

Pekerja = 5.973.750 98 %

Pencari Kerja = 118.487 2 %

Tabel 48
Angkatan Kerja Jawa Timur Pelita I
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan

NO.	LAPANGAN KERJA	PERSENTASE	KETERANGAN
01.	Pertanian		
02.	Perdagangan		
03.	Jasa-jasa		
04.	Industri		
05.	Lain-lain		

Sumber: Jawa Timur Membangun 2, hlm. 287

Untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja tentunya dibutuhkan berbagai lapangan pekerjaan yang dapat lebih banyak emnampung dan menjamin penghasilan yang layak. Dalam hal ini sektor Perusahaan dan Industri memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menyediakan lapangan kerja.

Perkembangan penyerapan Tenaga Kerja di perusahaan khususnya bidang industri dalam pelita III (1979--1983) mengalami penambahan penyerapan tenaga kerja yang cukup berarti. Hal ini terlihat dalam tabel 49 berikut ini:

Tabel 49
Penyerapan Tenaga Kerja Perusahaan Bidang Industri
Selama Pelita III

NO.	TAHUN	I.L.D orang	I.K.D orang	AN INKRA	I. KECIL orang	JUMLAH orang
01.	1979-1980	22418	12734	320301	721851	1077304
02.	1980-1981	23839	12829	324283	806892	1166853
03.	1981-1982	23239	12929	331249	822726	1190143
04.	1982-1983	23331	13430	344935	1051719	1433415

Sumber: Repelita IV Jatim Buku IIC hlm. 26-34

Keterangan:

ILD = Industri Logam Dasar
 IKD = Industri Kimia Dasar
 AN INKRA = Ankea Industri
 I. KECIL = Industri Kecil

Jumlah itu masih ditambah dengan sektor tenaga kerja yang dapat ditampung dalam perusahaan swasta PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Dalam Pelita III jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor swasta PMA dan PMDN dibandingkan dengan kesempatan kerja yang ditargetkan di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 50 berikut:

Tabel 50
Target Perkiraan dan Penyerapan Tenaga Kerja
Dalam PMA dan PMDN

NO.	TAHUN	PERKIRAAN ORANG	PENYERAPAN YANG TERCAPAI			PERSEN
			PMA	PMDN	JUMLAH	
01.	1979-1980	10.516.592	147	33.702	33.849	0.33
02.	1980-1981	10.742.928	1.127	12.197	13.324	0.12
03.	1981-1982	10.944.660	929	11.282	12.211	0.11
04.	1982-1983	11.144.947	2.726	43.959	46.685	0.42
05.	1983-1984	11.348.900	556	13.882	14.438	0.13
	JUMLAH	54728027	5485	115022	120507	0.22

Sumber: Repelita IV Jatim Buku IIC hlm. 26-35

Dari tabel 50 menunjukkan bahwa, penyerapan tenaga kerja dalam sektor perusahaan PMA dan PMDN rata-rata pertahun mencapai 24.101 orang. Dalam Repelita IV penyerapan tenaga kerja akan ditingkatkan dan diintensifkan dalam sektor pertanian/perkebunan. Sektor ini lebih banyak menyerap tenaga kerja, di samping peningkatan sektor industri mesin

yang diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja naik 5% dari angkatan kerja selama Repelita III, yaitu $5\% \times 24.101$ angkatan kerja = 25.306 orang.

Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri itu perlu mendapat perhatian mengingat pentingnya menyerap investasi asing ke Indonesia guna menambah devisa negara. Selama Repelita IV (1984-1989) investasi dari PMD dan PMDN dapat dilihat dalam tabel 51 berikut ini:

Tabel 51
Investasi PMA dan PMDN Di Jawa Timur

TAHUN	INVESTASI PMDN/PMA
1984/1985	Rp. 630.000.000.000;
1985/1986	Rp. 661.500.000.000;
1986/1987	Rp. 694.575.000.000;
1987/1988	Rp. 729.303.000.000;
1988/1989	Rp. 765.768.000.000;
JUMLAH	Rp. 3.481.146.000.000;

(Perhitungan berdasarkan harga kotor)

Sumber: Repelita IV Jatim Buku IIC hlm. 26-60

Hingga Repelita IV, permasalahan tenaga kerja di Jawa Timur masih membutuhkan penanganan secara serius. Mengingat jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan luas wilayahnya terutama di daerah-daerah yang sangat padat penduduknya dan di kota. Memasuki Repelita IV (1983) penduduk Jawa Timur telah mencapai 30.472.600 orang dengan pertumbuhan 1,23% pertahun. Jika diukur dengan kondisi ideal Jawa Timur yang seharusnya hanya dihuni sekitar 20 juta sampai 22 juta jiwa, maka kondisi penduduk Jawa Timur cukup tinggi resiko masalah ketenagakerjaan.

Dilihat dari angkatan kerja Jawa Timur secara kuantitatif, dapat digambarkan bahwa jumlah angkatan kerja tahun 1983

sebesar 13.693.000 orang, terdiri dari 8.925.638 laki-laki dan 4.767.762 wanita. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan di Jawa Timur, maka persentase angkatan kerjanya sebesar 44,9%. Dari jumlah itu, 40,36% di antaranya merupakan angkatan kerja yang berusia muda yaitu usia 15-29 tahun. Jika dibandingkan dengan keadaan kesempatan kerja, maka berdasarkan sensus penduduk tahun 1980 kesempatan kerja untuk tahun 1983 diproyeksikan sebesar 13.475.700 yang tersebar dalam sektor pertanian (yang paling besar), sektor jasa dan kemasyarakatan, perdagangan dan industri, dan sektor listrik gas dan air (yang paling kecil).

Persentase tiap-tiap sektor kesempatan kerja yang tersedia dapat dilihat dalam tabel 52 berikut ini:

Tabel 52
Persentase Kesempatan Kerja Dalam Tiap Sektor
Selama Pelita III Di Jawa Timur

NO.	SEKTOR	PERSENTASE
01.	Sektor Pertanian	56,6%
02.	Sektor Perdagangan	14,2%
03.	Sektor Jasa	13,1%
04.	Sektor Industri	9,2%
05.	Sektor Bangunan	2,7%
06.	Sektor Angkutan	2,7%
07.	Lain-lain	0,5%
08.	Sektor Pertambangan	0,5%
09.	Sektor Keuangan	0,4%
10.	Listrik, Gas dan Air	0,1%

Sumber: Repelita IV Jawa Timur IIB, hlm. 13.12--3

Jika dilihat dari persentase tersebut, maka hanya terdapat 217.700 orang yang masih berstatus pencari kerja. Namun jika dilihat dari kondisi yang telah bekerja, maka terdapat tenaga kerja yang bekerja hanya 9 jam atau kurang dalam waktu

seminggu, sebanyak 65 atau sebesar 808.542 orang. Mereka ini tergolong dalam kelompok tenaga kerja setengah penganggur.

Dilihat dari segi upah dan besarnya jumlah tenaga kerja, sebenarnya masih belum memenuhi harapan dari pemerintah. Karena tingkat kesejahteraan mereka yang telah bekerja juga sangat rendah karena taraf upah yang mereka terima masih rendah. Apalagi jika dilihat dari segi angkatan kerja Indonesia di mana usia 10 tahun ke atas digolongkan dalam usia mencari kerja atau yang telah mempunyai pekerjaan tertentu dalam suatu kegiatan ekonomi. Jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja dan pencari kerja di Jawa Timur selama Pelita III dapat dilihat dalam tabel 53 berikut ini:

Tabel 53
Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja Dan Pencari Kerja
. Di Jawa Timur Tahun 1979 -- 1983

URAIAN	1979	1980	1981	1982	1983
Angkatan Kerja	11.396.992	11.634.332	13.140.300	13.414.000	13.693.400
Yang Tertampung	11.224.172	11.458.720	12.931.400	13.200.700	13.475.700
Pencari Kerja	172.820	175.612	208.900	213.300	217.700

Sumber: Repelita IV Jawa Timur IIB, hlm. 13.12-4

Upaya-upaya untuk menjamin kesejahteraan dan Perlindungan terhadap hak-hak para pekerja, sejak Pelita III telah dibina hubungan ketenagakerjaan dan pengawasan norma-norma kerja. Hal ini mencakup usaha-usaha yang menuju pada pengurusan dan pembinaan tenaga kerja yang sudah bekerja yang meliputi semua sektor sehingga dapat dijamin keadaan dan kondisi serta lingkungan kerja yang lebih baik dalam rangka menuju pada kesejahteraan.

Adapun upaya-upaya Pembinaan Hubungan Tenaga Kerja itu antara lain:

- (a) Pembinaan organisasi-organisasi tenaga kerja, seperti terbentuknya Serikat Buruh di perusahaan-perusahaan (SBLP BASIC) dan pada tahun 1983 di Jawa Timur telah terbentuk 1.472 Basic dan DPC FBSI sebanyak 31 buah.
- (b) Penyelenggaraan pembinaan terhadap Badan-badan Kerja Sama *Tripartite* dan *Bipartite*.
- (c) Pembinaan dan Pendidikan Tenaga Buruh.
- (d) Meningkatkan jaminan sosial dengan meningkatkan keanggotaan ASTEK yang sampai Juni 1983 telah mencapai 863 perusahaan.
- (e) Pembinaan Norma-norma Keselamatan Kerja dan Kesehatan Pekerja serta Pembinaan Norma-norma Perlindungan Tenaga Kerja.

Hingga Repelita IV sasaran dalam sektor tenaga kerja yang hendak dicapai secara umum adalah perluasan dan pemerataan kesempatan kerja, untuk mengatasi jumlah pencari kerja yang terus meningkat setiap tahun. Hal ini karena hingga akhir Pelita IV jumlah penduduk Jawa Timur akan mencapai lebih 32.387.600 orang, jumlah angkatan kerjanya sekitar 13.754.300 orang sementara yang masih tergolong pencari kerja sekitar 222.200 orang. Kondisi tenaga kerja relatif sama seperti Pelita III yaitu standar normal yang masih jauh dan jumlah jam kerja dalam seminggu yang belum optimal (hanya sekitar 9 jam). Selama Pelita IV pertumbuhan angkatan kerja sekitar 2,04% pertahun dengan rincian kesempatan dan pencari kerja pada tabel 54 berikut :

Tabel 54
Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja, Pencari Kerja
Di Jawa Timur Tahun 1984--1988

NO.	TAHUN	ANGKATAN KERJA	KESEMPATAN KERJA	PENCARI KERJA
01.	1984	13.976.500	13.754.300	222.200
02.	1985	14.263.200	14.036.400	226.800
03.	1986	14.558.100	14.327.200	231.500
04.	1987	14.848.800	14.612.800	236.100
05.	1988	15.146.800	14.906.000	240.800

Sumber : Depnaker Jatim Dalam Repelita IV Jawa Timur Buku IIB,
 hlm. 13.1-15

Sementara jumlah kesempatan kerja menurut sektor lapangan usaha di Jawa Timur selama Pelita IV dapat dilihat dalam tabel 55 berikut ini:

Tabel 55
Kesempatan Kerja Menurut Sektor Lapangan Kerja
Di Jawa Timur Tahun 1984--1988

URAIAN	1984	1985	1986	1987	1988
1. Pertanian, kehutanan, perikanan	7.784.934	7.944.602	8.109.195	8.270.845	8.436.796
2. Pertambangan, penggalian	68.772	70.182	71.636	73.064	74.530
3. Industri	1.265.396	1.291.349	1.318.102	1.344.377	1.371.352
4. Listrik. dan air	13.754	14.036	14.327	14.613	14.906
5. Bangunan	371.366	378.983	386.834	394.546	402.462
6. Perdagangan	1.953.110	1.993.169	2.034.463	2.075.018	2.116.652
7. Angkutan	371.366	378.834	386.834	394.546	402.462
8. Keuangan, Asuransi	55.017	56.146	57.309	58.451	59.624
9. Jasa-jasa	1.801.813	1.838.768	1.876.863	1.914.277	1.952.686
10. Lain-lain	68.772	70.182	71.636	73.064	74.530

Sumber: Repelita IV Jawa Timur IIB, hlm. 13.1-18

Untuk menunjang peningkatan peranan tenaga kerja di Jawa Timur, dalam Pelita IV disusun program dan proyek-proyek ketenagakerjaan seperti

(1) Program Pembangunan Desa

Program pembangunan desa diarahkan pada proyek padat karya dengan melibatkan rakyat desa untuk mendapatkan pekerjaan terutama pada saat tidak ada pekerjaan. Di samping itu juga sempitnya lapangan kerja di desa maka padat karya merupakan alternatif menampung tenaga kerja di desa tanpa harus mendatangkan tenaganya ke kota. Hingga tahun 1988/1989 jumlah proyek padat karya menjangkau 245 kecamatan di Jawa Timur dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.379.000.

(2) Program Penggunaan dan Penyebaran Tenaga Kerja

Program ini dimaksudkan untuk menempatkan tenaga kerja melalui kegiatan antar kerja yaitu Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara. Begitu juga diadakan pembatasan terhadap tenaga asing pendatang.

(3) Program Latihan dan Ketrampilan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan mendidik para tenaga kerja guna mendapat kesempatan dalam lowongan kerja sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan.

Dan masih banyak lagi program tenaga kerja di Jawa Timur yang dilaksanakan, seperti Pembinaan Hubungan Kerja, Penanaman Norma-norma Pekerja, program Kesejahteraan Tenaga Kerja, dan sebagainya.

Catatan

1. Mien A. Rifai dkk, *Mohammad Noer*, Yayasan Biografi Indonesia, Jakarta, MCMXCI hlm. 82.
2. Amanat Muhammad Noer pada apel Bendera 17 April 1972 dalam Mien A. Rifai, hlm. 83.
3. Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Tingkat I Jawa Timur 1984 – 1989 Buku IIA hlm. 1.
4. UUD, P-4 dan GBHN 1978, Team Pembina Penatar dan Bahan-bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, hlm. 64.
5. Gromay, Drs. Franciskus (1993) *Prospek Industri Jasa Pariwisata*, Kanwil XV Deparpostel, Sulawesi Utara.
6. Tim ISD IKIP Surabaya, hlm. 112
7. Isbondong Tjahjono, *Gejala Polarisasi*, hlm. 4.

BAB V

BIDANG SOSIAL DAN KEBUDAYAAN JAWA TIMUR PADA MASA PEMBANGUNAN (1969--1988)

Bidang sosial budaya mencakup beberapa aspek kehidupan yang senantiasa berpengaruh langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat. Karena itu bidang sosial budaya sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari departemen yang berkaitan langsung, namun seharusnya menjadi tanggung jawab dari semua departemen. Hal ini karena perubahan sosial budaya merupakan ciri menonjol dari masyarakat yang masih tradisional (yang masih terikat oleh tradisi) maupun dalam masyarakat modern (telah banyak bersinggungan dengan perubahan dan kemajuan khususnya sains dan teknologi).

Dilihat dari segi cakupannya, bidang sosial budaya meliputi; sektor agama, sektor pendidikan dan kebudayaan, sektor perburuan, tenaga kerja dan kependudukan, sektor kesehatan dan keluarga berencana, sektor kesejahteraan sosial, perumahan dan penyediaan air minum, sektor pemuda olahraga dan Pramuka.

Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 8 wilayah kotamadya, merupakan daerah tingkat I di Indonesia yang cukup maju dalam bidang pembangunan. Demikian pula dalam bidang sosial budaya, Jawa Timur mengalami perkembangan dan kemajuan serta perubahan yang dinamis sesuai dengan pola hidup masyarakat dan fasilitas yang tersedia.

5.1 Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah gejala yang inheren dalam setiap perkembangan (*development*) atau pertumbuhan (*growth*). Teori perkembangan yang kemudian dikenal dengan *developmentalisme*, menggambarkan bahwa masyarakat mengalami pertumbuhan dan perkembangan, suatu proses yang analog (menyamakan yang sebenarnya tidak sama) dengan proses organis. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu tidak sendirinya menunjukkan arah pertumbuhan serta tujuan. Dalam hal ini terikat pada kerangka teori yang meliputi: *evolusionisme*, *fungsionalisme*, *positivisme* yang mencakup pelbagai paradigma yang menunjukkan bahwa masing-masing perubahan dan perkembangan itu menunjukkan arah yang berbeda-beda.¹

Di Jawa Timur perubahan sosial itu tentunya tidak dapat dihindari sebagai dampak dari proses pembangunan dan tersedianya fasilitas bagi sebagian besar masyarakat Jawa Timur. Terlebih lagi dengan derasnya arus informasi dan komunikasi, maka perubahan sosial dalam masyarakat sangat cepat. Perubahan itu tentunya ada segi negatifnya namun juga lebih banyak positifnya.

Derasnya arus informasi dan komunikasi membawa dampak pada perubahan tata nilai. Ada sebagian masyarakat yang memang benar-benar sudah siap untuk menerima berbagai informasi yang saat itu menjadi sangat penting dan diperlukan, namun demikian kiranya perlu diperhatikan pula bahwa ada sebagian masyarakat lain yang ingin mempertahankan tata nilai tradisional yang dirasakan cukup penting.

Kondisi yang menunjang perubahan sosial dalam masyarakat di Jawa Timur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tersedianya sarana komunikasi yang cukup banyak seperti: televisi, radio, surat kabar dan majalah, serta jaringan informasi lainnya. Di samping itu terjangkaunya wilayah Jawa Timur oleh transportasi yang hampir meliputi seluruh pelosok desa menjadikan mobilitas penduduk makin

lancar. Mobilisasi penduduk dari desa ke kota atau sebaliknya dari kota ke desa membawa pengaruh dalam tata nilai masyarakatnya. Bahkan sebagian masyarakat telah banyak yang meninggalkan daeahnya untuk mencari kerja ke luar negeri dengan menjadi TKI baik yang resmi maupun yang ilegal. Mereka telah mampu membawa perubahan dalam tata ekonomi sebagian masyarakat desa serta lemahnya ikatan tradisional dengan kampung halaman.

Membanjirnya arus barang impor ke Jawa Timur yang berupa barang-barang konsumsi maupun barang-barang produksi, menyebabkan sebagian masyarakat memiliki pilihan dalam memenuhi selera, baik makanan maupun pakaian. Kecenderungan untuk membeli pakaian produk luar atau merek luar negeri dan makanan khas luar negeri serta aneka macam buah-buahan telah menjadikan kondisi sosial sebagian masyarakat khususnya yang tinggal di kota dijangkiti penyakit demam barang impor. Hal ini dapat dimaklumi mengingat barang-barang impor dapat ditemukan di berbagai toko dan bahkan di kaki limapun dapat ditemukan barang atau buah dari luar negeri.

Keberhasilan pembangunan telah menaikkan taraf hidup sebagian masyarakat Jawa Timur ketingkat yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam Repelita IV yaitu: Pertama, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil. Kedua, meningkatkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian pertumbuhan pembangunan antar daerah...., Ketiga, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap-tahap pembangunan berikutnya.²

Majunya taraf kehidupan masyarakat tersebut membawa dampak pada kebutuhan berekreasi bagi masyarakat juga tinggi, baik rekreasi (berwisata) lokal maupun mengarah keada rekreasi ke luar negeri. Demikian pula kehidupan di Metropolitan Surabaya telah banyak diwarnai berbagai Mall, Plaza dan Dep. Store yang membawa dampak pada tingginya pola konsumsi masyarakat terhadap barang-barang mewah.

Perubahan sosial yang diakibatkan sebagai dampak pariwisata kiranya juga dapat dilihat di daerah-daerah sasaran wisata yang meliputi segi positif maupun segi negatif.

Di daerah kunjungan wisata Kawasan Gunung Bromo (Tengger) misalnya, perubahan sosial sebagai dampak pariwisata lebih banyak nilai positifnya yaitu masuknya arus teknologi transportasi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Banyak masyarakat yang menjalankan usaha dalam sektor transportasi sebagai usaha sampingan di samping tetap sebagai petani bagi yang memiliki tanah pertanian. Perkembangan transportasi itu meliputi berbagai jenis kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Setelah jalan menuju Ngadisari (yang dianggap sebagai postnya wisatawan) diaspal maka arus kendaraan seperti bus, truk, mobil station, sedan, jeep dan sepeda motor, hilir mudik melewati jalan tersebut.

Keberadaan teknologi transportasi seperti kendaraan jeep sebagai angkutan umum menuju lokasi wisata tidak berarti mematikan usaha transportasi tradisional seperti kuda yang telah lama menjadi sarana angkutan. Keberadaan kuda tetap dipertahankan dan diberi kesempatan untuk tetap mendapat lahan kehidupan dengan membagi jalur yang bisa di lewati jeep dan jalur yang hanya boleh digunakan kuda. Perubahan sosial dalam masyarakat Tengger dengan semakin deras arus wisatawan tersebut kiranya tidak melunturkan identitas masyarakat Tengger. Sebagian besar masyarakat yang semula petani juga masih tetap mempertahankan usaha tersebut walaupun menjalankan usaha sampingan. Mereka tetap mempertahankan tanah sebagai usaha pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa rasa keterikatan petani pada lahan pertaniannya masih cukup kuat.³

Perubahan sosial dalam masyarakat Jawa Timur kiranya masih dalam taraf yang wajar dan mampu untuk tetap menunjukkan identitas dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Hal ini nampak dengan masih tingginya minat masyarakat dalam berbagai bentuk ritual kehidupan yang

masih memegang teguh nilai-nilai tradisional seperti upacara tradisional di Tengger, upacara Larung di Telaga Ngebel Ponorogo, upacara Sembonyo di Trenggalek yang masih tetap terjaga kelestariannya.

Demikian pula masih banyak budaya-budaya daerah Jawa Timur yang masih tetap lestari dan digemari oleh sebagian besar masyarakat seperti permainan khas Jawa Timur yang masih digemari anak-anak diberbagai daerah. Jenis permainan itu seperti permainan patrol di Banyuwangi yang masih banyak digemari dan bahkan berkembang di beberapa daerah Jawa Timur hingga dewasa ini. Dan masih banyak lagi berbagai jenis permainan yang masih digemari anak-anak Jawa Timur khususnya desa-desa yang berkembang dalam masyarakat Jawa seperti Gethok-gethok Uwi, Kolikan, Panjak Hore dan lain-lain dan berbagai permainan yang berkembang dalam masyarakat Madura atau masyarakat campuran Jawa-Madura.

5.2 Agama dan Adat Istiadat

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kewajiban membangun agama di Indonesia khususnya di Jawa Timur merupakan kewajiban bersama dari seluruh masyarakatnya. Hal ini tidak berbeda dengan demokrasi yang bertindak untuk kepentingan bangsa, dan berusaha agar kehidupan sosial di Indonesia ini adil, dan tingkah laku bangsa Indonesia selalu dilandaskan kepada perikemanusiaan.

Dalam sektor agama yang menjadi tanggung jawab langsung Departemen Agama, sektor ini meliputi sub sektor agama Islam, sub sektor Katholik, sub sektor Hindu dan Budha, dan sub sektor Kristen Protestan. Sebenarnya tugas Departemen Agama di Jawa Timur, hasilnya sulit untuk diukur dengan angka atau dijabarkan dalam grafik dan statistik. Hal ini karena Departemen Agama di Jawa Timur tidak hanya membangun fisik semata-mata seperti halnya membangun sebuah jembatan yang langsung tampak hasilnya, melainkan bidang garapannya adalah membangun manusia yang melewati jembatan tersebut. Demikian pula Departemen Agama

tidak membangun pabrik-pabrik, tetapi membangun manusia yang menjalankan dan bekerja di pabrik-pabrik tersebut. Departemen Agama tidak membangun gedung, tetapi membangun manusia yang menempati gedung-gedung tersebut. Jadi manusia itulah yang menjadi bidang garapan dan sasaran utama pekerjaan Departemen Agama.

Walaupun demikian, sebagai gambaran sekitar kegiatan kerja yang telah dilaksanakan oleh Kanwil Departemen Agama di Provinsi Jawa Timur selama periode 1969--1988 dapat dikemukakan sebagai berikut: pada tahun 1969 sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada saat itu pembangunan nasional Indonesia merupakan tahun pertama dicanangkannya model Pembangunan Lima Tahun yang kita kenal Pelita I. Sejak awal Orde Baru pemerintah Indonesia khususnya Jawa Timur dihadapkan pada permasalahan yang sama yaitu sikap mental masyarakat yang masih trauma akibat Peristiwa G 30 S/PKI.

Karena itu pembangunan bidang agama di Jawa Timur ditujukan pada peningkatan fasilitas-fasilitas prasarana fisik, sebagai usaha pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya (beribadat, pendidikan, penerangan/bimbingan dan lain-lain). Dalam sub sektor agama Islam, upaya yang dilakukan pada awal Pelita I berupa peningkatan rasa kesadaran beragama dan melaksanakan amaliyah agamanya, sebagai manifestasi kesadaran. Meningkatkan ketebalan dan kekuatan keimanan umat Islam dengan memperbaiki akhlak dan budi pekertinya. Meningkatkan kesejahteraan hidup terutama rohaniyah mental spiritual. Meningkatkan usaha pembangunan agama Islam yang ditujukan untuk pembinaan suasana hidup rukun di antara umat beragama, dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

Selama Pelita I (1969--1973) program yang dilaksanakan dalam sub sektor agama Islam berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Departemen Agama Pusat. Kebijakan pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh Departemen Agama Jawa Timur meliputi:

1. Pembangunan fasilitas dan rehabilitasi sarana fisik. Dalam menangani hal ini menjadi tanggung jawab Inspeksi Urusan Agama, Inspeksi Pendidikan Agama, yang pembangunannya tersebar di seluruh daerah-daerah.
2. Pembinaan agama di lingkungan keluarga, yang menjadi tugas Inspeksi Urusan Agama dan BP4.
3. Pembinaan agama di lingkungan sekolah yang menjadi tanggung jawab Inspeksi Pendidikan Agama.
4. Pembinaan agama di lingkungan kampus, yang menjadi tugas Direktorat Pendidikan Tinggi dan IAIN.
5. Pembinaan agama di lingkungan masyarakat, yang menjadi tugas Inspeksi Penerangan Agama.
6. Pembinaan agama dalam hal perselisihan yang menjadi tanggung jawab bidang peradilan.

Program itu dibina melalui peningkatan kualitas tenaga inspeksi daerah-daerah dan memperbaiki kualitas guru-guru Agama Islam serta perbaikan sistem, dan kurikulum pendidikan agama di sekolah. Hal ini diutamakan di Jawa Timur mengingat pada awal Repelita I menunjukkan banyaknya kondisi keluarga yang labil, frekuensi perceraian yang tinggi, *broken home*, banyaknya anak durhaka pada orang tua. Meskipun hal itu banyak faktor menjadi penyebabnya namun telah menjadi perhatian khusus bagi para Inspeksi Departemen Agama Jawa Timur untuk memantapkan pembinaan agama terutama di lingkungan keluarga dan sejak sebelum melaksanakan pernikahan, yang dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera aman tentram dan penuh kasih sayang.

Dalam lingkungan Perguruan Tinggi, masalah *misunderstood*, agama yang masih ditakuti sebagian intelektual di Perguruan Tinggi, mahasiswa yang kadang-kadang sekuler, diupayakan melalui pemberian bimbingan dan pendidikan agama di Perguruan Tinggi serta menghidup suburkan suasana agama di dalam kampus.

Upaya untuk membangun sarana fisik maupun non fisik tersebut tidak terlepas dari dana yang jumlahnya cukup besar. Untuk pendanaan di Departemen Agama Jawa Timur semuanya dibebankan pada anggaran belanja negara.

Pembangunan fisik yang dibiayai dari APBN itu meliputi; proyek pembangunan gedung kantor yang mencapai jumlah Rp. 11.426.000; Pembangunan Balai Nikah sebesar Rp. 27.058.077,8. Proyek rehabilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah, mencapai Rp. 17.998.353,50; Proyek pembangunan gedung-gedung sekolah dan peningkatan mutu pendidikan agama yang mencapai jumlah Rp. 149.666.000.

Sedangkan biaya pembangunan non fisik yang meliputi penerangan, bimbingan da'wah agama Islam, yang menjadi tanggung jawab inspeksi penerangan sejumlah Rp. 10.000.000; yang digunakan untuk berbagai kegiatan penerangan dan penyuluhan agama seperti : Penerbitan brosur-brosur, brosur-brosur/majalah penerangan agama, penataran petugas penerangan/khotib, bimbingan mental, ceramah pada karyawan instansi/lembaga pemasyarakatan, bimbingan rokhani pada masyarakat tersing (suku Samin, Tengger) dan bimbingan agama di daerah-daerah basis komunis seperti Banyuwangi dan Blitar Selatan.

Tabel 56
Rekapitulasi Biaya Pembangunan
Bidang Agama (Islam) Jawa Timur 1969-1974

NO.	KEGIATAN	SUB SEKTOR	BIAYA	KETERANGAN
01.	Pemb. gedung kantor	Depag	11.426.000	1970-1971
02.	Pemb. balai nikah Ins.	Ur. Agama	27.058.077,08	1969 s.d. 1974
03.	Rehabilitasi/t. ibadah	Ins. Ur. Agama	17.998.353,50	1969 s.d. 1974
04.	Pemb. gedung sekolah	Ins. Pendidikan	149.666.000	1969 s.d. 1974
05.	Proyek non fisik	Ins. Penerangan	10.000.000	1969 s.d. 1974
JUMLAH			Rp. 216.148.360,50	

Sumber : Jawa Timur Membangun 1

Tabel 56 tentang biaya pembangunan sektor agama Islam tersebut meliputi seluruh sub sektor inspeksi yang tersebar di seluruh daerah kabupaten/kotamadya di Jawa Timur. Adapun hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan sektor agama Islam di Jawa Timur selama Pelita I meliputi:

- Gedung-gedung Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Kediri, Pacitan, Probolinggo, Situbondo, Jember dan Mojokerto.
- Adapun rehabilitasi/peluasannya pembangunan masjid/musholla yaitu: masjid Jami' Genteng (Banyuwangi), Masjid Khusnul Khotimah di Surabaya, Masjid Jami' Kabupaten Jombang, Gedung Kantor Perwakilan Departemen Agama di Kabupaten Mojokerto dan Tulungagung.
- Gedung Balai Nikah dan Penasehatan Perkawinan di Kabupaten Probolinggo, Surabaya, Gresik, Pasuruan, Banyuwangi, Bojonegoro, Mojokerto, dan Malang.

Dari sejumlah proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik selama Pelita I dapat dianggap cukup berhasil dan berjalan sesuai dengan DIP (Daftar Isian Proyek) yang diajukan. Hal ini dapat dilihat dari tabel peningkatan jumlah gedung maupun jumlah siswa pada sekolah-sekolah agama seperti tabel 57 berikut ini:

Tabel 57
Sekolah Agama Islam Di Jawa Timur
Selama Tahun 1969--1974

NO.	NAMA SEKOLAH	STATUS	GEDUNG	SISWA
01.	TK Islam	Swasta	620	40.758
02.	Madrasah Islam	Negeri	37	10.038
03.	Madrasah Islam	Swasta	5.330	750.035
04.	Madrasah Tsanawiyah	Negeri	35	5.235
05.	Madrasah Tsanawiyah	Swasta	329	35.648
06.	Madrasah Aliyah	Negeri	11	1.826
07.	Madrasah Aliyah	Swasta	57	8.752
08.	PGAN dan PPUPAN	Negeri	28	7.352
09.	PGA	Swasta	184	22.353
10.	PGA 6 tahun	Negeri	20	11.488
11.	PGA 6 tahun	Swasta	56	7.384

Sumber : Jawa Timur Membangun 1

Hasil-hasil lainnya yang dapat dianggap sebagai keberhasilan pembangunan dalam sektor agama selama Pelita I adalah tumbuhnya kesadaran umat Islam untuk menjalankan agamanya, baik yang bersifat ritual (ibadah) seperti sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, sholat Jum'at dan sholat lima waktu. Begitu juga ibadah-ibadah yang berkaitan dengan sosial seperti pengumpulan zakat untuk fakir miskin, atau peringatan hari-hari besar agama Islam yang cukup semarak.

Hal lain yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas agama Islam adalah meningkatnya kegiatan pengajian-pengajian dan ceramah-ceramah agama dan meningkatnya jumlah jamaah Haji. Kondisi itu telah menunjukkan adanya peningkatan syiar agama Islam yang makin mantap dan menjadi landasan dalam tahap pembangunan agama berikutnya.

Dalam sub sektor agama Katholik, Hindu, Budha dan Kristen Protestan kiranya juga tidak jauh berbeda dengan sub sektor agama Islam. Namun karena jumlah penduduk yang beragama di luar agama Islam jumlahnya relatif lebih sedikit maka jumlah dana dan sarana yang dibangun juga relatif lebih sedikit. Pembangunan fisik dalam Gereja Katholik misalnya tidak ada laporan tertulis dari Departemen Agama tentang besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sub sektor agama Katholik. Namun Gubernur dan Walikota Surabaya ikut menyumbang dalam perbaikan Gereja Paroki di Ngagel Surabaya dan Gereja Katholik paroki di Darmo Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan dalam sektor agama menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan umatnya.

Dalam pembangunan non fisik Departemen Agama Pusat, juga memberikan biaya untuk Jawa Timur bagi umat Katholik seperti untuk brosur-brosur upgrading, penerangan, siaran RRI, dan mencetak buku-buku perjanjian lama dan perjanjian baru meliputi 200 eks pada tahun 1971, dan 200 eks pada tahun 1972.

Hingga menginjak Repelita III dan IV keadaan kehidupan beragama di Jawa Timur semakin subur dan mantap baik

kehidupan intern umat beragama maupun kehidupan antar umat beragama dengan pemerintah.

Dilihat dari segi jumlah pemeluk agama, sebagian besar penduduk di Jawa Timur memeluk agama Islam. Sedangkan agama-agama lain yang juga dipeluk masyarakat Jawa Timur adalah Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan lain-lain. Jumlah pemeluk agama pada tahun 1981 terdiri dari: Islam 96%, Kristen 1,29%, Katholik 0,59%, Hindu 0,68%, Budha 0,26%, lain-lain 0,46%.

Usaha-usaha yang dilaksanakan di Jawa Timur dalam membina kerukunan ummat beragama selama Pelita III antara lain dengan mengadakan observasi bersama antar umat beragama di Lamongan pada tahun 1979/1980, kerja sama sosial antar umat beragama di Surabaya dan Lamongan, dan kegiatan bersama antar umat beragama di Surabaya, Madiun, Jember tahun 1982/1983. Di samping itu juga stimulan dari pemerintah terhadap umat beragama untuk meningkatkan partisipasi dalam membangun tempat ibadah dan sekaligus bantuan pemerintah (Depag) untuk tempat ibadah. Hingga tahun 1984 jumlah tempat ibadah yang mendapat bantuan terdiri dari 253 masjid, 6 gereja katholik, 5 gereja protestan, 9 pura dan 5 wihara. Adapun jumlah tempat ibadah di Jawa Timur hingga Repelita II dapat dilihat dalam tabel 58 berikut ini:

Tabel 58
Perkembangan Tempat Ibadah Di Jawa Timur
Tahun 1979--1984

NO.	TEMPAT PERIBADATAN	TAHUN				
		1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
01.	Masjid	17.756	18.105	18.605	18.655	18.701
	Langgar	149.091	148.561	148.932	149.304	149.677
02.	Gereja Katholik	206	210	212	215	218
03.	Gereja protestan	1.337	1.354	1.372	1.389	1.406
04.	Pura	253	260	263	266	269
05.	Wihara/Klenteng	107	108	109	111	112
	Jumlah	166.744	168.598	169.497	169.940	170.383

Sumber: Repelita IV Jawa Timur Buku IIB. Hlm. 15-4

Dalam Repelita IV sasaran di bidang pembangunan agama tetap melanjutkan, mengembangkan, dan meningkatkan sasaran-sasaran dari Pelita III seperti: pembinaan sarana kehidupan beragama, melanjutkan pembangunan fisik, pembangunan kantor dan komplek asrama Balai Diklat Teknik Keagamaan Surabaya dan membangun Balai Nikah di KUA kecamatan se-Jawa Timur dan pembangunan rumah dinas untuk pejabatnya.

Selama Repelita IV juga direhabilitasi tempat-tempat peribadatan seperti: masjid 10 buah di tiap kabupaten/ktamadya, gereja Protestan 10 buah pertahun anggaran, gereja Katholik 10 buah per tahun anggaran, Pura 10 buah per tahun anggaran dan wihara 10 buah per tahun anggaran.

Khususnya untuk agama Islam dalam Pelita IV juga dibangun 13 buah PGAN, 34 buah MAN, 79 buah MTS, 41 buah MIN, dan peningkatan fasilitas ibadah haji, pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama, serta pembangunan Perguruan Tinggi Agama Islam (IAIN) Sunan Ampel. Di samping itu juga diselenggarakan penatan pegawai, penerangan/bimbingan da'wah agama/khotbah, bimbingan P4 bagi pemuka agama/juru penerang agama, pembinaan generasi muda, bantuan kepada pondok pesantren, penataran guru agama dan guru agama di sekolah umum.

Di samping pemeluk agama di Jawa Timur juga terdapat beberapa penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan kepada penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan dalam rangka pembangunan kebudayaan, karena Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kenyataannya merupakan bagian kebudayaan nasional yang hidup dan dihayati sebagian bangsa Indonesia. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dengan tujuan: (a) agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru; (b) pembinaan itu sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam rangka pembinaan kepada Penghayat Kepercayaan tersebut di Jawa Timur kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan inventarisasi terhadap Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hal-hal yang telah dilakukan selama Pelita III dalam rangka pelaksanaan inventrisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- (1) Organisasi Kepercayaan:
 - Inventarisasi tahun 1979-1982 sebanyak 86 organisasi
 - Inventarisasi tahun 1982-1983 sebanyak 7 organisasi
- (2) Data Penghayat Kepercayaan
 - Tahun 1979--1982 sebanyak 100.533 orang
 - Tahun 1982/1983 sebanyak 21.776 orang

Program yang dilaksanakan dalam Perikehidupan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan untuk mengadakan identifikasi dan pengenalan perikehidupan penghayat kepercayaan dan pembinaan budi luhur bangsa.

5.3 Seni Budaya

Kebudayaan dimaksudkan adalah sebagai hasil cipta karya dan karsa manusia dalam usaha untuk memudahkan dalam hidupnya. Dalam pengertian sering digunakan pengertian Peradaban atau *Civilization* artinya kebudayaan benda (materi yang berwujud seperti teknik dsb) dan kebudayaan atau *culture* artinya kesopanan atau kebudayaan (bisa kebudayaan lahiriah dan batiniah). Kebudayaan sebagai upaya manusia untuk memudahkan hidupnya, kebudayaan itu selalu berubah sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan akal manusia dan masyarakat. Jadi perkembangan masyarakat akan selalu diikuti oleh perubahan kebudayaannya, atau sebaliknya perubahan kebudayaan akan merubah unsur-unsur atau tata nilai dalam masyarakat. Dengan demikian maka perkembangan

manusia pada tahap berikutnya adalah sebagai kelanjutan dari kebudayaan sebelumnya, kebudayaan sekarang adalah kelanjutan dari sebelum dewasa ini.

Dalam sektor kebudayaan di Jawa Timur beberapa hal yang telah dibina dan dikembangkan antara lain:

1. Kesenian

Pembinaan dalam bidang kesenian di Jawa Timur selama Pelita I diupayakan untuk melaksanakan amanat MPR 1972 dimana kebudayaan daerah sebagai unsur yang memperkaya dan memberi corak kepada kebudayaan nasional bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan hal itu pembinaan kesenian daerah Jawa Timur sebagai unsur yang berperan dalam kebudayaan melakukan pembinaan berupa:

- Pementasan-pementasan, pameran-pameran dan *workshop*
- Perlombaan-perlombaan/festival kesenian tingkat provinsi maupun kabupaten/kotamadya.
- Penataran aspek kesenian
- Penggalan unsur-unsur dan jenis kesenian daerah
- Penyempurnaan manajemen
- Misi-misi kesenian
- Pembentukan culture centre Jawa Timur.

Program pembinaan itu dijadikan pedoman bagi tiap-tiap kabupaten/kotamadya di Jawa Timur sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang dimiliki tiap-tiap daerah. Dalam upaya menunjang keberhasilan program tersebut diadakan berbagai kegiatan yang mengacu kepada tujuan yang telah digariskan di Propinsi Jawa Timur misalnya : mengadakan *upgrading* kepada organisasi kesenian dan kepada para seniman dan seniwati, mengadakan ujian/lomba dari berbagai cabang-cabang kesenian seperti tari dan kerawitan. Juga diadakan kursus-kursus dari cabang kesenian seperti pedalangan, drama,

kerawitan, dan sebagainya. Untuk menunjang kegiatan tersebut di Jawa Timur dibentuk team pembina penerbit kesenian di tiap kabupaten/kotamadya, dan juga dibentuk pembantu kebudayaan di tiap kecamatan se-Jawa Timur.

Di samping itu juga diadakan pementasan berbagai kesenian seperti seni lukis, kerawitan, tari, seni suara, drama, dan juga pengiriman tim kesenian keberbagai event nasional seperti PON VIII, TV, Pekan Wayang Indonesia I, dan sebagainya.

Sementara untuk mengembangkan kreatifitas kesenian di Jawa Timur juga diadakan perlombaan/festival kesenian di tingkat provinsi maupun kabupaten/kodya seperti: tari Klasik, Kreasi Baru, Angklung, Orkes Melayu, Lukisan, Samroh, dan Pedalangan. Selain pameran/festival juga diadakan penataran kesenian dalam bidang pedalangan, karawitan, seni rupa, dan seni tari.

Untuk menunjang manajemen di Jawa Timur telah diselenggarakan Konkerda se-Jawa Timur, yang diikuti oleh para Kepala Seksi (Kasi) kebudayaan se-Jawa Timur dan upgrading 200 dalang se-Jawa Timur.

Untuk memungkinkan berkembangnya kebudayaan/kesenian Jawa Timur maka telah dibentuk *Culture Centre Jawa Timur*, dengan disediakannya tempat di bekas rumah dinas Bupati Surabaya. Penempatan bekas rumah dinas ini telah diisi dengan kegiatan sejak tahun 1973. Pada November 1973 telah diselenggarakan Apresiasi Seni Budaya Jawa Timur dengan menampilkan berbagai atraksi kesenian seperti: Kesenian Madura, Bali, Jawa Timuran, Reog Ponorogo, Reog Tulungagung, Wayang Kulit, dan pameran seni rupa selama 5 hari.

Tabel 59
Biaya Seni Budaya Di Jawa Timur 1973

NO.	KEGIATAN	BIAYA
01.	Penggalian dan unsur-unsur dan jenis kesenian daerah	Rp. 1.500.000;
02.	Kegiatan setiap cabang	Rp. 1.715.000;
03.	Perlombaan/festival	Rp. 650.000;
04.	Manajemen	Rp. 2.670.000;
05.	Culture Centre jatim	Rp. 20.000.000;
06.	Misi Kesenian	Rp. 750.000;
	JUMLAH	Rp. 27.485.000;

Sumber: Jawa Timur Membangun. Hlm. 211

2. Pembinaan Pendidikan Kesenian

Pembinaan pendidikan kesenian bertujuan untuk membentuk manusia sebagai warga negara Indonesia yang berbudi, berkesadaran akan Ketuhanan Yang Maha Esa, bermasyarakat, berjiwa makarya serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Di samping itu pembinaan pendidikan kesenian sebagai upaya untuk mempertebal rasa budaya nasional Pancasila.

Usaha yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut di Jawa Timur, ditempuh melalui Program Jangka Pendek dan Program Jangka Panjang. Program jangka pendek dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan guru-guru kesenian baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat yang ditempuh dengan jalan: (1) mengadakan kursus/penataran kesenian untuk guru dan para seniman; (2) memberikan pembinaan pada seni rupa, seni tari, seni karawitan, seni pedalangan dan seni musik.

Pada program jangka panjang, upaya yang ditempuh melalui proyek-proyek kesenian yang dimasukkan dalam proyek Pelita khususnya Pelita II berupa: (a) mendirikan pusat-pusat

pendidikan kesenian; (b) melengkapi alat-alat kesenian pada konservatory karawitan Indonesia di Surabaya.

Untuk melaksanakan program tersebut didukung dengan dana yang disediakan oleh Dana Belanja Rutin anggaran daerah, bantuan pemerintah daerah secara insidental, dan dana swadaya dari masyarakat.

3. Kesenian Yang Menonjol Di Jawa Timur

Di Jawa Timur terdapat berbagai kesenian yang dibina dan dikembangkan. Hal ini mengingat peranan kesenian dalam membina budaya bangsa sangat penting. Namun dari beberapa kesenian itu terdapat beberapa kesenian yang dianggap menonjol dan memiliki corak khusus Jawa Timur antara lain:

a. Ludruk

Ludruk merupakan kesenian asli Jawa Timur yang dimainkan di atas pentas (panggung). Pertunjukan ludruk selalu diawali dengan tari Ngremo yang dibawakan oleh seorang atau lebih, bisa laki-laki atau perempuan. Irian ludruk adalah gending khas Jawa Timuran. Yang lebih menarik dari pertunjukan ludruk adalah selingan pelawak dan yang banyak mengalunkan lagu-lagu kidungan atau Julia-juli.

Pertunjukan ludruk merupakan drama yang mengambil kisah kehidupan sehari-hari yang diwujudkan dalam tema satire. Ciri khas ludruk semula hanya dimainkan oleh pria termasuk untuk memerankan wanitanya. Namun dewasa ini ludruk telah banyak menggunakan pemain wanita untuk mementaskan tokoh wanita.

Dalam masa penjajahan, ludruk telah menjadi semacam media untuk membangkitkan semangat rakyat untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Karena itu ada beberapa tokoh ludruk yang pada jaman penjajah dimasukkan penjara karena dianggap kidungan-kidungannya menentang penjajah. Tokoh yang terkenal sebagai pejuang lewat ludruk sebagai mediana itu adalah

Cak Gondo Durasim yang meninggal dunia dalam tahanan Kompetai Jepang setelah ditahan karena mengkritik pemerintah penjajah lewat pertunjukan ludruk.⁴

b. Reog Ponorogo

Reog merupakan kesenian yang melibatkan banyak pelaku. Hal ini karena di samping reog itu sendiri perlu adanya gamelan (seperangkat alat musik Jawa) juga harus melibatkan banyak pengiring pelengkap seperti jaranan, pentul (topeng), dan sebagainya.

Pertunjukan reog sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Ponorogo tetapi telah banyak dimainkan oleh berbagai masyarakat di Indonesia, bahkan di Sumatra pun juga banyak ditampilkan kesenian reog.

Di Jawa Timur, pertunjukan reog juga banyak diminati di berbagai daerah termasuk di Surabaya. Pertunjukan itu dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan seperti pawai, karnaval atau kegiatan-kegiatan lain yang bersifat terbuka untuk umum. Namun yang lebih terkenal pertunjukan reog adalah reog Ponorogo. Hal ini karena asal-usul dan perkembangannya adalah dari Ponorogo meskipun terdapat pula reog Tulungagung.

Asal usul kesenian reog Ponorogo sebenarnya juga sulit untuk dilacak. Sumber-sumber yang menyebutkan hanya dari legenda yang banyak ragamnya. Ditinjau dari sejarahnya keberadaannya, reog sudah ada sejak Prabu Gajayana Raja Kanjuruhan (daerah Malang) sebagaimana disebutkan dalam prasasti Dinoyo berangka tahun 682 Ishaka (760M).

Reog Ponorogo erat kaitannya dengan legenda yang berkembang sejak jaman Kediri atau Jenggala (sekitar tahun 1045-1222). Legenda itu menceritakan bahwa di Kediri dahulu bertahta seorang raja yang telah cukup tua usianya. Ia mempunyai seorang putri dan seorang putra. Raja bermaksud menyerahkan kekuasaannya kepada putranya, namun putranya menolak lantaran merasa belum

mampu dan banyak raja sekitar Kediri yang lebih kuat daripadanya. oleh karena itu putra raja tersebut ingin memperdalam ilmu terlebih dahulu. Keadaan ini menimbulkan kemarahan sang raja. Pada suatu malam putra raja tersebut meninggalkan istana tanpa pengawal menuju ke Ponorogo. Di sana ia berguru kepada seorang raja yang termashur ilmu dan kekebalan serta kemampuan-kemampuan yang lain.

Di Kerajaan Bandarangan (Ponorogo) putra raja Kediri tersebut diangkat menjadi patih, karena memiliki kemampuan yang bisa diandalkan. Pada suatu saat di Ponorogo terjadi berbagai bencana kesusahan dan kelaparan, pada malam hari banyak harimau berkeliaran memangsa kerbau, lembu dan kambing milik penduduk.

Kondisi tersebut melahirkan hasrat para pendeta untuk memberi saran kepada rajanya yang bernama Klono Sewandono. Saran itu adalah agar sang raja segera kawin. Saran pendeta itu diterima sang raja dan pilihan adalah putri Kediri kakak kandung patihnya. Namun ketika sang patih disuruh untuk melamarkannya, merasa berat karena ia dulu pergi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setelah bertapa beberapa hari diambil jalan dengan menyamar menggunakan topeng untuk datang kepada orang tuanya agar tidak dikenali. Penyamaran sang patih tersebut ternyata membawa dampak pada tidak diterimanya lamaran Raja Bandarangan karena dipandang hina dengan wajah yang melamarnya. Saat itu pula sang patih mengaku kalau ia adalah putranya, namun tetap ditolak bahkan dikutuk menjadi manusia seperti raksasa. Para pendeta kerajaan yang mengerti kebenaran cerita tersebut menyarankan bahwa sang patih bisa menjadi manusia lagi jika mau memenuhi permintaan sang putri, yaitu untuk perkawinan dengan rajanya maka (1) Calon pengantin putra harus diiringi oleh seratus lima puluh ekor harimau, (2) Perjalanan calon pengantin dan pengiringnya harus lewat bawah tanah (Jawa nglandak). Permintaan itu disanggupi oleh sang patih, dan ketika menghadap rajanya di Bandarangan ia bersedia mencarikan seratus lima puluh

ekor harimau. Perjalanan Ponorogo-Kediri melalui bawah tanah yang dikisahkan lewat Gua Bedhali sampai gua Selomangleng di Gunung Klothok Kediri bisa dilalui. Setelah berhasil menemui raja Kediri pengantin putri diserahkan kepada Raja Ponorogo dan sang patih berubah lagi menjadi manusia biasa.

Ketika pulang, iringan pengantin dari Kediri ke Ponorogo di tengah hutan roban bertemu dengan Singobarong yang merajai hutan. Singobarong tidak rela dengan hilangnya seratus lima puluh ekor harimau tersebut oleh sang patih. Maka terjadilah pertempuran pasukan harimau dan prajurit kerajaan yang disaksikan oleh burung-burung merak di atas pohon. Pertempuran antara prajurit dan harimau yang dibantu merak itu dapat dimenangkan oleh prajurit Ponorogo. Kepala Singobarong dipenggal dan dibawa pulang ke Ponorogo. Dalam perjalanan kepala harimau tersebut ditaruh di atas kepala (Jawa = disunggi) berganti-ganti. Dalam perjalanan tersebut banyak burung-burung merak yang mengikutinya dan bahkan bertenger di atas kepala harimau yang disunggi para prajurit.

Setelah lama raja Klono Sewandono memerintah sang istri minta diceraikan dengan dalih tidak bisa membahagiakan karena tidak bisa memiliki anak, ia adalah seorang putri Kediri. Sang istri minta pulang ke Kediri, namun betapa menderitanya sang raja ditinggal istrinya. Dalam kondisi menderita karena ditinggal istrinya itulah, sang patih yang sangat bijaksana berusaha menghiburnya. Diciptakanlah pertunjukan (permainan) yang sekarang terkenal dengan nama Reog Ponorogo. Pertunjukan ini diilhami oleh peristiwa ketika menyunting putri Kediri dengan peperangan melawan Singobarong yang disaksikan oleh burung merak.⁵

4. Perkembangan Kesenian Selama Pelita III dan IV

Sampai dengan Repelita III dan IV berbagai jenis kesenian baik yang bersifat tradisional, maupun klasik tetap hidup subur dan berkembang dalam masyarakat Jawa Timur.

Pengembangan dan pembinaan kesenian dari tahun ke tahun selama Pelita III selalu menunjukkan kemajuan baik di provinsi maupun di daerah-daerah.

Di samping itu, juga diusahakan peningkatan mutu kesenian tradisional secara terus menerus dan digalakkan adanya program penerimaan pengiriman duta-duta seni serta pertukaran seni tradisional. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan betapa kayanya kebudayaan Indonesia. Usaha untuk melestarikan kesenian yang hampir punah dilakukan dengan penggalian kembali kesenian tersebut seperti penggalian topeng Jabung di Kabupaten Malang, Topeng Dalang dari Madura, yang dimaksudkan untuk dapat diwariskan kepada generasi muda.

Di Jawa Timur selama Pelita III juga diadakan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah Jawa Timur yang meliputi kegiatan penelitian dan perekaman 5 aspek kehidupan daerah yaitu (a) sejarah daerah Jawa Timur, (b) adat istiadat, (c) cerita rakyat, (d) permainan rakyat, (e) geografi daerah.

Beberapa organisasi kesenian juga terdapat di Jawa Timur yang jumlahnya mencapai 9.524 kesenian, 206.494 seniman perorangan. Jika dirinci secara terpisah terdapat beberapa jenis kesenian yang terdapat di Jawa Timur meliputi :

- a. Teater: ande-ande lumut, kentrung, ketoprak, ludruk, dan lain-lain.
- b. Tari: Barong, Angguk, Dugkrek, Gandrung banyuwangi, dan lain-lain.
- c. Musik: Angklung, Kulintang, Karawitan.
- d. Seniman nyanayi: Bina vikalia, Hadrah, Samroh, dan lain-lain.
- e. Dalang: Dalang Wayang Beber, dalang Wayang Golek, dalang Wayang Kulit, dan lain-lain.
- f. Seni rupa: lukis, kriya/ukir, pahat/patung dan sebagainya.

Hingga Repelita IV pembinaan kesenian terus ditingkatkan, namun terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam pembinaan kesenian di Jawa Timur antara lain:

- 1) Kurangnya tenaga terdidik di bidang kesenian, meliputi tenaga-tenaga pengembang kesenian/guru kesenian/tenaga kesenian baik secara kualitatif, yang menyebabkan mutu pelajaran seni di sekolah-sekolah, terutama di daerah kurang dapat diandalkan. Kurangnya tenaga riset kesenian dapat menghambat program penggalian jenis-jenis kesenian yang hampir punah, sedangkan dipihak lain kesenian tradisional perlu digali untuk dilestarikan dan dipelihara guna mengimbangi derasnya arus informasi, terutama hubungan dengan luar negeri sebagai akibat dari kemajuan teknologi modern, khususnya di bidang media komunikasi budaya.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian, pengembangan dan pemeliharaan seni budaya, wawasan dan penghayatan.
- 3) Berbagai instansi menangani pengelolaan kesenian secara umum, belum mantap.
- 4) Terbatasnya prasarana fisik atau wadah olah seni (baru ada satu wadah kegiatan seni yaitu Taman Budaya), yang diharapkan dapat merupakan pusat informasi mengenai kehidupan seni budaya Jawa Timur.
- 5) Program penataran/latihan belum sistematis dan bobot isinya masih memadai.

Permasalahan yang timbul pada Repelita IV antara lain:

- a) Memasyarakatkan kesenian, yang diarahkan supaya dapat diterima secara merata oleh masyarakat dan perlu ditopang kreativitas seni secara optimal, dan selaras dengan Pancasila.

- b) Peningkatan dan pengembangan tradisi tulisan di segala bidang kehidupan (kesenian dan kehidupan).

Di samping bidang kesenian juga terdapat Museum di Jawa Timur yaitu Museum Mpu Tantular dan Museum di Trowulan Mojokerto yang menjadi tempat penyimpanan benda-benda budaya bangsa dan pengembangan penelitian kepurbakalaan. Selama Repelita IV beberapa kegiatan yang ditangani oleh Museum dan Kepurbakalaan dapat dilihat dalam tabel 60 berikut ini:

Tabel 60
Pembinaan Permuseuman Dan Kepurbakalaan
Di Jawa Timur Tahun 1984--1989

NO.	KEGIATAN	OBYEK	JUMLAH	KETERANGAN
I.	KEPURBAKALAAN			
01.	Pemugaran	Makanan - Kuno	2 buah	1. Cakraningrat
02.	Pemetaan	Candi	15 Candi	2. Madegan 1. Jabubng 3. Kidal
03.	Pengaturan lingkungan (zoning)	Candi	15 Candi	
04.	Gardening	Candi	15 Candi	
05.	Konservasi	Candi	25 buah	
06.	Pemeliharaan	Situs	300 buah	
II.	PERMUSEUMAN			
01.	Pemb. Museum Provinsi	Museum	1 buah	Museum Prop.
02.	Pengadaan Koleksi	Naskah	5 jenis	1. Historis 2. Nasional 3. Archeologi 4. Etnografi 5. Naskah Kuno
03.	Bantuan Museum Daerah	Museum	9 buah	Dati II

Sumber : Permuseuman dan Purbakala

Di samping Museum dan Kepurbakalaan, yang erat kaitannya dengan pelestarian budaya bangsa adalah kegiatan dalam bidang sejarah dan nilai tradisional (SENTRA/JARAHNITRA) dalam Pelita IV kegiatan yang dilaksanakan antara lain: Sejarah Daerah (penulisan naskah), Nilai-nilai Tradisional, Inventarisasi Naskah Kuno, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Juga dalam pembinaan kebahasaan dan kesusasteraan di Jawa Timur juga dilakukan Penelitian Bahasa Indonesia Daerah.

5.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa. Pendidikan yang dimaksud itu tidak yang diselenggarakan secara tradisional maupun modern (pengaruh Barat). Keduanya berkembang di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Pendidikan tersebut dari masa Hindu Budha sampai dewasa ini mempunyai karakteristik berbeda-beda. Namun kesemuanya itu tiada lepas dari usaha dan keinginan pemerintah yang sedang berkuasa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Di masa pembangunan ini, dunia pendidikan Jawa Timur memperlihatkan pertumbuhan yang pesat. Hal ini disebabkan dengan banyaknya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Proses akselerasi ini merupakan gejala menarik untuk diteliti. Peran pemerintah dan swasta terlibat di dalamnya dan didukung oleh antusiasme masyarakat Jawa Timur yang sangat tinggi dalam mengembangkan dirinya melalui jalur pendidikan.

Pada awal Orde Baru dengan dicanangkannya Program Pembangunan Jangka Panjang melalui Repelita I (1969) dan Repelita selanjutnya, menunjukkan adanya peningkatan, baik kuantitas maupun kualitasnya, baik sarana fisik maupun non fisik. Dalam awal Repelita I landasan pendidikan yang kongkrit baru ditetapkan dalam Ketetapan MPR. No. IV/1973 tentang Garis Besar Haluan Negara, khususnya bidang pendidikan yang menegaskan bahwa: Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha

untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Landasan itu tentunya berlaku bagi seluruh Jawa Timur.

Untuk mewujudkan hal itu Jawa Timur telah menyusun dan melaksanakan strategi pendidikan menurut tahap-tahapnya yang telah dimulai sejak tahun 1969. Tahap-tahap pelaksanaan strategi pendidikan dalam Pelita I meliputi rehabilitasi, tahap stabilisasi/konsolidasi dan tahap konstruksi. Tahap demi tahap itu disusun secara berurutan yang meliputi jangka waktu:

1) Tahap Rehabilitasi: tahun 1969--1971.

Pada tahap ini dirasakan paling mendesak untuk dikerjakan adalah melakukan rehabilitasi mental dan fisik, baik tenaga maupun keadaan prasarana pendidikan.

2) Tahap Stabilisasi/Konsolidasi: tahun 1972--1974.

Pada tahap ini telah dapat diletakkan dasar-dasar yang kokoh guna merintis pendidikan dengan pengarahannya kekuatan dari semua pendidikan mulai dari tingkat rendah sampai perguruan tinggi.

3) Tahap Konstruksi: tahun 1974 – dan selanjutnya/mulai awal Pelita yang ke III.

Hasil-hasil yang dicapai dalam tahap pertama dan kedua diharapkan akan merupakan potensi bagi pelaksanaan tahap terakhir ini yang nantinya dimaksudkan untuk melaksanakan secara nyata pembaruan pendidikan di Indonesia melalui wadah yang ada, untuk secara bertahap mencapai tujuan umum dari pendidikan nasional.

Telah disepakati bahwa tujuan umum pendidikan nasional kita diarahkan kepada membimbing warga negara Indonesia menjadi manusia Pancasila, yaitu: berpribadi, berkesadaran kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran bermasyarakat, dan mampu membudayakan alam sekitarnya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal itu, pemerintah Indonesia telah merealisasikan dana untuk pendidikan yang meliputi SD sampai Perguruan Tinggi. Pada tahun 1971/1972 dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 82.223.000.000; di antaranya adalah diberikan untuk Provinsi Jawa Timur untuk pendidikan SD sampai SLTA (tidak termasuk biaya pendidikan tinggi).

Sebagai gambaran pelaksanaan program pembangunan di sektor pendidikan Jawa Timur, kiranya dapat diuraikan hasil-hasil yang telah dicapai selama Repelita I sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar

Pembangunan sektor pendidikan dasar di Jawa Timur merupakan program Pelita yang diupayakan untuk meningkatkan mutu pendidikan SD. Program Pelita untuk pendidikan SD merupakan bagian yang meliputi penambahan pendidikan kejuruan (SLU), peningkatan pendidikan teknik, peningkatan pendidikan guru, peningkatan pendidikan masyarakat dan orang dewasa peningkatan olah raga.

Di samping program Pelita, program pendidikan Jawa Timur juga menerapkan program Non Pelita yang sasarannya meliputi pengembangan pelaksanaan ujian-ujian sekolah, pengembangan Pemberantasan Buta Huruf (PBH), penataran tenaga pengajar inti khususnya fak matematika dan IPA, pengembangan partisipasi orang tua terhadap pendidikan melalui sumbangan pendidikan (SPP) pengangkatan guru-guru di berbagai daerah, penataran guru-guru sesuai dengan metode dan sistem pendidikan yang baru.

Pendidikan dasar yang merupakan bagian dari program Pelita sejak tahun 1969 telah diusahakan untuk menemukan sistem pendidikan baru yang selaras dengan kepribadian bangsa maupun tuntutan alam pembangunan. Salah satu cara yang ditempuh untuk mewujudkan hal itu adalah dengan diberikan pelajaran-pelajaran keterampilan, sistem ujian model lama diganti dengan model baru, penggunaan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB untuk menggantikan ijazah negara yang berlaku sebelumnya).

Dalam rangka pembangunan regional Jawa Timur, pembangunan dalam sub sektor pendidikan dasar ini ditempatkan sebagai prioritas utama. Hal ini terbukti dengan besarnya anggaran sebesar 37% dari APBD Provinsi Jawa Timur digunakan untuk pendidikan dasar. Dana itu sebesar Rp. 2.153.092.360; telah digunakan untuk melengkapi lembaga pendidikan dasar, pembangunan fasilitas-fasilitas perpustakaan, alat-alat peraga, pembangunan sejumlah 1.095 unit sekolah dasar baru serta pengangkatan 13.000 tenaga guru.

Sumber dana pendidikan di samping berasal dari pusat, pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat juga mendapat bantuan dan pinjaman dari badan-badan internasional dan yayasan swasta luar negeri seperti UNESCO, UNICEF, UNDP, Colombo Plan, Word Bank, Ford Foundation dan lain-lain. Jumlah dana yang diterima dari bantuan/pinjaman luar negeri tersebut tidak dapat dirinci dengan pasti jumlah dan nilainya. Hal ini karena bentuk bantuannya diberikan langsung ke sekolah-sekolah berupa kendaraan bermotor, sepeda, mesin jahit, mesin tik, dan sejumlah alat-alat peraga pendidikan lainnya.

Di samping itu untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi konversi sekolah menuju sekolah pembangunan, Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Jawa Timur mendirikan 8 unit sekolah pembangunan masing-masing di Pamekasan (Madura), Lamongan, Mojokerto, Bojonegoro, Kediri, pasuruan, Bondowoso, dan Banyuwangi. Di samping 8 unit sekolah pembangunan tersebut di Jawa Timur juga didirikan 2 unit sekolah pembangunan dasar yang dibangun oleh IKIP Negeri Malang dan IKIP negeri Surabaya.

Sebagai hasil pembangunan sub sektor pendidikan dasar di Jawa Timur selama Pelita I dapat dilihat dalam tabel 61 berikut ini:

Tabel 61
Pembangunan Sub Sektor Pendidikan Dasar
Di Jawa Timur Tahun 1969--1974

NO.	JENIS	PELAKSANAAN					
		69/70	70/71	71/72	72/73	73/74	JUMLAH
01.	Pemb. Gedung	97 lokl 3 sek 2 kant	30 lokl 8 sek 2 kant	158 lokl 33 sek 7 kan	97 lokl 3 sek 2 kan	30 lokl 8 sek 2 kant	158 lokal 33 sekol 7 kantor
02.	Pembuatan pagar	-	1970, 02m	-	350m	1481m	3801,23m
03.	Pembelian tanah	-	8 ha	-	20000m ²	-	100000m ²
	Perataan tanah	-	80000m ²	-	-	2096m ²	20960m ²
04.	Pembuatan jalan	-	-	-	375m ²	-	375m ²
05.	Rehabilitasi	21 sekl	8 Sekl 1 kantr 1 rumah Dinas	11 sekl	4 lokal	25 lokl	29 lokal
06.	Pengadaan meubel	-	-	3 unit 2 sekl 475 stel	-	-	3 unit 1 kantor 1 rumah 475 stel
07.	Peng. Alat Perl	26 unit - 3 kant	1 unit -	19 unit -	46 unit -	26 unit 46 unit	118 unit 102 set 3 kantor
08.	Mobilitas	-	-	6 spd	8 motor	7 motor	15 roda 2
09.	Upgrading	500 gur SD	150 gur SD/SLU	80 guru SD 100 gur SMEP /SMEA 595 gur ST/STM	64 guru SD 40 guru SKKP/ SKKA 56 guru ST/STM 72 Pemb masy	1856 gr SD	3441guru 279 Pemb na masy

Sumber : Jawa Timur Membangun Jilid I. Hlm. 51--52

Pembangunan tersebut hanya yang termasuk program Pelita sedangkan pembangunan yang termasuk dalam program Non Repelita selama 1969--1974 baik yang rutin/SPP maupun dari pemerintah daerah juga cukup banyak seperti tabel 62 berikut ini;

Tabel 62
Pembiayaan Pendidikan Non Pelita
Di Jawa Timur Tahun 1969--1974

NO.	JENIS	1969--1974
1.	Tanah lapang/pertanian	203 m ²
2.	Gedung kantor	457 m ²
3.	Peralatan kantor	100.292 buah
4.	Alat-alat peraga	5.342 unit
5.	Alat praktek	8.753 buah
6.	Alat-alat laboratorium	8.669
7.	Meubeler	42.754
8.	Alat olah raga/kesenian	11.257
9.	Perpustakaan	446.278
10.	Alat transport	30 roda 2 70 roda 2 7 roda 4 33 sepeda

Sumber: Jawa Timur Membangun Jilid I. Hlm. 53

Sedangkan dana dari Pemerintah Daerah, penggunaannya meliputi pembangunan gedung SMP pembangunan di Bondowoso, Pasuruan, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Mojokerto, dan Pamekasan. Pembangunan itu meliputi fisik dan sarannya seperti laboratorium, dan meubeler yang dianggap sebagai proyek regional Jawa Timur.

Pembangunan dalam bidang pendidikan di samping dilaksanakan oleh Departemen P dan K. tujuan dari dinar ini adalah untuk menjaga kontinuitas pendidikan dengan jalan melengkapi tenaga personil, memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dan membangkitkan kegairahan kerja dengan menyediakan sarana fisik yang memadai.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas P dan K Jawa Timur juga menyediakan kebutuhan tenaga seperti menambah kekurangan Guru, melengkapi tenaga pesuruh SD, menambah kekurangan tenaga tata usaha, dan mengganti pegawai-pegawai yang pensiun. Dalam pengadaan sarana dan prasarana juga melengkapi pengadaan buku-buku perpustakaan, buku pegangan guru (*handleading*), pengadaan gedung kantor P dan K, sarana transportasi, dan alat-alat olah raga.

Dalam pembiayaan Dinas P dan K Jawa Timur selama Pelita I mendapat anggaran sebesar Rp. 21.535.360; dari anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Dana tersebut digunakan untuk anggaran personil, anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang mencakup seluruh kabupaten di Jawa Timur yang dilaksanakan secara bertahap.

2. Pendidikan Menengah

Sebelum Pembangunan Lima Tahun dilaksanakan di Indonesia dengan model yang dengan Repelita, keadaan pendidikan menengah di Indonesia khususnya di Jawa Timur mengalami masa surut yang sangat mengkhawatirkan.² Mutu pendidikan yang rendah saat itu telah pula disertai dengan besarnya kemungkinan murid-murid putus sekolah.

Pikiran-pikiran perbaikan yang lahir ketika memasuki Pelita I adalah mengatasi masalah tersebut di atas, dengan kata lain berusaha meningkatkan mutu pendidikan serta memperkecil kemungkinan *drop out*. Untuk itu telah ditempuh upaya mendekatkan pendidikan menengah dengan melihat relevansi kebutuhan pembangunan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut antara lain memperbaiki/ menambah serta mengembangkan kurikulum ekstra yang bisa menunjang kegiatan putus sekolah dapat diatasi. Di samping itu telah pula dilaksanakan penerapan kurikulum 1968 (transisi) disertai persiapan konversi ke arah sekolah pembangunan dengan membangun 12 unit sekolah pembangunan yang dibangun di 8 daerah tingkat II Jawa Timur, dan 4 unit lainnya merupakan proyek pemerintah pusat dengan 4 Pemerintah Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

Sampai akhir Pelita I telah sejumlah 267 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang baru, sehingga jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Jawa Timur mencapai 1236 unit. Jumlah itu mampu menampung sebanyak 393.983 murid dengan jumlah tenaga pengajar 18.554. Untuk Sekolah lanjutan Tingkat Atas di Jawa Timur telah dibangun sejumlah 498 yang mampu menampung sebanyak 125.071 siswa dan 9.522 tenaga pengajar.

3. *Pendidikan Tinggi*

Universitas-universitas adalah lambang dari negara yang berdaulat. Ia merupakan pusat dari modernisasi, bahkan sebagaimana yang terjadi di banyak negara, universitas-universitas adalah lembaga masyarakat yang paling modern, peka dan penjawab utama atas masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Tanpa dukungan universitas program-program ke arah modernisasi akan sulit untuk dapat dicapai, atau kemungkinan besar akan merupakan satu angan-angan saja.

Kegiatan penelitian yang hasilnya dapat digunakan oleh birokrasi untuk menyusun perencanaan pembangunan dikerjakan oleh universitas-universitas atau kelompok orang-orang ahli yang datang dari kampus-kampus itu.

Riset tentang demografi, atau seminar tentang pencemaran lingkungan merupakan bagian penting dalam perencanaan, yang dihadiahkan universitas untuk pegangan badan-badan pemerintah yang akan melaksanakan pembangunan. Lebih dari segalanya universitas akan menempa generasi muda yang kelak akan melanjutkan pekerjaan pembangunan dan bahkan menghasilkan orang-orang yang kritis yang selalu berlaku seperti itu atas jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Dalam wilayah Provinsi Jawa Timur terdapat 9 Perguruan Tinggi yang meliputi:

- a. Universitas Airlangga
- b. Institut Teknologi 10 November Surabaya
- c. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya

- d. Universitas Brawijaya Malang
- e. Universitas Negeri Jember
- f. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang
- g. Institut Agama Islam Negeri Al-Djami'ah Al-Islamiah "Sunan Ampel"
- h. Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri Malang
- i. Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional Cabang Jawa Timur.

Dalam program pembangunan di Perguruan Tinggi tiap-tiap Universitas Institut mempunyai kebijaksanaan pelaksanaan yang berbeda dan secara otonomi mengatur sumber dana penggunaannya sesuai dengan prioritas yang ingin dicapai. Hal ini karena setiap Perguruan Tinggi memiliki karakter yang berbeda dan kuaifikasi ilmu yang berbeda. Misalnya universitas dengan institut sasaran yang ingin dicapai untuk lulusannya tentu berbeda.

Demikian pula setiap Pergurun Tinggi mendapat alokasi dana yang berbeda pula hal ini dapat dilihat dari tabel 63 dan 64 tentang pembiayaan pada setiap Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Tabel 63
Pembiayaan Universitas Airlangga

NO.	TAHUN	BESAR DANA
01.	1969/1970	Rp. 91.959.800
02.	1970/1971	Rp. 94.124.300
03.	1971/1972	Rp. 254.142.000
04.	1972/1973	Rp. 234.250.000
05.	1973/1974	Rp. 238.000.000
	JUMLAH	Rp. 912.494.100

Tabel 64
Pembiayaan IKIP Surabaya

NO.	TAHUN	BESAR DANA
01.	1969/1970	Rp. 55.134.000
02.	1970/1971	Rp. 14.267.000
03.	1971/1972	Rp. 14.267.000
04.	1972/1973	Rp. 22.000.000
05.	1973/1974	Rp. 26.250.000
	JUMLAH	Rp. 131.918.000

Dana tersebut meliputi biaya pembangunan berbagai program dan kegiatan di Perguruan Tinggi seperti perpustakaan, laboratorium, penelitian ilmiah, ruang kuliah, perumahan dosen, kendaraan, kemahasiswaan, alat peraga pembangunan proyek, dan sebagainya.

Di samping Perguruan Tinggi Negeri, di Jawa Timur juga terdapat beberapa Perguruan Tinggi Swasta seperti:

1. Universitas Darul Ulum Jombang
2. Universitas Kristen Petra
3. Universitas Widya Mandala
4. Sekolah Tinggi Kedokteran Malang
5. Akademi Perbankan Indonesia Surabaya
6. Akademi Bank dan Manajemen Surabaya
7. Pusat Ilmiah dan Pembangunan Nasional

4. *Penelitian*

Di samping peran Perguruan Tinggi yang sangat penting, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan penelitian yang ditangani oleh berbagai lembaga, baik di perguruan tinggi maupun lembaga lain baik negeri maupun swasta.

Pada pelita IV (Sampai dengan tahun 1989) Program Sub Sektor penelitian meliputi:

- a. Program penelitian umum
- b. Program penelitian pertanian dan pengairan
- c. Program penelitian industri
- d. Program penelitian pertambangan dan energi
- e. Program penelitian perhubungan dan pariwisata
- f. Program penelitian perdagangan dan koperasi
- g. Program penelitian tenaga kerja dan transmigrasi
- h. Program penelitian daerah, kota dan desa
- i. Program penelitian keagamaan
- j. Aparatur Pendidikan, Pendidikan, generasi muda, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- k. Program penelitian kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, kependudukan, dan keluarga berencana.
- l. Program penelitian perumahan rakyat dan pemukiman.
- m. Program penelitian penerangan, pers dan komunikasi sosial.
- n. Program penyempurnaan dan pengembangan statistik.
- o. Program penelitian aparatur pemerintahan.
- p. Program pengembangan Pusat Penelitian Ilmiah dan Pembangunan Regional (PIPR) Jawa Timur.

5. Pendidikan Selama Pelita IV

Dalam Repelita IV sektor pendidikan semakin diarahkan pada peningkatan mutu sumber daya manusia. Hal ini karena pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1983 disebutkan bahwa: "Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan,

mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Berdasarkan tujuan pembangunan pendidikan nasional di atas, dalam Repelita IV sektor pendidikan mengemban 3 misi yaitu:

- 1) Pelaksanaan wajib belajar
- 2) Pelaksanaan Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB) dalam kurikulum 1984.
- 3) Mengembangkan pendidikan menengah kejuruan dan teknologi ke arah pemenuhan tuntutan terhadap perkembangan teknologi dan penerapannya dalam prospek industrialisasi.

Dalam pelaksanaannya program pendidikan di Jawa Timur meliputi:

a. Pendidikan Dasar

Sub sektor pendidikan dasar di Jawa Timur selama Repelita III dititikberatkan pada pembangunan dan penyediaan fasilitas belajar secukupnya guna melayani anak-anak yang berumur 7-12 tahun dalam menuju pelaksanaan wajib belajar.

Untuk mencapai hal itu dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana dan pengadaan guru melalui program Inpres yang diarahkan pada daerah pemukiman yang berpenduduk jarang dan terpencil.

Di samping itu juga diadakan SD kecil maupun SD pamong guna mengatasi permasalahan putus sekolah dan hambatan ekonomis. Pembangunan SD kecil dan SD pamong meliputi daerah tingkat II di Jawa Timur.

Tabel 65
Jumlah SD Kecil Jawa Timur Tahun 1979--1984

NO.	JENIS SD	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	JUMLAH
01.	SD Kecil	-	14	54	54	72	194
02.	SD Pamong	-	7	72	72	54	205

Sumber: Repelita IV Jawa Timur Buku IIB. Hlm. 16--7

Untuk pendidikan Taman Kanak-kanak selama Pelita III baru dibangun 2 TK negeri masing-masing di Surabaya dan Malang, yang mulai beroperasi tahun 1983/1984, selebihnya merupakan TK yang didirikan oleh Badan/Yayasan Perguruan Swasta, yang kondisi dan kemampuannya bervariasi. Dalam memenuhi kebutuhan bagi setiap warga negara termasuk bagi mereka yang cacat di Jawa Timur juga dibangun Sekolah Luar Biasa (SLB). Selama Pelita III tahun 1983/1984 terdapat 83 SLB dan 21 SD terpadu dengan jumlah murid 2.479. SLB tersebut merupakan upaya dari badan/yayasan swasta, untuk SLB pembina (milik pemerintah) baru dipersiapkan SLB pembina di Malang.

Jumlah Sekolah Dasar tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik jumlah bangunan maupun jumlah siswanya. Hal ini dapat dilihat jumlah kebutuhan ruang SD dan jumlah siswa yang ada di Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 66
Kebutuhan Ruang Belajar Pendidikan Dasar SD/MI
Di Jawa Timur Selama Pelita IV

TAHUN	USIA 7-12	KEB. RUANG	YANG ADA	TAMBAHAN
1983/84	4.834.700	-	131.509	-
1984/85	4.905.900	132.462	131.509	953
1985/86	4.957.600	133.691	132.462	1.229
1986/87	5.003.800	134.790	133.691	1.099
1987/88	5.028.900	135.386	134.790	596
1988/98	5.041.300	135.680	135.386	294

Sumber: Repelita IV Jawa Timur IIB. Hlm. 16--19

b. Pendidikan Menengah Tingkat Pertama

Jumlah lulusan SD dibandingkan dengan jumlah SMP yang seharusnya menampung lulusan SD yang melanjutkan masih belum seimbang. Karena itu upaya yang dilakukan Jawa Timur dalam meningkatkan kuantitas Sekolah Menengah Pertama adalah menargetkan sekitar 85% lulusan SD/MI dapat ditampung di SLTP. Namun kenyataan ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 1982/1983 target tersebut masih belum mampu terpenuhi, karena daya tampung SMTP baru mencapai 56.71%. Jumlah itu meliputi SMP maupun SMP Kejuruan. Jika dilihat secara keseluruhan, maka lulusan SD/MI yang tertampung di SMP selama Pelita III di Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel 67 berikut:

Tabel 67
**Lulusan SD Yang Tertampung Di SMP
Di Jawa Timur Tahun 1979-1984**

TAHUN	JUMLAH LULUSAN			MURID BARU SMP
	SD	MI	JUMLAH	
1979/80	290.330	52.803	343.133	188.940
1980/81	343.637	59.616	403.253	225.488
0981/82	375.363	68.163	443.526	237.010
1982/83	430.297	71.407	501.704	227.763
1983/84	457.051	84.156	541.207	301.953

Sumber: Repelita IV Jawa Timur IIB. Hlm. 16-27

Jumlah tersebut ditampung dalam SMP Negeri dan Swasta yang hingga tahun 1984 di Jawa Timur telah terdapat sejumlah 673 SMP Negeri dan 1.856 SMP Swasta, dengan rata-rata pertambahan jumlah SMP sebanyak 75 buah pertahun selama Pelita III.

Sampai akhir Repelita IV (1988/98) target yang diharapkan untuk dapat dicapai SMP adalah 73,0% lulusan SD dapat

tertampung di SMP dengan rincian 10% di Tsanawiyah dan sisanya di SMP.

Hal itu diimbangi dengan jumlah sekolah yang dibangun selama Repelita IV sebanyak 540 unit dan tambahan ruang belajar sebanyak 3.300. Sehingga daya tampung SMP di Jawa Timur hingga tahun 1989 470.013 siswa dari jumlah lulusan SD sebanyak 643.853.

c. Pendidikan Menengah Tingkat Atas

Di Jawa Timur terdapat sejumlah SMA dan SMTA Kejuruan dan SMTA Keguruan. Untuk SMTA Kejuruan daya tampungnya mencapai 35.392 atau sebesar 18,16% dari jumlah siswa SMTA, sedangkan SMTA Keguruan dapat menyerap sebanyak 6,19%.

Pada akhir Repelita III (1983/1984) lulusan SMP dan Tsanawiyah yang dapat ditampung di SMA sebanyak 125.043 dari 225.270 siswa lulusan SMP dan Tsanawiyah. Jumlah itu hanya sekitar 55,5% yang dapat diserap di SMA.

Perincian secara keseluruhan siswa SMA negeri dan swasta dapat dilihat dalam tabel 67 berikut ini:

Tabel 68
Siswa SMA Negeri dan Swasta
Jawa Timur Tahun 1979--1984

TAHUN	SMA NEGERI	SMA SWASTA	JUMLAH
1979/80	58.225	66.781	125.006
1980/81	64.855	98.745	163.600
0981/82	71.817	131.201	203.018
1982/83	77.886	153.057	230.943
1983/84	87.104	224.627	311.731

Sumber: Repelita IV Jawa Timur IIB. Hlm. 16--52

Dari Tabel 68 tersebut menunjukkan bahwa peranan sekolah swasta dalam penampungan jumlah siswa lebih banyak dibandingkan dengan sekolah negeri yaitu sekitar 60% daya tampungnya dan sekolah negeri 40%.

Di samping itu juga terdapat beberapa SMTA Kejuruan seperti STM/SMT, SMEA, SMKKA/SMKK dan SMTA Keguruan seperti SPG, SGO dan SGPLB. Daya tampung di SMTA Kejuruan hingga tahun 1983 mencapai 35.392 atau daya tampung sekitar 18,26%. Sedangkan pada SMTA Keguruan hingga tahun 1984 SPG memiliki daya tampung sekitar 19.611, SPG Swasta sebanyak 12.674 (daya tampung swasta sebesar 45,62%).

Daya tampung SMTA itu terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan sarana yang tersedia. Sampai akhir Pelita IV target yang diharapkan adalah mampu menampung sebanyak 57.84% lulusan SMTP (umum dan kejuruan). Daya tampung SLTA selama Pelita IV dapat dilihat dalam tabel 69 berikut:

Tabel 69.
Daya Tampung SMA Di Jawa Timur
Tahun 1984--1989

TAHUN	LULUSAN SMTP	MURID BARU SMA	DAYA TAMPUNG
84/85	237.166	129.967	54,8%
85/86	278.054	154.487	55,56%
86/87	312.634	176.075	56,32%
87/88	378.656	216.137	57,08%
88/89	412.656	238.309	57,84%

Sumber: Repelita IV Jawa Timur IIB. Hlm. 16--70

Sementara itu daya tampung SMTA Kejuruan hingga tahun 1989 sebanyak 96.618 memiliki daya tampung sebesar 23,45%.

Di samping untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil di berbagai lapangan kerja selama Pelita IV jumlah sekolah kejuruan dikembangkan dalam berbagai jenis seperti:

- a. STM perkapalan di Sidoarjo
- b. Politeknik pertanian di Jember
- c. SMEA di tiap-tiap kabupaten
- d. SMT Pertanian di Blitar/Malang/Tuban
- e. SMM di Surabaya
- f. SMSR di Surabaya
- g. SMTA Koperasi di Surabaya

Untuk menunjang pelaksanaan belajar mengajar di SMT peranan guru sangat menentukan. Karena itu perkembangan jumlah sekolah juga diikuti jumlah guru yang memadai. Sampai tahun 1989 jumlah guru SMTA kejuruan di Jawa Timur mencapai 8.611 guru.

Catatan

1. Sartono Kartodirjo, hlm. 159
2. Jawa Timur Membangun, hlm. 147
3. Frans Priyohadi Marianno, *Dampak Pariwisata*, hlm. 74--75
4. Jawa Timur Membangun Kini dan Esok, Penerbit Pemerintah Dati I Jawa Timur 1975, hlm. 166
5. Hartono, *Reog Ponorogo*, Proyek Penulisan dan Penerbitan Buku/Majalah, Departemen P dan K Jakarta 1980.

BAB VI

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya rakyat dan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur pada masa Pemerintahan Orde Lama sudah berusaha melaksanakan pembangunan. Namun usaha-usaha untuk melaksanakan pembangunan itu selalu mengalami kegagalan. Di antara beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan Pemerintah Orde Lama dalam usaha melaksanakan pembangunan pada waktu itu ialah keadaan pemerintah, keamanan dan politik tidak stabil. Pada waktu itu sering terjadi pertentangan politik antar golongan, pergolakan, pemberontakan, yang mencapai klimaksnya pada saat meletusnya pemberontakan G 30 S/PKI pada 1 Oktober 1965.

Di Propinsi Jawa Timur peristiwa-peristiwa yang menonjol dan penting antara lain ialah Perang Kemerdekaan tahun 1945-1949, Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, konflik politik maupun senjata antara golongan PKI dengan golongan Islam dan Nasionalisme sepanjang tahun 1950-1965 di berbagai daerah Jawa Timur seperti peristiwa jengkol, peristiwa Kanigoro dan sebagainya. Akibat dari peristiwa-peristiwa itu usaha pembangunan menjadi gagal, bahkan berbagai bidang kehidupan mengalami kemunduran.

Untuk mengatasi keadaan seperti itu, rakyat dan Pemerintah Daerah Jawa Timur berusaha menyusun program

Pembangunan Jangka Pendek dan Program Pembangunan Jangka Panjang. Program Pembangunan Jangka Pendek (1966-1969) difokuskan pada pemulihan keamanan dan ketertiban, serta mengembalikan kewibawaan pemerintah. Dalam hal ini rakyat dan Pemerintah Daerah Jawa Timur mengadakan operasi pembersihan terhadap ansir-ansir sisa-sisa G 30 S/PKI dan pengordebaruan masyarakat. Selain itu juga mengadakan rehabilitasi di berbagai bidang kehidupan yang mengalami kerusakan akibat G 30 S/PKI.

Setelah program pembangunan jangka pendek berhasil dilaksanakan dengan baik, rakyat dan Pemerintah Daerah Jawa Timur segera menyusun program Pembangunan Jangka Panjang tahap pertama. Program Pembangunan Jangka Panjang ini disusun berdasarkan program nasional yang dipadukan dengan program daerah dan dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun sekali. Karena itu, program pembangunan ini sering disebut Pembangunan Lima Tahun (PELITA).

Program pembangunan Jangka Panjang tahap pertama dimulai tahun 1969. Dalam kurun waktu tahun 1969-1988, yaitu sejak awal Pelita pertama sampai dengan akhir Pelita Keempat, pelaksanaan dan hasil pembangunan di Propinsi Jawa Timur dapat disebutkan antara lain sebagai berikut.

Pembangunan sektor pertanian Jawa Timur mulai Pelita I (1969) sampai akhir Pelita IV (1988) menunjukkan peningkatan hasil yang cukup menggembirakan. Pembangunan sektor pertanian dalam penelitian ini dititikberatkan pada sub sektor tanaman pangan dan perkebunan. Sektor pertanian khususnya tanaman pangan di Jawa Timur sejak dicanangkannya Program Pembangunan Lima Tahun 1969 menjadi prioritas utama mengikuti program Repelita secara nasional. Sasaran utama sektor pertanian tanaman pangan dijadikan prioritas utama di Jawa Timur merupakan hal yang sangat urgen, hal ini menyangkut kebutuhan pokok penduduk Jawa Timur yang jumlahnya sangat besar. Hasil-hasil yang dapat dicapai dalam sektor pertanian di Jawa Timur meliputi perluasan areal melalui

peningkatan irigasi, maupun peningkatan kualitas melalui program intensifikasi. Di samping itu juga ditingkatkan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan jenis varietas unggul. Sampai dengan Pelita VI program pertanian untuk mencapai Swasembada pangan sudah dapat dicapai, hal ini karena berbagai usaha dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, termasuk menciptakan institusi-institusi yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan pertanian. Institusi itu seperti bidang pendidikan dengan berbagai sekolah pertanian, sekolah peternakan, sekolah perikanan, bidang latihan, bidang penyuluhan pertanian, bidang pembenihan, bidang penelitian, dan bidang perlindungan. Dari segi lahan pertanian hingga Pelita II dan VI di Jawa Timur boleh dikatakan mengalami fluktuasi, bahkan selama Pelita III dapat dikatakan menurun. Hal ini karena luas areal yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk dan penggunaan lahan di luar sektor pertanian. Namun dilihat dari hasil per hektar terus menunjukkan peningkatan. Bahkan selama Pelita III dan menginjak Pelita IV prioritas utama sektor pertanian dengan arah kebijaksanaan ditujukan kepada peningkatan produksi dan pendapatan petani, meningkatkan pendapatan negara berupa sektor pertanian. Adapun hasil-hasil pertanian yang menonjol di Jawa Timur antara lain: padi (beras), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedele, kacang hijau, sorghum, sayur/buah.

Dalam sektor perkebunan di Jawa Timur mulai diupayakan sejak pelita I dengan melibatkan Instansi Pemerintah (PNP/PTP) maupun instansi swasta. Dalam usaha meningkatkan produksi perkebunan di Jawa Timur pemerintah mengadakan kerjasama dengan Balai Penelitian Perkebunan Bogor, dan cabang Jember serta Balai Gula Pasuruan. Sedangkan untuk pemasaran hasil perkebunan diadakan penelitian pemasaran di daerah-daerah baru dan mendekati calon pembeli di luar negeri. Di samping itu juga diadakan research dalam usaha mempercepat proses pengolahan, menganalisa kesuburan tanah, menguji alat-alat pengolah baru. Hasil perkebunan yang paling utama di Jawa Timur adalah Tebu, di samping Kopi,

cokelat, teh, karet dan tembakau. Selain itu terdapat tanaman kapas dan cengkeh, pada mulanya masih kurang mendapat posisi namun dalam perkembangannya mengalami peningkatan yang berarti. Dilihat secara keseluruhan hasil perkebunan Jawa Timur mengalami peningkatan rata-rata 9.775 hingga Pelita III, sementara ekspor dibidang komoditi perkebunan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,89%, terutama pada ekspor tanaman karet, kopi, teh, dan cokelat.

Dalam bidang industri di Jawa Timur merupakan sentral industri kedua di Indonesia setelah Jakarta. hal ini karena dilihat dari jumlah penduduk dan potensi daerah yang memadai. Industri-industri tersebut dari PMA dan PMDN. Untuk menunjang perkembangan industri di Jawa Timur telah digariskan dalam kebijakan yang menyangkut adanya pengembangan wilayah industri, pembinaan industri kecil dan kerajinan rakyat, tersedianya prasarana. Sementara untuk merangsang perkembangan industri di Jawa Timur juga dibentuk Badan Koordinasi Penanaman modal Daerah guna menarik para investor, PMA dan PMDN. Di Jawa Timur juga membangun industri berat (dasar) seperti Petrokimia di Gresik, Pabrik Kertas Basuki Rahmat. Proyek Redrying Tembakau di Bojonegoro dan sebagainya.

Industri yang paling menonjol di Jawa Timur adalah pabrik rokok, hal ini karena terdapat beberapa pabrik yang memiliki kapasitas yang cukup besar dan produksinya memenuhi kebutuhan ekspor seperti pabrik rokok Gudang Garam di Kediri, Rokok Bentoel di Malang, Rokok Dji Sam Soe (Sampoerna) di Surabaya.

Dalam Industri Pariwisata di Jawa Timur juga memberikan pemasukan pembangunan yang sangat berarti yang diperoleh dari kunjungan wisatawan dalam negeri maupun wisata luar negeri. Pendapatan dari sektor pariwisata di berbagai obyek pariwisata itu seperti obyek wisata Gunung Bromo (Tengger) yang merupakan primadona obyek wisata Jawa Timur khususnya untuk wisatawan luar negeri.

Dalam sektor kependudukan, Jawa Timur mengalami permasalahan yang sangat kompleks, hal ini mengingat jumlah penduduk yang sangat besar dan angka kelahiran yang sangat tinggi sejak Pelita I. Namun demikian hal itu dapat diatasi dengan menekan laju pertumbuhan dari 2,48% pada awal Pelita I menjadi 1,49% pertahun hingga akhir Pelita IV. Langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur adalah dengan Program Keluarga Berencana, Transmigrasi, Pengaturan Perkawinan dan meningkatkan partisipasi penduduk muda dalam pendidikan. Meskipun angka pertumbuhan penduduk di Jawa Timur masih tergolong besar. Hal ini karena dibanding dengan luas daerah yang seharusnya ideal untuk dihuni sekitar 20-22 juta jiwa namun hingga Pelita VI penduduk Jawa Timur lebih dari 30 juta jiwa dengan angka pertumbuhan 1,23%.

Dalam sektor ketenagakerjaan, di Jawa Timur, upaya yang dilaksanakan ditujukan untuk memanfaatkan tenaga pengangguran dan setengah penganggur, menanamkan atau mengembangkan dalam diri para pekerja motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan kesadaran masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam sektor ketenagakerjaan program yang ditempuh antara lain melalui proyek padat karya, proyek pengerahan tenaga kerja, proyek percontohan, pembinaan keselamatan kerja, penanggulangan bahaya narkoba, dan proyek tenaga kerja transmigrasi. Dalam rangka memperbesar kesempatan kerja di Jawa Timur peranan PMA dan PMDN sangat penting tenaga kerja yang ditampung melalui sektor tersebut tahun 1984 mencapai 21.101 orang pertahun. Adapun sektor tenaga kerja dan persentase kesempatan kerja yang tersedia di Jawa Timur hingga Pelita IV (14,2%) meliputi sektor pertanian (56,6%), perdagangan (14,2%), sektor jasa (13,1%), industri (9,2%) bangunan (2,7%), angkutan (2,7%).

Dalam bidang sosial budaya terjadi perubahan kemajuan yang berdampak positif-negatif. Namun secara keseluruhan mengarah kepada perubahan yang bersifat positif. Hal ini

karena sebagai konsekuensi dari hasil-hasil pembangunan yang mengarah kepada terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup dan sarana komunikasi dan transportasi, sehingga mobilitas penduduk dari desa ke kota atau dari kota ke desa sangat tinggi. Dampak yang sangat menonjol adalah pesatnya arus urbanisasi ke kota Surabaya yang membawa dampak negatif dengan banyaknya tenaga kerja yang tidak tertampung.

Pembangunan dalam sektor agama di Jawa Timur juga dikembangkan selarasa dengan pembangunan yang lain. Beberapa fasilitas peribadatan dan kegiatan kerohanian mendapat bantuan pemerintah baik secara fisik maupun non fisik. Hal ini tampak dalam pembangunan gedung kantor, pembangunan balai nikah, rehabilitasi tempat ibadah, pembangunan gedung sekolah, serta proyek-proyek penerangan agama. Dilihat dari segi jumlah pemeluk agama, sebagian besar penduduk di Jawa Timur memeluk agama Islam. Sedangkan agama-agama lain yang juga dipeluk masyarakat Jawa Timur adalah Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan lain-lain. Jumlah pemeluk agama pada tahun 1981 terdiri dari: Islam 96%, Kristen 1,29%, Katholik 0,59%, Hindu 0,68%, lain-lain 0,46%. Di samping pemeluk agama di Jawa Timur juga terdapat beberapa penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan kepada penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan dalam rangka Pembangunan Kebudayaan, karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kenyataannya merupakan bagian kebudayaan Nasional yang hidup dan dihayati sebagian bangsa Indonesia. Pembinaan Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dengan tujuan: (a) agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru, (b) pembinaan itu sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembinaan dalam bidang kesenian di Jawa Timur selama Pelita I diupayakan untuk melaksanakan amanat MPR 1972 dimana Kebudayaan Daerah sebagai unsur yang memperkaya dan memberi corak kepada Kebudayaan Nasional bangsa Indonesia. Untuk menunjang kegiatan dalam sektor kebudayaan di

Jawa Timur dibentuk Team Pembina Penertiban Kesenian di tiap kabupaten/kotamadya, dan juga dibentuk Pembantu Kebudayaan di tiap kecamatan se-Jawa Timur. Perkembangan kesenian khususnya seni daerah di Jawa Timur seperti seni tari, seni karawitan, dan seni lukis tetap berkembang dan bahkan dibentuk beberapa organisasi yang bergerak dalam bidang seni. Kesenian yang masih banak menonjol seperti Ludruk dan reog Ponorogo juga masih banyak mendapat perhatian dan masih digemari masyarakat Jawa Timur.

Dalam bidang pendidikan di Jawa Timur mendapat perhatian yang cukup besar. Dari pendidikan dasar sampai Perguruan Tinggi perkembangannya seiring dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan. Dalam pengembangan pendidikan sejak Pelita I Sekolah Dasar merupakan prioritas utama dalam pengembangannya. Karena itu program yang diterapkan untuk pendidikan dasar dimasukkan dalam program Pelita dan program non Pelita. Bahkan dana untuk Sekolah Dasar mencapai 37% dari dana APBD adalah untuk Sekolah Dasar. Untuk menunjang Program Wajib Belajar Sekolah Dasar 6 tahun di Jawa Timur diadakan beberapa SD kecil maupun SD Pamong yang diadakan di seluruh Dati II. Hal ini terutama untuk mengatasi masalah putus sekolah dan masalah ekonomis. Pada tingkat SMTA di Jawa Timur juga mengalami peningkatan, namun karena jumlah penduduk yang sangat besar jumlah SMTA Negeri tidak sebanding dengan tuntutan anak didik. Bahkan hingga Pelita IV SMTA Negeri hanya mampu menampung sekitar 40% dari anak sekolah, sedangkan 60%-nya disediakan oleh sekolah swasta. Sekolah kejuruan juga mengalami kemajuan. Hingga Pelita IV terdapat beberapa sekolah kejuruan yang banyak diminati siswa seperti STM Perkapalan di Sidoarjo, Polyteknik Pertanian di Jember, SMEA di tiap-tiap kabupaten, STM Pertanian di Blitar, Malang dan Tuban, SMK di Surabaya. Di tingkat Perguruan Tinggi di Jawa Timur memiliki beberapa Perguruan Tinggi yang tersebar di wilayah Jawa Timur seperti ITS, Unair, IKIP dan IAIN di Surabaya, Universitas Brawijaya di Jember. Di samping Perguruan Tinggi Darul Ulum di Jombang, Universitas Kristen

Petra Surabaya, Universitas Widyamandala dan masih banyak lagi universitas dan sekolah tinggi yang didirikan selama Pelita I sampai dengan Pelita IV.

Di samping Perguruan Tinggi juga dikembangkan lembaga penelitian yang dikembangkan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta. Program penelitian ini meliputi berbagai sektor yang dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Daftar Pustaka

- Abdurachman, Drs., *Pengantar Sejarah Jawa Timur*, Surabaya: 1976.
- Abdurachman, Dr., *Sejarah Madura Selayang Pandang*, Sumenep: 1988.
- Aminudin Kasdi, Drs. MS. *Pengantar Sejarah Indonesia Modern: Tinjauan Struktur Gerakan Sosial Politik di Jawa Tahun 1960*, Surabaya: University Press IKIP: 1995.
- AFT, Eko Susanto, Drs. Dkk., *Perajin Tradisional Propinsi Jawa Timur*, Depdikbud, Direktorat Jarahnitra 1992.
- A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan*, Bandung: Angkasa, 1977.
- A. Radjab, *Pelajar dan Perang Kemerdekaan*, Malang: Yayasan Widoro, 1977.
- Bambang Soedharsono Singgih, Drs. dkk., *Dampak Globalisasi Informasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Jawa Timur*, Depdikbud, Direktorat Jarahnitra, 1995.
- Bayu Surianingrat, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Dewaruci Press, 1981.
- Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi*, terjemahan *The Religion of Java*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.

- Depdikbud, dan Dinas Pariwisata Daerah, *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Jawa Timur*, laporan Kedua, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS Surabaya.
- Djanen, Drs. M.Sc. editor, *Pemukiman Sebagai Kesatuan Ekosistem*, Depdikbud-Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional: 1992-1993.
- Frans Priyohadi Marianno., dkk., *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial di Daerah Provinsi Jawa Timur*, Depdikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Jarahnitra: 1983/1984.
- George Mac Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca Cornell University Press, 1969.
- Gromay, Drs. Franciskus, *Prospek Industri Jasa Pariwisata*, Kanwil XV Deparpostel. Sulawesi Utara: 1993.
- Hartonom, Reog Ponorogo, *Proyek Penulisan dan Penerbitan Buku/Majalah Pengetahuan Umum dan Profesi* Depdikbud: 1980.
- Helmi Aswan, Drs. Dkk., *Dampak Pembangunan Industri Terhadap Kehidupan Budaya Masyarakat Setempat di Jawa Timur*, Depdikbud, Direktorat Jarahnitra: 1994.
- Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1962.
- Heru Sukadri K, Drs., *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*, Surabaya: Proyek IDKD, 1986.
- Jawa Timur Membangun Kini dan Esok*, Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur 1975.
- Joeniarto, S.H., *Seri Ilmu Hukum Tata Negara "Pemerintahan Lokal"*, Yogyakarta Y.B. Penerbit Dadjah Mada, 1967.
- Johanes Separno, dkk., *Sistem Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Jawa Timur*, Depdikbud,

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah: 1986.

Kempen RI, *Detik dan Peristiwa 17-8-1945 s.d. 23-1-1950*, Yogyakarta, 1950.

Kinong, Ir. Ketut, *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata*, Politeknik Universitas Udayana, Denpasar 1993.

Isbondo Tjahjono, *Gejala Polarisasi*, Makalah. Ilmu Sosial Unair Surabaya 1996.

Ita Novita A, Dra. Editor, *Perkembangan Masyarakat Akibat Pertumbuhan Industri di Daerah Jawa Timur*, Depdikbud, Direktorat Jarahnitra 1993.

Mien A. Rifai, dkk., *Mohammad Noer*, Jakarta: Yayasan Biografi Indonesia 1990.

Moerdiono, *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1994.

Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Djakarta: Tinta Mas, 1970.

Nasional, *Suatu Pendekatan untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Sospol UGM, 1974.

Nugroho Notosusanto, (ed), *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1977.

ODP. Sihombing, *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*, Djakarta: Sinar Djaja, 1962.

Pemerintah Dati I Jawa Timur, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Jawa Timur*, Buku II (A).

Pemerintah Dati I Jawa Timur, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Jawa Timur*, Buku II (B).

Pemerintah Dati I Jawa Timur, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Jawa Timur*, Buku III (A).

Perda No. 3 Tahun 1967 tentang *Pembangunan Tiga Tahun Daerah Jawa Timur 1967, 1968, 1969*.

R. Soekmono Drs. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1*, Yogyakarta: Kanisius 1987.

Republik Indonesia Provinsi Djawa Timur, Surabaya: Djawatan Penerangan, 1953.

Saino, Drs. *Pariwisata Sebagai Sektor Strategis dalam PJPO II* (artikel) Dalam Media Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Surabaya, No. 6. Tahun 1994.

Sam Karya Bhirawa Anaraga, *Sejarah Militer Kodam VIII/Brawijaya*, Surabaya: Dinas Sejarah Kodam VIII Brawijaya, 1974.

Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1992.

-----, *Pratest Movement in Rural Java*, Singapura: Oxford University Press, 1973.

-----, "Modernisasi dalam Perspektif Sejarah", dalam *Buletin Fakultas Sastra & Kebudayaan UGM No. 5 Mei*, 1977.

Semdam VIII/Brawijaya, *Sam Karya Bhirawa Anoraga*, (Malang, 1968).

Semdam VIII/Brawijaya, *Operasi Trisula*, Surabaya: Jajasan Taman Tjandra Wilwatikta, 1960.

Sketsmasa, *Operasi Trisula, tjet, ke 3*, Surabaya: Grip, 1969.

Soenarto Timoer, dkk., *Permainan Rakyat Daerah Jawa Timur*, Depdikbud Direktorat Jarahnitra 1993-1994.

- Sri Saadah Speono Dra., dkk., *Identifikasi Masalah Sosial-Ekonomi Akibat pemutusan Hubungan Kerja* (Kasus Pabrik Rokok di Jawa Timur) Depdikbud, Direktorat Jarahnitra 1993.
- Sunarto, dkk., *Monografi Daerah Jawa Timur*, Buku I, Depdikbud, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan 1977.
- Team ISD, *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Unipress IKIP Surabaya 1996.
- Team Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jawa Timur, *Sejarah Daerah*, (Surabaya: Balai Penelitian Pendidikan IKIP Surabaya, 1977).
- Team Penulisan Naskah Pengembangan Media Kebudayaan Jawa Timur, *Monografi Daerah Jawa Timur*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Depdikbud, 1977.
- Team Penulisan Naskah Pengembangan Media Kebudayaan Jawa Timur, *Monografi Daerah Jawa Timur*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Depdikbud, 1997.
- Trimarjono, SH., *Kantor Pemerintahan Daerah Tingkat I Jawa Timur*, Surabaya: 1975.
- UUD, P-4 DAN GBHN 1978, Team Pembina Penatar dan Bahan-bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia.

